PENDIDIKAN ISLAM

(Perkembangan Sosial, Politik dan Kebudayaan)

Dr. Drs. H. Khairunnas R, M.Pd.I

Dr. H. Kasful Anwar Us, M.P

PENDIDIKAN ISLAM

(Perkembangan Sosial, Politik dan Kebudayaan)

PENDIDIKAN ISLAM

(Perkembangan Sosial, Politik dan Kebudayaan)

Penulis:

Dr. Drs. H. Khairunnas R, M.Pd.I

Dr. H. Kasful Anwar Us, M.P

Editor:

Dr. Sumarto, M.Pd.I

Penerbit: Pustaka Ma'arif Press

Kerja sama Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Alamat Penerbit:
Jl. KH. Abdurrahman Wahid Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
Kode Pos. 36135 Telp./Fax. 0741-570298 Cp. 082136949568
Email : sumarto.manajemeno@gmail.com
Email : pustakamaarif16@gmail.com
www : staimaarif-jambi.ac.id

PENDIDIKAN ISLAM

(Perkembangan Sosial, Politik dan Kebudayaan)

Penulis :
Dr. Drs. H. Khairunnas R, M.Pd.I
Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd

ISBN : 978-602-5863-02-8

Editor :
Dr. Sumarto, M.Pd.I

Desain Sampul:
Dharma Setyawan, M.A

Tata Letak :
Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

Penerbit :
Pustaka Ma'arif Press
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Redaksi :
Jl. KH. Abdurrahman Wahid Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
Kode Pos. 36135 Telp./Fax. 0741-570298 Cp. 082136949568
Email : sumarto.manajemeno@gmail.com
Email : pustakamaarif16@gmail.com
www : staimaarif-jambi.ac.id

Cetakan Pertama, Mei 2018
Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SAMBUTAN PENULIS

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Buku yang berjudul "*Pendidikan Islam (Perkembangan Sosial, Politik dan Kebudayaan)*" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW *uswatun hasanah* bagi kita semua dan semoga senantiasa kita selalu menjalankan prinsip-prinsip kehidupan *ahlisunnah waljama'ah*.

Pendidikan Islam perkembangan sosial, politik dan kebudayaan pada dasarnya dapat difahami dengan pengertian yaitu pendidikan Islam dan politik dimaksudkan suatu proses transformasi nilai-nilai sosial politik melalui institusi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dan politik dimaksudkan mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam berdasarkan sejarah perpolitikan di Indonesia pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Melihat terjadinya proses transformasi nilai-nilai politik, sosial dan kebudayaan melalui institusi pendidikan Islam. Kajian aspek historis, dengan mencoba menampilkan beberapa persoalan yaitu korelasi antara pendidikan Islam dan politik, implikasi sosialisasi politik dalam sistem pendidikan dan bagaimana pasrtisipasi mahasiswa dalam aktifitas politik. Lebih lanjut dan lebih menarik akan disampaikan dalam buku ini.

Demikian yang dapat disampaikan penulis. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu dari banyaknya buku yang mengkaji tentang "*Pendidikan Islam (Perkembangan Sosial, Politik dan Kebudayaan)*", sumber informasi dan pendalaman kembali keilmuan kita sebagai seorang ilmuan yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah lelah, yang selalu memompa semangatnya dan motivasinya untuk mencintai ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi civitas akademika khususnya Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan masyarakat sacara umum.

Jambi,   Mei 2018

Penulis,

Dr. Drs. H. Khairunnas R, M.Pd.I

Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd

KATA PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA UIN STS JAMBI

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini, yang ditulis oleh Dr. Drs. H. Khairunnas R, M.Pd.I dan Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd.I yang berjudul "*Pendidikan Islam* (*Perkembangan Sosial*, *Politik dan Kebudayaan*)". Judul yang sangat menarik untuk dibaca, dikaji dalam seminar, diskusi dan panduan bagi para mahasiswa/i di Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara khusus dan seluruh di Pendidikan Tinggi di Indonesia secara umum.

Secara khusus saya sangat menghargai dan memberi apresiasi yang tinggi atas ketekunan dan semangat penulis buku ini dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penulis masih mampu memberikan kontribusi dengan karyanya untuk Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Buku yang sangat menarik untuk di baca, di kaji dan dipelajari oleh kaum akademisi untuk di jadikan sebagai sumber referensi dan pembelajaran.

Dengan hadirnya buku ini, sangat membantu para mahasiswa dan dosen yang sedang menempuh perkuliahan maupun para dosen untuk dijadikan salah satu rujukan khususnya yang berkaitan dengan tema "*Pendidikan Islam* (*Perkembangan Sosial*, *Politik dan Kebudayaan*)".

Semoga karya yang telah dihasilkan ini tidak terhenti sampai disini, dan akan lahir karya-karya monumental penulis yang berikutnya, sebagai bahan pengayaan bagi mahasiswa, peneliti, guru, dosen dan masyarakat umumnya diseluruh tanah air Indonesia. Semoga Allah memberikan keberkahan. Aamiin.

Jambi, Mei 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Ahmad Husein Ritonga, M.A.

NIP. 19640112 199203 1 001

DAFTAR ISI

BAGIAN 1

POLITIK KEKINIAN TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendahuluan

Reformasi yang digulirkan beberapa tahun lalu telah membawa sebuah perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan di indonesia salah satunya adalah bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari konteks politik kekinian yang sedang berlaku di indonesia. Latar belakang dan sejarah, membuktikan bahwa pendidikan di indonesia dicampuri atau turut diatur berdasarkan sistem politik yang berlaku, terutama dalam koridor membuat kebijakan strategis untuk memajukan bangsa indonesia. Sangat berbeda dengan sistem politik dibeberapa negara lainnya, tidak mencampuri dunia pendidikan, jika ada hanya sangat rendah.

Sejak lahir dan berkembangnya ilmu politik dalam pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka, pendidikan menjadi tulang punggung yang utama dalam merebut dan mengisi kemerdekaan RI, karena dari sanalah proses penyadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajibanya sebagai manusia dan masyarakat pribumi ditanamkan.

Dari judul yang ada yaitu pendidikan Islam dan politik pada dasarnya dapat difahami dengan dua pengertian, Pertama, pendidikan

Islam dan politik dimaksudkan suatu proses transformasi nilai-nilai sosial politik melalui institusi pendidikan Islam. Kedua, pendidikan Islam dan politik dimaksudkan mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam berdasarkan sejarah perpolitikan di Indonesia pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis mencoba fokus sesuai dengan pengertian pertama yakni melihat terjadinya proses transformasi nilai-nilai politik melalui institusi pendidikan Islam. Pembahsan ini akan banyak menggunakan pendekatan aspek historis, dengan mencoba menampilkan beberapa persoalan yaitu korelasi antara pendidikan Islam dan politik, implikasi sosialisasi politik dalam sistem pendidikan dan bagaimana pasrtisipasi mahasiswa dalam aktifitas politik.

B. POLITIK KEKINIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

1. Kontribusi Politik terhadap pendidikan Islam

Studi kasus ini sangat nyata ketika pemerintah orde baru melanggengkan kekuasaanya selama 32 tahun, intervensi pemerintah melalui penyajian subjek tertentu dalam kurikulum (seperti mata pelajaran/kuliah pancasila); indoktrinasi atau penataran (seperti penataran P4), adalah bukti nyata bahwa pendidikan adalah salah satu sarana kepentingan politik penguasa pada masa itu.

Menurut, Mochtar Buchori[1] dalam pandanganya bahwa generasi politik yang mengatur kehidupan bangsa selama periode orde baru tumbuh pada waktu kondisi pendidikan kita sudah mulai menurun. Ekspansi sistem pendidikan yang berlangsung sangat cepat pada waktu itu, tanpa diketahui dan dikehendaki, telah merosotkan mutu sekolah-sekolah. Kemerosotan ini terjadi, karena elit pendidikan yang sangat kecil yang dimiliki saat itu, harus direntang panjang-panjang untuk memungkinkan ekspansi sistem yang cepat tersebut.

---

1 Mochtar Buchori, *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia", dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.19

Pada masa Orde Baru birokrasi sebagai sarana efektif untuk melakukan intervensi kepada semua aspek kehidupan bernegara. Eksistensi penguasa concern utama bagi pemerintah, sehingga intervensi yang dilakukan oleh penguasa terhadap semua aspek kehidupan bernegara sebagai instrumen penting untuk mendorong kelestarian dan kelangsungan penguasa. Akibat dari sistem sentralis ini membuat sikap apatis dikalangan cendikiawan dan semua lapisan masyarakat untuk berfikir secara demokratris, kristis, dan kreatif.

Sistem pemerintahan Orde Baru ini, menghalangi munculnya gerakan oposisi sebagai *social control* terhadap pemerintahan atau penguasa. Oposisi dalam suatu negara yang demokratis menjadi suatu keharusan poltik yang harus ditempatkan pada posisi yang penting. Di Indonesia ini di gerakan oposisi di pandang oleh penguasa sebagai pendobrak terhadap eksistensi penguasa, sehingga munculnya oposisi selalu tidak sepi oleh kecurigaan pengausa, di dukung oleh otoritarian.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya kasus yang sama terjadi dimana masih terdapatnya pemimpin kita, baik dalam skala nasional maupun daerah menjadikan pendidikan (apalagi pendidikan Islam) sebagai komoditas politik, sehingga "tema-tema" pendidikan kadang-ladang menjadi slogan politis dalam upaya melanggengkan kekuasaanya, entah dalam kasus masih dalam pemerintahanya maupun ketika menjelang Pilkada.

Sering dilupakan oleh kalangan pendidik bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah aspek politik. Dalam aspek ini di jelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan, hubungan antar negara, hubungan antar organisasi, dan sebagainya. Atas dasar ini, antara pendidikan Islam dengan politik punya hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan.

Dalam sejarah, hubungan antara pendidikan dengan politik bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filusuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens terhadap persoalan politik. Kenyataan ini misalnya ditegaskan

dengan ungkapan "*As is the state, so is the school* ", atau "*What you want is the state, tou must put into the school* ". James.S.Colemanditulis oleh Supriyanto dalam H. Abudin Nata, selain terdapat teori yang dominant dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi bagi suatu tatanan demokratis.[2]

Dalam sejarah Islam misalnya, hubungan antara pendidikan dengan politik dapat dilacak sejak masa-masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga- lembaga pendidikan Islam. Sepanjang sejarah terdapat hubungan yang amat erat antara politik dengan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pendirian beberapa lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah yang justru disponsori oleh penguasa politik. Contoh yang paling terkenal adalah madrasah Nizhamiyah di Bagdad yang didirikan sekitar 1064 oleh Wazir Dinasti Saljuk, Nizham al- Mulk. Madrasah ini terkenal dengan munculnya para pemikir besar. Misalnya, Al- Ghozali sempat mentransfer pengetahuanya di lembaga ini, yakni menjadi guru yang cerdas.

Di Indonesia, sudah muncul lembaga pendidikan dalam bentuk "madrasah", yang merupakan konsekuensi dari proses modernisasi "surau" yang cenderung disebabkan oleh terjadinya tarik menarik antara sistem pendidikan tradisional dengan munculnya lembaga pendidikan modern dari barat. Namun, fenomena ini sudah disadari oleh salah seorang cendikiawan muslim yaitu, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa peran ulama telah melahirkan sistem budaya kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik, disamping spiritual. Hal ini terbukti banyaknya para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalam mupun di luar negeri[3].

Madrasah di Indonesia yang didirikan dan dikelola oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya. Misalnya, Madrasah yang didirikan oleh Muhammadiyah

---

2 H. Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 21.

3 M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelejensia Dan Perilaku Politik, Risalah Cendikiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), Hal. 193.

lebih bersifat ala kemuhammadiyahannya. Demikian halnya dengan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh NU orientasi pendidikanya lebih menitik beratkan pada kemurnian mazhab.

Konsekuensi dari keragaman orientasi pendidikan tersebut adalah munculnya para tokoh formal dan informal yang memiliki pemikiran dan pergerakan politik yang berbeda[4], Ada yang berfikir lebih modernis, fundamentalis, tradisionalis dan nasionalis. Meski perilaku politik seorang tokoh semata-mata tidak hanya ditentukan oleh institusi pendidikan tertentu dan masih ada faktor lain (lingkungan, sosiokultural, potensi berfikir, dan sebagainya), pengaruh suatu institusi pendidikan cukup berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang untuk mempunyai paradigma berfikir yang berbeda.

Sejarah Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) juga amat menarik untuk dijadikan sebagai sample mengenai korelasi signifikan antara pendidikan Islam dan politik. Sebab pada kasus ini politik menjadi mediasi untuk menumbuh kembangkan institusi pendidikan Islam. GUPPI yang sejak awal berdirinya merupakan wadah organisasi Islam yang terbentuk sebagai sikap peduli para tokoh muslim setelah melihat gejala besarnya partisipasi politik para tokoh-tokoh muslim yang berakibat kurangnya perhatian mereka terhadap pendidikan Islam.

Namun, dalam perjalanan berikutnya, strategi untuk meningkatkan perkembangan dan kualitas pendidikan Islam, para tokoh-tokoh aktivis GUPPI lebih memilih untuk bergabung dan berafiliasi pada partai politik tertentu, dengan harapan bahwa melalui jalur ini kepentingan GUPPI untuk mengembangakan dan meningkatkan mutu pendidikan dapat terpenuhi. Sayangnya, peran politik yang dimainkan oleh para aktivis GUPPI di partai (partainya tidak dituliskan) kurang maksimal, akhirnya cita-cita dan impian yang dicapai untuk menyalurkan kepentingan umat Islam dalam meningkatkan pendidikan Islam belum memenuhi harapan. Terlepas dari seluruh kegagalan

---

4 Deliar Noer*, Administrasi Islam di Indonesia* (Yayasan Risalah: Jakarta, 1983) hal. 6-7.

tersebut, penulis hendak mengatakan bahwa keterlibatan dalam berpolitik dapat menjadikan mediasi untuk menyalurkan kepentingannya secara individual maupun organisasi.

Secara umum bahwa pendidikan (Dalam konteks politik Indonesia) pada masa orba jelas hanya berorietasi mengabdi kepada kepentingan negara dan penguasa. Penciptaan manusia penganalis sebagimana di canangkan DR. Daud Yusuf, dalam prakteknya justru merupakan proses pengebirian kebebasan akademik dan kreativitas mahasiswa serta melahirkan para birokrat-birokrta kampus. Sehingga hasilnya adalah generasi yang apatis dengan lingkungan sekitar namun sangat *self- centered*. Mereka jelas bukan manusia yang dicita-citakan Muhammad Hatta dan tokoh nasioanlisnya dimana pencerahan, pemahaman, dan penyadaran akan hak dan kewajibannya sebagi anak bangsa menjadi landasan kiprahnya.

Reformasi yang telah bergulir, semestinya dapat merintis jalan bagi pemulihan kembali demokratisasi yang selama beberapa dasawarsa mengalami diskontinuitas. Termasuk dalam hal ini adalah upaya mengembalikan fungsi dan peran pendidikan sebagiamana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang termaktub dalam konstitusi, yang difomulasikan dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembenahan secara fundamental terhadap sistem Pendidikan Nasional merupakan *conditiosine quainin* yang harus dimulai dari tataran yang paling dasar visi sampai dengan implementasi dalam kurikulum. Pada tataran paling dasar, tujuan pendidikan untuk membentuk kepribadian manusia Indonesia yang tercerahkan dan memiliki tanggung jawab, merupakan substansinya. Dengan landasan visi seperti ini, maka pendidikan tidak lagi hanya ditujukan untuk memproduksi manusia terpelajar dan berkeahlian demi malayani keperluan pasar tenaga kerja manusia yang di kuasai oleh kehendak untuk mengontrol, mengekploitasi, dan berkuasa, tetapi yang dipentingkan adalah pertumbuhannya manusia berbudaya yang dapat menghayati dan memahami kehidupan bersama, sebagai komunitas (*the community of*

being) yang saling terkait satu sama lain dan karena saling menjaga dan membuahkan mengeksploitasi.

Untuk mewujudkan visi semacam itu di perlukan proses pendidikan yang menggunakan pendekatan pendidikan demokratis. Bukan lagi proses searah *one way communication*. sebagaimana yang kita temukan diruang-ruang kelas mulai dari TK hingga keuniversitas, proses belajar mengajar bukan lagi proses pencekokan murid/mahasiswa dengan berbagai materi yang terkesan sangat normatif bahkan sakral, tetapi marupakan proses dialektika antara para pelakunya, dengan mempermasalahkan fenomena-fenomena yang hangat dalam masyarakat.

Akhirnya denga perombakan sistem pendidikan nasional itulah kita berharap bahwa, pendidikan akan menjadi faktor utama dalam proses menjadi bangsa yang modern dengan mengedepankan ciri khas seperti; beradab, berbudaya, beretika, bermoral, serta tercerahkan.

2. Dampak atas Devisit Jam Pelajaran Agama Di Sekolah Umum

Salah satu masalah yang sering dikemukakan para pengamat pendidikan Islam yaitu adanya pengurangan atau kekurangan jam pelajaran untuk pengajaran agama Islam yang disediakan di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, atau SMA/SMK. Masalah inilah yang sering di anggap sebagai penyebab utama timbulnya kekurangan para anak didik atau siswa dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Seaagi akibat dari kekurangan ini, para anak didik tidak memiliki bekal yang memadai untuk membentengi dirinya dari berbagai pengaruh negatif akibat globalisasi yang menerpa kehidupan . Banyak siswa dan pelajar yang terlibat dalam pergaulan dan perbuatan yang kurang terpuji seperti, tawuran, pencurian, penodongan, palakan, penyalah gunaan obat-obatan terlarang, dan sebagainya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, solusi yang ditawarkan antara lain dengan menambah jumlah jam pelajaran agama

di sekolah dan dengan menambah waktu untuk memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tua di rumah. Disini akan kami berikan solusi dan alternatif untuk menambah jam pelajaran Agama :

1. Merubah orientasi dan fokus pengajaran agama yang semula bersifat *subjek matter oriented* menjadi pengajaran agama yang berorientasi pada pengalaman dan pembentukan sikap keagamaan melalui pembiasaan hidup sesuai dengan agama.
2. Dengan cara menambah jam pelajaran agama yang diberikan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam kaitan ini berupa kegiatan ekstra kurikuler seperti pesantren kilat, ROHIS dan lain sebagainya (perlu dievaluasi kembali untuk lebih bermanfaat).
3. Meningkatkan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan serta pengawasan yang di berikan oleh kedua orang tua di rumah. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa anak-anak yang sedang dirumah tumbuh dewasa dan belum membentuk sikap keagamaannya sangat memerlukan bantuan dari kedua orang tua.
4. Dengan cara melaksanakan tradisi keislaman yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disertai dengan penghayatan akan makna dan pesan moral yang terkandung di dalamnya.
5. Pembinaan sikap keagamaan tersebut dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan berbagai mass media yang tersedia, seperti radio, surat kabar, buku bacaan, televisi, dll. Di ketahui bahwa salah satu ciri di era modern ini adalah tersedianya berbagai media komunikasi dan informasi di samping menawarkan berbagai pilihan yang negatif juga pilihan yang positif.[5] Atau contoh lain, dalam melakukan praktikum IPA, guru bisa menyampaikan perlunya kejujuran dan kesabaran dalam melakukan praktek, sebab tanpa semua itu hasil dari praktek tidak akan memuaskan bahkan mungkin gagal.

---

5 http://yuliagusyulianto.blogspot.com/2011/03/mensiasati-kekurangan-jam-pelajaran-pai.html.

3. Quantum Teaching Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Ada keprihatinan yang perlu ditanggapi dan direspon secara serius di negeri kita yang sama-sama dicintai berkenaan dengan pendidikan. Tampaknya pendidikan belum dianggap sebagai salah satu faktor pokok dan penyebab utama terpuruknya bangsa ini disegala sisi. Terbukti bahwa tudingan-tudingan sebagian besar pengamat, apalagi para politisi hanya diarahkan atau terfokus pada kajian ekonomi dan politik. Pendidikan seolah-olah bukan bagian pokok penyebab nyaris keambrukan negeri ini.

Realitas ini menunjukkan kapasitas dan wawasan bangsa ini masih belum bisa berpikir jauh kedepan (maaf kata-kata menyinggung perasaan). Artinya kapasitas dan wawasan kita rnasih berkutat pada kondisi kekinian saja sehingga solusi dan pemecahan problema juga rnelulu bersifat teknis-pragmatis, tidak strategis jangka panjang. Memang solusi teknis-pragmaris sangat dibutuhkan, tetapi mestinya solusi tersebut tidak mengorbankan program-program strategis jangka panjang karena itu diperlukan keberanian untuk menetapkan perioritas dibidang pendidikan sehingga sektor-sektor yang lain mengalarni penghematan. Mestinya kita semua tidak takut untuk berpihak dan kita sama-sama mengikat pinggang demi rneningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan program strategis jangka panjang. Karena itu, kerja-kerja dan perbaikan serta peningkatan bidang pendidikan tidak bisa dijalankan secara reaktif, sarnbil lalu dan sekenanya, melainkan mesti dengan cara proaktif, intensif dan strategis.

Membicarakan pendidikan, tentu melibatkan banyak hal yang harus direnungkan sebab, pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku manusia yang dilakukan demi memperoleh kesinambungan, pertahanan dan peningkatan hidup. Dalam Bahasa Agama, demi memperoleh ridha atau perkenan Allah. Sehingga keseluruhan tingkah laku tersebut membentuk sbuah keutuhan manusia yang berbudi luhur (berakhlakul karirnah), atas dasar iman kapada Allah dan tanggung jawab pribadi dihari kernudian.

Dalam hal pendidikan Islam, maka Affandi Mochtar menyatakan bahwa kebijaksanaan pengernbangan pendidikan Islam pada masa depan harus diorientasikan pada target keunggulan mengingat tantangan kompetisi baik pada tingkat lokal maupun global yang semakin luas.[6] Gagasan seperti ini akan semakin baik apabila diikuti dengan pola kebijaksanaan (politik) yang adil dan tidak diskrirninatif dengan memberikan peluang dan dukungan yang seimbang terhadap semua bentuk lembaga pendidikan yang berkembang di masyarakat.

Diantara kendala besar yang dihadapi untuk rnenjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berkualitas adalah rendahnya kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM), Lebih khusus lagi disebabkan oleh rendahnya daya kreativitas. dan profesionalitas guru dalam pengelolaan kelas, termasuk bagaimana menyusun Langkah-langkah dalam proses pengajaran yang seharusnya. Misalnya guru belum terbebas dari penerapan metode pelajaran yang masih terlalu mementingkan *subject matter* (seperti terlihat dalam Garis-garis besar program pengajaran, GBPP, yang rigid) dari pada siswa, dalam hal ini siswa sering merasa dipaksa untuk menguasai pengetahuan dan rnelahap informasi dari guru tanpa memberi peluang kepada para siswa untuk melakukan perenungan secara kritis. Pada gilirannya kondisi seperti ini melahirkan proses belajar-mengajar rnenjadi satu arah. Guru memberikan berbagai pelajaran dan informasi menurut GBPP, sedang siswa dalam kondisi terpaksa harus menelan dan rnenghafal secara mekanis apa-apa yang telah disampaikan oleh guru. Guru menyampaikan pernyataan-pernyataan, dan murid mendengarkan dengan patuh. Pendidikan menjadi sangat analog dengan kegiatan menabung, dimana guru menjadi penabung dan murid adalah celengannya.[7]

Metode pengajaran semacam ini mengakibatkan para siswa menjadi tidak memiliki keberanian untuk rnengemukakan pendapat, tidak kreatif, inovatif dan mandiri, apalagi untuk berpikir inovatif dan

---

6 Rahim, Husni, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu) hal. 11.
7 Sidi, Djati Indra, *Menuju Masyarakat Belajar*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 2001) hal. 27.

problem solving, suasana belajar yang penuh keterpaksaan itu berdampak pada hilangnya upaya mengantisipasi potensi otak, sehingga potensi otak yang luar biasa itu belum pernah berhasil mengaktual, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas lulusannya (*output*).

Dengan demikian sebuah metode yang lebih cocok bagi para siswa di masa sekarang ini harus ditemukan, untuk kemudian diterapkan. Apapun nama dan istilah metode tersebut tidak jadi soal, asalkan ia lebih menekankan peran aktif para siswa. Guru tentu saja tetap dianggap lebih berpengalaman dan lebih banyak pengetahuannya, tetapi ia tidak pemegang satu-satunya kebenaran. Sebab, kebenaran bisa saja datang dari para siswa dan kebijakan politik bangsa.

Sehubungan dengan masalah ini dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah ditemukan rancangan dan sistem pengajaran yang dikenal dengan istilah *Quantum Teaching*, yaitu rancangan sistem pengajaran yang menggairahkan dan bertumpu pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik *Quantum Learning* di ruang-ruang kelas di sekolah. Dengan kata lain sistem pengajaran ini dirancang untuk mempraktekkan secara terstruktur dan terarah metode *Quantum Learning* di ruang kelas. Sistern pengajaran ini diformulasikan untuk mencetak siswa-siswa yang tidak hanya memiliki keterampilan akademis, tetapi juga memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sebuah keterampilan penting yang penggunaannya tidak dibatasi oleh dinding-dinding ruangan kelas, melainkan oleh langit, udara, laut dan bumi.[8] Quantum Teaching merangkaikan hal-hal yang dianggap terbaik rnenjadi sebuah paket multi sensori, multi kecerdasan, dan kornpatibel dengan otak, yang pada akhirnya akan melejitkan kemampuan guru untuk mengilhami dan kemampuan murid untuk berprestasi.

Sebuah pendekatan belajar yang segar, mengalir, praktis, dan mudah diterapkan, *Quantum Teaching* menawarkan suatu sintesis dari cara-cara baru untuk memaksimalkan dampak usaha pengajaran

8 Porter, De, Bobbi, *Quantum Learning*, Cet. V, (Bandung: Kaifa, 1999).

melalui perkembangan hubungan penggubahan belajar, dan penyarnpaian kurikulum. Metodologi ini dibangun berdasarkan pengalaman delapan belas tahun dan penelitian terhadap 25.000 siswa dan sinergi pendapat dari ratusan guru.

Quanturn Teaching mencakup petunjuk spesifik untuk rnenciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. Quantum Teaching merupakan karya Bobbi De Porter, Kepala Learning Forum, sebuah perusahaan yang berbasis di Oceanside, California. Dia seorang profesional di bidang pendidikan dan mempunyai daya kreatifitas yang sangat mengagurn.

Dalarn Islam, setiap pekerjaan termasuk pekerjaan guru harus dilakukan secara profesional, dalam arti dilakukan secara baik dan benar, apabila dilakukan oleh orang yang berkeahlian. Karena bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli maka tunggulah kehancurannya. Kehancuran disini dapat diartikan secara terbatas dan bahkan juga sampai berantai dan berakibat terjadinya kehancuran secara luas dan terus-menerus

4. Kesimpulan

Pendidikan Islam dan politik dimaksudkan sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai sosial politik melaui institusi pendidikan Islam. Kemudian juga pendidikan Islam dan politik dimaksudkan mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam berdasarkan sejarah perpolitikan di Indonesia pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

Tarnsformasi nilai-nilai politik melalui institusi pendidikan dengan melakukan intervensi terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, sementara ada beberapa peran dan fungsi pendidikan Islam dalam politik diantaranya adalah Pendidikan Islam sebagai sarana untuk kepentingan politik penguasa, Pendidikan Islam sebagai wahana

kepentingan keagamaan dan sarana mempertahankan identitas ke-Islaman, Pendidikan Islam sebagai sarana melahirkan warga negara yang baik, Pendidikan Islam sebagai wahana melahirkan elit-elit bangsa, Pendidikan Islam sebagai wahana untu melahirkan high politik (politik tingkat tinggi).

Kemudian juga melalui politik kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan kulitas pendidikan dapat dilakukan dengan ikut serta dalam sistem perpolitikan atau paling tidak berada dalam lingkaran kebijakan baik berskala lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Deliar Noer. *Administrasi Islam di Indonesia*. Yayasan Risalah: Jakarta. 1983.

http://yuliagusyulianto.blogspot.com/2011/03/mensiasati-kekurangan-jam-pelajaran-pai.html.

James.S.Colemanditulis oleh Supriyanto dalam H. Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2001.

M. Dawam Rahardjo. *Intelektual, Intelejensia Dan Perilaku Politik, Risalah Cendikiawan Muslim*. Bandung: Mizan. 1993.

Mochtar Buchori. *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesi. dalam Sindhunat. Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius. 2000.

Porter, De, Bobbi. *Quantum Learning*. Cet. V. Bandung: Kaifa. 1999.

Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2001.

Sidi, Djati Indra. *Menuju Masyarakat Belajar*. Cet. I. Jakarta: Paramadina. 2001.

Tayar Yusuf. *Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

BAGIAN 2

PANDANGAN ISLAM TERHADAP EKONOMI DAN BUDAYA

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari unsur sosial dan budaya. Sepanjang kegiatan kehidupan manusia, aktivitasnya tidak terlepas dari kelompok manusia lainnya. Selalu dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial karena memerlukan kehadiran dan bantuan serta peran serta orang lain. Sosial budaya ini tercermin pada kegiatan sekelompok manusia secara bersama-sama. Hal-hal yang dikerjakan manusia, cara mengerjakannya, bentuk pekerjaan yang diinginkan merupakan unsur sebuah karya budaya. Maka, aspek sosial ditinjau dari hubungan antar individu, antar masyarakat serta aspek budaya ditinjau dari proses pendidikan manusia tersebut melalui materi yang dipelajari, cara belajarnya, bagaimana gaya belajarnya, bentuk-bentuk belajar serta pengajaranya.

Maka, pendidikan pada hakikatnya adalah kegiatan sadar dan disengaja secara penuh tanggung jawab yang dilakukan orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan yang dilakukan secara bertahap berkesinambungan disemua lingkungan yang saling mengisi (rumah tangga, sekolah, masyarakat). Unsur sosial merupakan aspek

individual alamiah yang ada sejak manusia itu lahir. Langeveld mengatakan “setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas atau kemampuan untuk bergaul, saling berkomunikasi yang pada hakikatnya terkandung unsur saling memberi dan saling menerima menurut. sedangkan Umar Tirtarahardja, aktivitas sosial tercermin pada pergaulan sehari-hari, saat terjadi interaksi sosial antar individu yang satu dengan yang lain atau individu dengan kelompok, serta antar kelompok. Di dalam interaksi ini ada keterkaitan yang saling mempengaruhi

Terlepas dari itu semua, pada zaman modern ini setidaknya telah membuka wawasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat modern atau masyarakat tradisional terkait pentingnya pendidikan berikut upaya-upaya/cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka wawasan masyarakat. Selain dari pendidikan, politik yang ada dalam masyarakat besar maupun kecil perlu kiranya dibedah selebar-lebarnya agar masyarakat paham akan pentingnya pendidikan yang ada di Indonesia dan memanfaatkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat harus paham betul pentingnya politik pendidikan terhadap pendidikan, karena muara politik pendidikan menuju kepada kebijakan pendidikan, bukan semata-mata politisasi pendidikan. Hal ini perlu dipertegas karena bagi masyarakat kecil atau tradisional beranggapan bahwa politik adalah kotor dan lain sebagainya. Sehingga masih menjadi perdebatan apakah dalam dunia pendidikan ada yang menggunakan politik atau tidak.

Krisis moneter melanda dimana-mana, termasuk di negeri tercinta ini. Manusia hidup tidak lepas dari prinsip politik ekonomi. Politik ekonomi Islam sebagai instrumen agar terwujudnya masyarakat harmonis. Tetapi cita-cita harus terwujudkan mengingat besarnya kekuatan dari idiologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai sepak terjang, seperti: kriminalisasi melalui pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, kependudukan, politik dan sebagainya.

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, seperti di Indonesia telah menjadi wacana publik. Mulai berkembangnya pengkajian tentang kebijakan pendidikan ke ranah publik dapat kita cermati mengenai pelaksanaan amandemen keempat Undang Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk pengembangan pendidikan nasional.9

Dengan politik, ekonomi Islam diharapkan mampu menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer setiap warga negara Islam secara menyeluruh baik sandang, pangan dan papan jasmani maupun rohani. Untuk itulah, kami sangat berharap kepada pembaca dari simpulan materi ini, kita semua mampu menjadikan politik ekonomi Islam yang kembali sempurna sesuai hukum syara' untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

B. **PANDANGAN ISLAM TERHADAP EKONOMI, BUDAYA, DAN POLITIK** EKONOMI **ISLAM.**

1. Pengertian dan definisi

Sebelum mendiskusikan lebih jauh mengenai politik dan pendidikan, ada baiknya untuk mengetahui apa arti dari politik itu sendiri. Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya "*Pendidikan Agama Islam*" menurut Amnur disebutkan: politik itu berasal dari bahasa latin *Politicus* atau bahasa Yunani *Politicos* yang artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota.10

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian politik sebagimana yang ditulis: (1) Pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan dan sebagainya; (2) segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya,

9 A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 2.
10

tentang pemerintahan ataupun terhadap negara lain; (3) Kebijakan, cara bertindak didalam menghadapi suatu masalah tertentu. Secara singkat dikatakan bahwa politik adalah suatu cara atau metode mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mencapai tujuan kelompok.

Dari uraian terkait pendidikan politik seperti tertulis di atas, penulis dapat menarik intisari tentang pendidikan politik setidaknya memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Adanya suatu pendekatan, metoda ataupun strategi yang digunakan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan, (2) Adanya pihak yang dipengaruhi, dan (3) Adanya produk nyata dari pengambilan suatu kebijakan atau kontribusi politik sehat.

Setelah kita mengetahui arti dari politik pendidikan, maka pada bagian pembahasan berikutnya akan ditampilkan topik tentang keterkaitan antara politik dan pendidikan dalam sistem sosial politik, di mulai dari dunia Islam Klasik, kemudian keterkaitan antara politik dan pendidikan dalam sistem sosial politik di Indonesia, baik pasca kolonial maupun perkembangan dewasa ini menyangkut permasalahan seputar pendidikan dan sikap kelompok, pendidikan dan dunia kerja, format hubungan antara politik dan pendidikan, *ide non-political school*, hambatan kedepan serta perkembangan di Indonesia.

2. Pengertian Ekonomi Politik

Biasanya ketika berbicara atau membahas ekonomi maka ingatan akan langsung tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur produksi, komsumsi, distribusi, investasi, ekspor dan impor dan sebagainya yang tentu berbeda ketika membahas politik, istilah kata yang akan ditemukan seperti negara, ideologi, kelompok, pemerintah dan sebagainya.

Kemudian seiring dengan perkembangan dunia, kajian mengenai ekonomi politik pun semakin luas. Dengan sengaja atau tidak kedua kata yang secara empiris maupun istilah berbeda tersebut, dipadu-padankan

menjadi satu kalimat ekonomi politik. Sehingga dari kata tersebut muncul kajian baru yang berkaitan dengan kegiatan maupun keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masayarakat atau rakyannya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara yang bersangkutan.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia,politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan.11

Salah satu unsur politik pendidikan yang menunjang kehidupan masyarakat industri modern ialah pendidikan yang memperioritaskan kepada kualitas. Pemberian prioritas kepada kualaitas bukan berarsi suatu sistem pendidikan yang elitis tetapi yang memberi kesempatan kepada setiap orang mengembangkan bakat sesuai kemampuannya dengan. Pendidikan yang selektif untuk rogram yang relevan, pendidikan untuk anak pintar, merupakan program yang perlu dilaksanakan.

Politik pendidikan dengan sadar menyiapkan tenaga yang cukup jumlahnya dan terampil untuk mendukung masyarakat industri perlu dengan sungguh-sungguh disiapkan. Persoalannya ialah masyarakat industri modern yang akan kita bina adalah masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu pendidikan merupakan landasan utama bagi tumbuhnya rasa nasionalisme yang positif. Usaha ini tentu saja harus mendapat perhatian utama dalam pendidikan dasar 9 tahun (wajar 9 tahun). Pelaksanaan politik pendidikan ini menuntut cara penyajian yang efektif sesuai dengan taraf pendidikan rakyat dan tumbuhnya kehidupan yang terbuka. Untuk itu metodologi yang rasional dan kritis sangat diperlukan sehingga mampu mengolah berbagai bentuk arus globalisasi.

Ungkapan Economie Politique yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai ekonomi politik, pertama kali muncul di Perancis pada

---

11 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, (*Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2003), hal. 905.

tahun 1615 dengan buku terkenal oleh Antoine Montchrétien de: Traité de l'Economie Politique. Physiocrats Prancis, Adam Smith, David Ricardo dan filsuf Jerman, dan sosial teori Karl Marx beberapa eksponen ekonomi politik. Pada 1805, Thomas Malthus menjadi profesor pertama Inggris ekonomi politik, di East India Company College, Haileybury, Hertfordshire. Guru pertama di dunia dalam ekonomi politik didirikan pada tahun 1763 di Universitas Wina, Austria, Joseph von Sonnenfels adalah profesor tetap pertama. Di Amerika Serikat, ekonomi politik pertama adalah mengajar di College of William dan Mary, pada tahun 1784 Adam Smith The Wealth of Nations adalah buku teks yang dibutuhkan.

Ekonomi dan politik yang berkolaborasi kemudian kedua istilah ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah seperti dalam dibidang moneter, fiskal dan komersial. Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, sebenarnya terdapat motif dari ekonomi politik, yaitu bahwa di dalam kegiatan ekonomi selalu ada yang namannya motif politik yang tidak bisa di pungkiri.

Begitupun dalam kegiatan politik tak jarang terselip secara jelas motif ekonomi. Contoh : Ekspor Cina ke Amerika dikaitkan dengan kepentingan politik, seperti bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka serta merta AS mengancam akan meninjau kembali kebijakan perdagangannya dengan Cina, Indonesia ketika dianggap tidak mengendalikan keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat, IMF langsung menghentikan perundingan pemberianbantuan.

Dilihat dari pendekatannya, ekonomi memiiliki sifat yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan bahwa politik dan ekonomi adalah satu hal yang berbeda. Ini berangkat dari pemikiran bahwa pasar dapat memperbaiki sendiri bila ada kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Pandangan ini menekankan bahwa ekonomi harus berdiri diluar wilayah-willayah politik karena efektif atau tidaknya sebuah pasar itu diluar campur tangan pemerintah. Hal ini merupakan khas pemikiran kaum klasik. Namun bila dari sudut pandang

bahwa ekonomi adalah perekonomian maka ekonomi membutuhkan kerangka politik dan instrument hukum di dalamnya.

Dengan demikian akan terlihat adanya keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung bahwa sebuah perilaku para pelaku pasar dalam ekonomi dan ekonomi itu sendiri memiliki hal-hal yang erat kaitannya dengan politik. Hal tersebut tampak baik dalam bentuk sistemnya, budaya, kerangka teori, intrumen, lembaga-lembaga kepentingan dan yang lain.

Keterkaitan antara ekonomi dan politik telah jelas dan gamblang karena ekonomi dan politik terutama di dunia kemodernan dan serba canggih saat ini, kedepannya hampir tidak akan ada batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lain. Seperti sistem politik saat ini yang sangat berpengaruh dalam menentukan pola konsep ekonomi yang haru dilaksanakan seperti ambil kasus RRC atau Republik Rakyat China yang secara politik jauh dari kata demokratis secara ekonomi berkebalikan dengan sistem politiknya, teramat kapitalis dan sangat mendukung pasar bebas, atau Singapura yang menganut Liberalisme dalam perekonomian namun secarra politik justru jauh berbeda dari sistem perekonomiannya.

Disini penekanan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi memberikan kontribusi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan menggunakan politiklah sebuah sumber daya bisa didistribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrument-instrumen pemerintahan guna mewujudkan cita-cita tertinggi negara yang bersangkutan.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "oikos" yang berarti aturan dan "nomos" yang berarti rumah tangga. Sedangkan politik berasal dari kata "polis" yang berarti negara atau kota. Berdasarkan maknanya yang secara empiris tidaklah sama, namun dalam perkembangan dunia, kedua kata tersebut menjadi hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Tindakan politik tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan sebuah kebijakan ekonomi tidak terlepas pula dari kepentingan politik. Dengan demikian ekonomi politik

dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi dimana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara-negara.

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani “polis” yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.12

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan.13 Politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldridge, lembaga-lembaga pendidikan dipandang sebagai sitem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik.

Sedangkan politik secara umum adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Pendidikan adalah salah satu bentuk interaksi manusia. Pendidikan adalah suatu tindakan sosial yang pelaksanaanya dimungkinkan melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan-peranan individu di dalamnyalah yang menentukan watak pendidikan di suatu masyarakat.

---

12 Kaelan, *Pendidikan Pancasila,* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal, 95-96.
13 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, (*Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2003), hal. 905.

Jika politik dipahami sebagai “praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai- nilai sosila”. Maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik.

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitanya dengan aspek- aspek kependidikan.

Pendidikan tidak akan terlaksana secara baik bila tidak memandang pada bermacam- macam aspek. Yang dimaksudkan dengan aspek disini adalah sudut pandang, maka sudut pandang tersebut sangat menentukan dalam mempertimbangkan sesuatu. Dalam Pendidikan, memang ada beraneka ragam aspek, di antara aspek yang dominan adalah politik dan sosial.

Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah). Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia (SDM) lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan dalam sebuah negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas SDM yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan pendidikan karena perbaikan pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM. SDM yang berkualitas dapat memberikan *multiplier efect* terhadap pembangunan suatu negara, khsususnya pembangunan bidang ekonomi.

Pendidikan merupakan bentuk investasi SDM yang harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik karena pendidikan

merupakan investasi jangka panjang. Di mana nilai balik dari investasi pendidikan (*return on investment* = ROI) tidak dapat langsung dinikmati oleh investor saat ini, melainkan akan dinikmati di masa yang akan datang. Mengingat modal fisik, tenaga kerja (SDM), dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Maka semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, isu mengenai SDM (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; (1) pentingnya skala ekonomi, dan (2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan investasi SDM (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu SDM dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas. Studi yang dilakukan Dale Jorgenson *et al* (1987) pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-1979 ,misalnya menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (*capital formation*), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi.

Ace Suryadi (2001) menegaskan dari hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai kesadaran sosial politik dan budaya, serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial. Meski modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan

engineering lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi. Ini beralasan karena melihat data AS misalnya, total kombinasi kedua faktor ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi AS pada periode 1948-1979. Namun, sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin-mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat dan berkualitas. Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor modal manusia dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen.

Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas. Buku terakhir William Schweke, *Smart Money*: *Education and Economic Development* (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para *scholars* terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan SDM berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti: pengangguran, kriminalitas, penyalah-gunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan ketarmpilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Politik sangat berpengaruh pada pendidikan dan pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan politik. Pendidikan dan politik, keduanya merupakan elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat disuatu negara. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik disuatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikannya. Jadi antara pendidikan dan politik itu mempunyai hubungan erat dan dinamis. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.

Sebagaimana di maklumi bahwa yang hendak dituju dan capaian dari pendidikan nasional ialah pendidikan yang menuju kepada masyarakat industri yang tidak terlepas dari tujuan politik ideologi bangsa kita sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, Pancasila dan GBHN. Sistem Pendidikan nasional telah merumuskan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan, yaitu : Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945; Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemajuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional; Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Apabila dilihat rumusan tersebut di atas, kelihatannya sudah jelas dan sistematik serta merupakan kerangka acuan bagi politik pendidikan nasional dalam semua aspek pendidikan. Sebenarnya rumusan ini merupakan penjabaran dari politik ideologi nasional ke dalam sektor pendidikan. Pada dasarnya pembangunan dalam sektor pendidikan adalah aspek dari pembangunan politik bangsa, yang tidak lain sebagai konsistensi antara arah politik dengan cetak biru pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut HAR. Tilaar, tujuan nasional sebagai ideologi dasar dari masyarakat dan bangsa kita menjiwai terbentuknya masyarakat industri modern, ideologi pembangunan dan politik pendidikan nasional. Ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi sangat menentukannya, karenanya sangat perlu diketahui oleh masyarakat serta berkembangnya kehidupan demokrasi. Maka demokrasi modern memerlukan rakyat yang selain berpaham nasionalis itu juga berwatak demokrat. Baik paham nasionalisme maupun watak demokrat tidaklah tumbuh sendiri, melainkan harus dididikan melalui proses sosialisasi pendidikan politik.

Ketika ada tuntutan agar pendidikan dituntut berperan lebih banyak dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya khususnya untuk mengentaskan kemiskinan, maka sistem politik disuatu negara melakukaan respon dengan cara yang berbeda-beda. Tidak mungkin pendidikan dapat melakukan peran lebih baik tanpa dukungan politik yang secara konsisten membangun masa depan yang lebih baik dengan cara melakukan reformasi, memilih pilihan prioritas dan terbaik dan menjamin terjadinya keterlibatan debat publik dalam pembiayaan pendidikan.

Delors berpendapat bahwa memilih pendidikan sama halnya dengan memilih jenis masyarakat (*choice of education means choice of*

society). Delors melihat tuntutan peningkatan pendidikan sudah direspon positif oleh sistem poitik di negara-negara berkembang namun mereka berhadapan dengan berbagai keterbatasan sumber daya.14

Definisi ekonomi polotik menurut Balaam merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik.

Sementara Ki Supriyoko memberikan penjelasan tentang politik pendidikan nasional sebagai suatu pendekatan, metoda atau strategi untuk mempengaruhi pihak-pihak yang berkait langsung dan tidak langsung dengan pengambilan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.15 Dengan demikian ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia.

2. Pengertian Budaya

Budaya menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, dan hasil.16 Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.[17]

---

14 Jaques Delors, p.156
15 Lihat kata pengantar Ki Supriyoko dalam buku "*Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional"*, Hlm. xii.
16 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2003, hml 180
17 Badri Yatim,*Sejarah Peradaban Islam,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 1

Budaya berasal dari kata budi-daya yang asal muasalnya dari bahasa sansekerta yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah daya-budi. Secara harfiyah, budaya berarti hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan hasil dari tenaga fikiran tersebut.[18]

Pada dasarnya kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Perlu disadari bahwa manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa dan negara hidup dalam suatu sosial budaya. Maka membutuhkan pewarisan dan pengambangan sosial budaya yang dilakukan melalui pendidikan. Agar pendidikan berjalan dengan baik. Maka membutuhkan filosofis dan ilmiah berbagai sifat normatif dan pedoman pelaksanaannya. Karena pendidikan harus secara funda mental yang berasas filosofis yang menjamin tujuan untuk meningkatkan perkembangan sosial budaya, martabat bangsawan, kewibawaan dan kejayaan negara.

Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam budaya nasional mengupayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan nasional serta melestarikan nilai-nilai luruh budaya bangsa. Merencanakan kegairahan masyarakat untuk menumbuhkan kreaktivtas ke arah pembaharuan dalam usaha pendidikan yang tanpa kepribadian bangsa.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarkat, berbagai macam kekuatan harus dihadapi seperti kekuatan alam dan kekuatan lain. Selain itu manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik secara spritual maupun materil. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalnya manusia danpat mengembangkan kebudyaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung apa kebudayaan sebagai hasil ciptaanya. Kebudayaan memberikan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Dan kebudayaan juga diharapkan dengan pendidikan yang akan mengembangkan dan membangkitkan budaya-

---

18 Sidi Gazalba,*pengantar kebudayaan sebagai Ilmu*, Jakarta : Pustaka Antara, 1963, hlm. 36-38.

budaya dulu, agar dia tidak punah dan terjaga untuk selamanya. Oleh karena itu, dengan adanya filsfat, kita dapat mengetahui tentang hasil karya manusia yang akan menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap alam lingkungannya.

3. **Pandangan Islam Terhadap Ekonomi**

Ilmu filsafat mengajarkan kita pada kesadaraan, kemauan, kemampuan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individual, makhluk sosial sebagai ciptaan Allah SWT. Berdasarkan perkembangan waktu dari masa ke masa, akan terlihat bagaimana pola pikir-pola pikir atau gagasan atau ide manusia terlihat sejak manusia ada di muka bumi ini. Sejarah telah mencatat bahwa manusia pertama di muka bumi ini adalah Adam dan Siti Hawa. Sejak adanya manusia dimuka bumi ini, tentunya seiring pula dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan yang ada antara lain pemahaman tentang adanya kebutuhan hidup secara ekonomis, biologis, dan penerapan ilmu lainnya. Walaupun secara teoritik tentang ilmu pengetahuan belum nampak, namun aplikasi (penerapan) dari ilmu pengetahuan tersebut telah dilakukan. Sebagai contoh mengenai penerapan Ilmu ekonomi yang mengkaji dan melaksanakan aktifitas kelangsungan hidup manusia. Praktek ekonomi sudah dilaksanakan sejak manusia dalam melangsungkan dan mempertahankan hidupnya.

Agama merupakan pernyataan pengharapan manusia dalam dunia yang besar atau jagat raya, karena ada jalan hidup yang benar yang perlu ditemukan. Manusia menjadi penganutnya yang setia terhadap agama karena manurut keyakinannya agama telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya yang tidak mungkin dapat diuji dengan pengalaman maupun oleh akal sepert halnya menguji kebenaran sains dan filsafat karena agama lebih banyak menyangkut perasaan dan keyakinan.

Agama merupakan sesuatu yang ada, karena keberadaanya itulah makanya agama dikatakan pengkajian filsafat. Landasan agama atau tauhid merupakan landasan utama yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk keselamatan di dunia dan menjadi bekal di akhirat nanti. Dapat dikatakan hubungan filsafat Islam dengan agama diantaranya adalah setiap orang diharapkan merenung dalam hikmah untuk menjadi proses pendidikan dan usaha-usaha pendidikan suatu bangsa guna mempersiapkan generasi muda dan warga negara agar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan menjadi warga negara sadar dan insaf tentang hidup serta mempunyai suri-tauladan yang dapat dijadikan perinsip dan keyakinan.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh semua lapisan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Dalam hal ini Islam mengarahkan bagaimana barang-barang ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu menunjukkan pentingnya seseorang untuk dapat bekerja mencari rezeki. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan mengenai pentingnya seseorang harus bekerja. Dalam suatu peristiwa Rasulullah SAW menyalami tangan Sa'ad bin Mua'az yang dirasakannya kasar kemudian ditanya lalu Sa'ad menjawab bahwa dia selalu bekerja memenuhi kebutuhannya dengan mengayunkan kapak. Kemudian Rasulullah menciumi tangan Sa'ad seraya menyatakan bahwa "Inilah dua telapak tangan yang disukai oleh Allah SWT" dan Rasulullah juga bersabda "Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri."

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti keluarga, rumah tangga dan (nomos), atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.19

---

19 Kardiman dan Endang Mulyadi, *Ekonomi, (*Jakarta : Yudhistira, 2003), hal. 7.

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (*utility*) adalah masalah tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan (*utility*) adalah masalah lain. Karena itu kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (*utility*) atau manfaat sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.

Karenanya, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam, misalnya mengharamkan beberapa pemanfaatan harta kekayaan, semisal khamar dan bangkai. Sebagaimana Islam juga mengharamkan pemanfaatan tenaga manusia, seperti dansa (tari-tarian) dan pelacuran. Islam juga mengharamkan menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan, serta mengharamkan menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Sedangkan dari segi tata cara perolehannya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibbah, dan wasiat.

Oleh sebab itu, Islam telah memberikan pandangan (konsep) yang sangat jelas tentang sistem ekonomi. Selain itu Islam telah menjadikan pemanfaatan kekayaan serta dibahas dalam ekonomi. Sementara, secara mutlak Islam tidak menyinggung masalah bagaiamana cara memproduksi kekayaan dan faktor prodok yang bisa menghasilkan kekayaan. Inilah hukum yang hakiki.

Menurut M. Sirozi (2010: 4) selain karena faktor religius bahwa agama Islam sangat menjunjung aktivitas kependidikan, perhatian besar para pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peran lembaga-lembaga pendidikan dalam penyampaian misi-misi politik. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk

menanamkan ideologi negara atau tulang punggung yang menopang kerangka politik. Sjalabi mencatat bahwa Khalifah Al-Makmun memolitisasi majelis *munazharah* dalam rangka menyebarkan paham Mu'tazilah sebagai mazab resmi negara waktu itu melalui peristiwa Inquisisi, yaitu penyelidikan atau interogasi (*Al-Mihna*) terhadap para ulama dan pejabat penting. Kepada mereka ditanyakan apakah Al-Qur'an itu Qadim atau Hadis (Dikutip dalam Rayid, 1994: 16). Melalui inquisisi para ulama, pilar penopang lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara tidak langsung dipaksa menerima paham Mu'tazilah, ideologi resmi penguasa.

4. Politik Ekonomi Islam

Berfilsafat berarti bergulat dengan masalah-masalah dasar manusia dan membantu manusia untuk memecahkannya. Kenyataan ini tentu membawa filsafat pada pertanyaan-pertanyaan tentang tatanan masyarakat secara keseluruhan yang nota bene adalah juga bidang politik. Dan di situ biasanya filsafat muncul sebagai kritik.

Dalam usaha kritisnya ini, filsafat menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan tidak membiarkan segala macam kekuasaan menjadi mapan begitu saja.

Negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi Islam yang mana untuk menyelaraskan dalil-dalil yang ada di dalam nash. Disamping itu negara dituntut untuk membuat suatu aturan-aturan yang belum ada di dalam nash Al Quran, sehingga tidak ada istilah kekosongan hukum. Disamping itu, landasan kebijakan pembangunan ekonomi diantaranya: tauhid, keadilan dan keberlanjutan. Selain itu kebijakan ekonomi menurut Islam harus ditopang oleh empat hal, diantaranya: Tanggung jawab sosial, kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syari'ah, pengakuan multiownership, dan etos kerja yang tinggi.

Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam sangat indah yakni: menghidupkan faktor manusia, pengurangan pemusatan kekayaan, restrukturisasi ekonomi publik, restrukturisasi keuangan, dan perubahan struktural.

Secara terminologis politik ekonomi adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan hidup (*basic needs*) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup ditengah komunitas manusia.

Dalam hal ini politik ekonomi Islam tidak hanya berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat saja dalam suatu negara dengan mengabaikan kemungkinan terjamin tidaknya kebutuhan hidup tiap-tiap individu. Politik ekonomi Islam juga tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu semata tanpa kendali tanpa memperhatikan terjamin tidaknya kehidupan tiap individu lainnya.

Sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar dapat terwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dsb.

Beberapa strategi yang diterapkan imperialis modern dalam menghalangi berkembangnya sistem kehidupan Islam misalnya: budaya non-Islami. Dengan menggunakan berbagai macam bentuk pertunjukan dan hiburan serta ditunjang dengan jaringan informasi global menyebarkan berbagai budaya yang tidak Islami seperti permisivisme, free sex, alkoholisme, sadisme, hedonistik, konsumtif dsb. Sinergi

antara budaya sekuler dan kekuatan kapitalisme menjadikan pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya menjadi suatu bagian yang masuk dalam ruang kehidupan masyarakat melalui tayangan dalam televisi dan media massa. Budaya pragmatis dan serba instant melahirkan generasi yang hanya ingin menikmati hidup serba enak tanpa melalui kerja keras serta tidak mempunyai sensitiftas terhadap persoalan sosial jangka panjang.

Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Islam juga memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Secara bersamaan Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.

Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang menikmati kehidupan tersebut. Islam telah mensyariatkan hukum-hukum ekonomi pada tiap pribadi. Dengan itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, baik sandang, pangan, papan, jasmani maupun rohani.

Islam mewajibkan bekerja tiap manusia yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut "adalah fardhu".

Allah SWT Berfirman:

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Al-Mulk:15)

Rasulullah saw juga bersabda: "*Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri.*

5. Kesimpulan

Ekonomi politik adalah membahas hubungan politik dan ekonomi dengan penekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pandangan Islam terhadap ekonomi sangat jelas, terutama menganjurkan seseorang untuk mengais rezeki seperti yang terdapat dalam al-quran dan al-hadits. Islam pun mengajarkan bagaimana barang-barang ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Politik Ekonomi Islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan hidup pokok (basic needs) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup ditengah komunitas manusia.

Agama dapat dilihat sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang dimiliki oleh manusia untuk menangani masalah-masalah penting dan aspek-aspek alam semesta yang tidak dapat dikendalikannya dengan teknologi maupun sistem organisasi sosial yang dikenalnya.

Budaya mempunyai peranan penting dalam membentuk pola berpikir dan pola pergaulan dalam masyarakat, yang berarti juga membentuk kepribadian dan pola pikir masyarakat tertentu. Di dalam

pengembangan kepribadian diperlukan kebudayaan dan seterusnya kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian-kepribadian tersebut.

Berdasarkan perkembangan waktu dari masa ke masa, akan terlihat bagaimana pola pikir-pola pikir atau gagasan atau ide manusia terlihat sejak manusia ada di muka bumi ini. antara lain pemahaman tentang adanya kebutuhan hidup secara ekonomis, biologis, dan penerapan ilmu lainnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia mendayagunakan sumber daya alam (SDA) lebih efektif dan efisien, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 2.

Amnur, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional.*(Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007). Hal.3.

Lihat kata pengantar Ki Supriyoko dalam buku "*Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*", hal. xii.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2003, ha.l 905.

Kardiman dan Endang Mulyadi, *Ekonomi*, Jakarta : Yudhistira, 2003, hal. 7

BAGIAN 3

STRUKTUR, SISTIM SOSIAL, BUDAYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM ERA RASULULLAH SAW DAN SAHABAT

A. Era Rasulullah

Merujuk pada Al Qur'an, Islam tidak menganjurkan pada pemeluknya untuk membentuk negara, tetapi Islam mengajarkan bagaimana membentuk masyarakat atau umat (*civil society*) dalam merumuskan tatanan masyarakat yang ideal dan beradab. Bentuk pemerintahan dan sistem politik Islam adalah merupakan konsekuensi sekunder dari *civil society*.

Zaman sebelum Islam datang, selain masyarakatnya yang buta huruf, mereka terkungkung dalam paradigma kesukuan dan sangat sulit untuk memahami suku yang lain. Setiap suku mempunyai berhala sendiri dan seluruh kehidupannya dikendalikan oleh tahayul yang dikembangkan oleh pandangan dunia kesukuannya masing-masing. Posisi wanita tidak dihargai dan menurut tatanan masyarakat waktu itu

dianggap sebagai beban hidup. Banyak sekali kasus tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Dalam tataran ekonomi hanya sekali kesenjangan yang disebabkan oleh sistem oligarkhi perdagangan. Banyak sekali budak yang dipekerjakan tanpa upah, anak-anak yatim, janda dan fakir miskin dalam percaturan sosial terpinggirkan karena tidak adanya akses ekonomi.[20]

Dalam tatanan masyarakat sipil, hal yang paling fundamental mempengaruhi perubahan sosial adalah faktor ekonomi. Ada satu teks penting yang terdapat dalam "muqaddimah" yang menguraikan pentingnya aspek ekonomi dalam kehidupan manusia dan perkembangannya. Teks tersebut menyatakan bahwa "perbedaan keadaan berbagai generasi timbul karena perbedaan pendapatan dan penghidupan mereka. Tolong menolong yang dilakukan masyarakat dimaksudkan untuk menghasilkan keperluan hidup" Dari teks diatas tampak Ibnu Khaldun berpendapat bahwa aspek ekonomi dan kegiatan berproduksi yang menentukan watak kehidupan sosial.[21] Faktor ini pula yang mempengaruhi kelahiran agama Islam dalam masyarakat arab, bahkan sistem politik yang lahir dalam Islam hanyalah cerminan dari kondisi ekonomi waktu itu. Masyarakat makkah waktu itu dirundung ketegangan karena harta benda hanya terkonsentrasi pada beberapa orang dan tidak adanya keadilan distribusi ekonomi.

Berkat munculnya kelas elit yang berpengaruh, seperti: Abu Jahal, Abu lahab, Abu Syufyan, dan lain-lain, yang merupakan kelas borjuis merkantilis di Makkah, benteng kesukuan itu akhirnya pecah dan hubungan produksi antar suku berganti menjadi sistem ekonomi merkantilis yang didasarkan atas tukar-menukar barang kemudian diikuti oleh ekonomi pastoral yang telah disebutkan dalam Al Qur'an.[22]

20Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hal 42-43.

21.Zainab Al Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hal 119.

22. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 92.

Agama dan masyarakat Arabia abad ke tujuh mencerminkan realitas-realitas kesukuan semenanjung ini. Suku-suku Badui mengikuti gaya hidup pastoral dan nomadic dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencari air dan padang rumput bagi ternak-ternak, domba dan unta mereka. Bentang daratan ini juga ditandai dengan kota-kota dan desa-desa oasis. Diantara yang terkemuka adalah Makkah, pusat perdagangan dan jual beli, serta Yatsrib (Madinah) sebuah perkampungan pertanian yang penting. Sumber-sumber kehidupan utama disini adalah penggembalaan ternak, pertanian, perdagangan dan penyerobotan.

Peperangan antar suku adalah kegiatan yang sudah berumur lama yang diatur dengan tata-cara dan aturan main yang jelas. Misalnya, penyerobotan dianggap illegal selama empat bulan suci untuk haji. Tujuan penyerobotan adalah untuk merampas ternak suku-suku Badui musuhnya dengan korban minimum. Tujuan akhirnya adalah untuk memperlemah, dan pada akhirnya untuk menyerap suku-suku mereka dengan kemerosotannya dalam status "dibawah kekuasaan" atau "klien".[23]

Masyarakat kesukuan Arabia dengan Badui serta etos polities menjadi konteks bagi lahirnya Islam. Sama pentingnya, periode ini ditandai dengan ketegangan-ketegangan dan persoalan yang menyertai perubahan dalam sebuah masyarakat tradisional. Sebab ini adalah periode ketika kota-kota seperti Makkah dan Madinah mengalami kemakmuran dan mengalihkan banyak orang dari kehidupan nomadic ke kehidupan menetap.

Munculnya Makkah sebagai pusat dagang mempercepat awal orde politik, sosial dan ekonomi yang baru. Kekayaan baru, munculnya oligarkhi dagang baru dalam suku Quraisy, menajamnya pemisahan antar kelas sosial, melebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin

---

23. John L. Esposito, *Islam Warna Warni : Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus* (Jakarta : Paramadina, 2004), hal. 7.

mengguncang sistem nilai kesukuan Arab dan keamanan sosial sebagai pandangan hidupnya.[24]

Kondisi obyektif masyarakat yang eksploitatif itulah yang menjadi titik tumpu pergerakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Muhammad lahir di Makkah pada tahun 570 M, sebuah kota dagang dan bisnis penting yang terletak diantara bukit-bukit Arab pada rute perdagangan dari Yaman ke Syria dan dari Abessinia ke Iraq. Sebagian besar penduduknya termasuk suku Quraisy yang terbagi dalam puluhan suku. Pada tahun 610 M, ketika Muhammad berusia 40 tahun, Beliau mulai menerima Wahyu. Beliau diutus untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan berhala dan ketamakan, dan menganjurkan kaumnya untuk menyembah Allah. Pada tahun 622, karena perlawanan terhadap dakwahnya yang terus meningkat dan ancaman terhadap hidupnya, Beliau hijrah ke Madinah dimana Beliau sudah banyak pengikut. Dua pertiga populasi Madinah berasal dari dua suku Arab, Aus dan Khazraj, yang gabungan dari keduanya terdiri dari delapan suku. Dengan tambahan ada suku Yahudi.

Sebagian besar populasi Arab menyambut kedatangan Nabi Muhammad, melihat beliau sebagai pemimpin yang bisa menyelesaikan perpecahan dalam masyarakat Madinah. Meskipun orang-orang muslim yang berhijrah bersamanya berasal dari beberapa suku yang berbeda, orang Madinah melihat mereka berasal dari suku yang sama dengan Nabi menjadi pemimpinnya. Posisi beliau kemudian menjadi pemimpin militer. Sesudah pertempuran kecil dengan orang Makkah, pada perang Badar tahun 624, Uhud tahun 625, dan Khandaq tahun 627 beliau berhasil menaklukkan Makkah tahun 630. Pada akhir tahun yang sama beliau memimpin ekspedisi ke Tabuk dalam perjalanan beliau menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Yahudi dan Kristen sebagai

24. Arnold Toynbee, *Sejarah Umat Manusia : Uraian Analitis, Kronologis, Naratif dan Komparatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 477.

balasan atas pembayaran pajak perkapita yang dikenal sebagai Jizyah, Tahun 632 M Nabi Muhammad wafat.[25]

Perlu diketahui bersama, sisi gelap dalam pola pendidikan yang dirumuskan oleh Amerika dan Eropa yaitu tidak adanya muatan nilai ruhiyah, dan lebih mengedepankan logika materialisme serta memisahkan antara agama dengan kehidupan yang dalam hal ini sering disebut paham Sekulerisme. Implikasi yang bisa dirasakan namun jarang disadari adalah adanya degradasi moral yang dialami oleh anak bangsa. Banyak kasus buruk dunia pendidikan yang mencuat di permukaan dimuat oleh beberapa media massa cukup meresahkan semua pihak yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsa yang lebih baik.

Mempelajari Sejarah Pendidikan Islam amat penting, terutama bagi pelajar-pelajar agama Islam dan pemimpin-pemimpin Islam. Dengan mempelajari Sejarah Pendidikan Islam kita dapat mengetahui sebab kemajuan dan kemunduran Islam baik dari cara didikannya maupun cara ajarannya. Khusunya pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mengetahui sejarah tersebut guna menumbuh kembangkan wawasan generasi mendatang di dalam pengetahuan sejarah tersebut. Sejarah Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah.

Pada periode Makkah, Nabi Muhammad lebih menitik beratkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah dan pada peroide di Madinah Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial politik. Disinilah pendidikan Islam berkembang pesat.

Sebut saja tokoh Ibnu Sina sebagai sosok yang dikenal peletak dasar ilmu kedokteran dunia namun beliau juga faqih ad-diin terutama dalam hal ushul fiqh. Masih ada tokoh-tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains dan

---

25. Niel Robinson, *Pengantar Islam Koprehensif* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) hal. 30-33.

teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun (bapak ekonomi), Ibnu Khawarizm (bapak matematika), Ibnu Batutah (bapak geografi), Al-Khazini dan Al-Biruni (Bapak Fisika), Al-Battani (Bapak Astronomi), Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia), Ibnu Al-Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Mereka dikenal tidak sekadar paham terhadap sains dan teknologi namun diakui kepakarannya di bidang ilmu Diniyyah.

Sejarah mencatat bahwa kota hijrah nabi adalah sebuah lingkungan oase yang subur dan dihuni oleh orang-orang pagan dari suku utama Aus dan Khazraj, dan juga orang-orang yahudi dari suku-suku utama bani Nadzir, Bani Qoinuqo, Bani Quraizhah. Kota ini awalnya adalah bernama Yatsrib lalu diubah oleh nabi menjadi Madinah. Yang sangat menarik perhatian dari sudut pemikiran politik ialah tindakan nabi mengganti kota ini menjadi madinah. Tindakan nabi ini bukanlah kebetulan. Dibaliknya terkandung makna yang luas dan mendalam yang dalam kontrasnya terhadap pola kehidupan politik jazirah Arabia dan sekitarnya adalah fundamental dan revolusioner. Secara istilah perkataan Madinah berarti kota. Perkataan itu tidak jauh dari asal makna kebahasaan atau etimologisnya yang dapat ditelusuri dari asal makna semitiknya yaitu "d-y-n" dengan makna dasar "patuh" dalam tafsir dana-yadinu. Dari kata itu pula perkataan agama adalah "din" suatu perkataan yang mengacu pada sikap patuh. Sebab system atau rangkaian ajaran yang disebut agama itu berintikan tuntutan kepatuhan pada sesuatu yang dipandang mutlak.[26]

Madinah yang digunakan oleh Nabi untuk menukar nama kota hijrah beliau itu kita menangkapnya sebagai isyarat langsung bahwa ditempat baru itu hendak mewujudkan suatu masyarakat yang teratur sebagaimana sebuah masyarakat. Maka sebuah konsep Madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh pada peraturan atau hukum yang berlaku. Madinah juga mempunyai makna "kota", dan bentuk masyarakat ini sangat mirip dengan bentuk masyarakat Yunani yang

26. Nurkholis Madjid, Jurnal Paramadina, vol.1, no 1, juli-desember 1998, hal. 51.

disebut dengan Polis dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam politik dan setara didepan hukum.

Kalau menganalisis sejarah, sistem pemerintahan yang dibentuk oleh nabi Muhammad adalah bercorak sistem Teodemokratis, disatu sisi tatanan masyarakat harus berdasarkan pada hukum-hukum yang mana hukum tersebut berdasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan dalam menyikapi setiap peristiwa waktu itu. Di sisi lain bentuk pemerintahan dan tatanan sosial dirumuskan lewat proses musyawarah yang dilakukan secara bersama suku-suku yang ada dalam masyarakat Madinah. Bila dikontekskan dengan sistem pemerintahan sekarang, bentuk struktur tatanan pemerintahan terdiri dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Eksekutif dimana kepala pemerintahan dipegang oleh Nabi Muhammad, begitupun dalam mahkamah konstitusi dan hukum semua ditentukan oleh Nabi sebagai pengambil kebijakan selain dalam masalah menentukan bentuk tatanan masyarakat yang menyangkut pluralitas warga Negara Madinah. Dalam ranah legislatif, setiap suku yang ada di Madinah mempunyai persamaan hak dalam menyampaikan pendapat dalam menentukan tatanan sosial masyarakat seperti dalam menciptakan konstitusi Piagam Madinah.

Dalam membiayai pemerintahan nabi mengambil zakat (zakat fitrah dan zakat maal) untuk umat muslim, serta mengambil Jizyah dari non muslim yang ada dalam masyarakat Madinah. Selain lewat militer.

Di Madinah, korban pertama dari politik militer Islam adalah tiga kabilah Yahudi, yaitu Bani Qoinuqo, Bani Nadzir dan Bani Quraidzah, yang sebelumnya bertekad menghancurkan Muhammad dan yang masing-masing bersekutu dengan Makkah. Mereka mempunyai pasukan yang kuat dan jelas menjadi ancaman bagi umat Islam karena wilayah mereka memungkinkan mereka bergabung dengan pasukan pengepung dari Makkah atau menyerang ummat dari belakang.

Ketika bani Qoinuqo melancarkan pemberontakan yang gagal melawan Nabi tahun 625 M, mereka diusir dari Madinah, sesuai dengan adat Arab. Muhammad mencoba menenangkan Bani Nadzir dan

membuat perjanjian khusus dengan mereka. Akan tetapi ketika Nabi mengetahui rencana mereka membunuh dirinya, mereka juga diusir dan bergabung dengan pemukiman Yahudi Khaibar dan menggalang dukungan bagi Abu Syufyan dari suku-suku Arab utara. Bani Nadzir terbukti makin berbahaya setelah berada diluar Madinah. Maka ketika Bani Quraidzah memihak Makkah dalam perang Khandaq, ketika ummat Islam berada diambang kehancuran, Muhammad tidak mau berbelas kasihan lagi. Sekitar 700 laki-laki bani Quraidzah dibunuh dan para wanita serta anak-anak dijual dan dijadikan budak. [27]

Konsolidasi pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi juga menggunakan diplomasi dan lewat perkawinan politik. Banyaknya Istri Muhammad sering kali dianggap cabul oleh Barat. Akan tetapi keliru (salah menafsirka) jika membayangkan Nabi larut dalam kesenangan seksual seperti sebagian penguasa Islam dikemudian hari. Di Makkah, Muhammad tetap bermonogami, hanya menikah dengan Khadijah, meskipun poligami sudah lumrah di Arabia. Khadijah lebih tua dari Muhammad, tetapi melahirkan enam orang anak Muhammad dan hanya empat perempuan yang masih hidup.

Saat beliau membangun suku super barunya, beliau sangat ingin menjalin hubungan perkawinan dengan sahabat terdekat untuk mempererat hubungan mereka. Istri yang sangat disayangi oleh Nabi adalah Aisyah, putri Abu Bakar, dan Nabi juga menikahi Hafsah, putri Umar bin Khattab. Dia juga menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib. Sebagian istrinya adalah wanita yang cukup berumur, yang tidak mempunyai pelindung atau mempunyai hubungan dengan kepala suku yang menjadi sekutu-sekutu ummat. Nabi sering mengajak salah satu Istrinya dalam ekspedisi-ekspedisi, konsultasi dan mempertimbangkan saran mereka dengan serius. Dalam satu kesempatan, istrinya yang paling pandai, Ummu Salamah, membantunya mencegah pembangkangan.[28]

---

27. Karen Armstrong, *Sejarah Islam Singkat* (Yogyakarta: Elbanin Media, 2008), hal 28-29.
28. Karen Armstrong, *Op.Cit.*, hal 19-20.

Sebagai pusat pemerintahan Nabi menggunakan masjid sebagai ruang publik. Pada awalnya masjid adalah bangunan yang mengekspresikan cita-cita awal Islam. Batang-batang pohon yang menyangga atap, sebuah batu menandai kiblat dan Nabi berdiri di salah satu tiang penyangga untuk berkhotbah. Juga terdapat sebuah halaman tempat umat Islam bertemu dan membicarakan semua persoalan umat baik dalam tataran politik, sosial, militer, dan agama. Muhammad dan istri-istrinya tinggal dibilik-bilik kecil (rumah sangat-sangat sederhana). Tidak seperti gereja Kristen yang terpisah dari aktivitas keduniaan dan hanya digunakan untuk peribadatan, tidak ada kegiatan yang dikecualikan dari masjid. Dalam visi Al Qur'an tidak ada dikotomi antara yang sakral dan yang profan, antara agama, politik, seksualitas dan ibadah. Seluruh kehidupan berpotensi menjadi suci dan harus dibawa kepada kesucian. Tujuannya adalah tauhid (mengesakan), integrasi seluruh kehidupan dalam satu masyarakat yang akan memberikan perasaan dekat dengan yang satu, yaitu Tuhan. [29]

1. Gerakan pemberdayaan ekonomi

Bagaimana Nabi Muhammad mempraktikkan Demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya? Sudah sering diungkapkan bahwa Muhammad akan selaul berpedoman pada Al Qur'an dalam memutuskan sesuatu. Akan tetapi apabila ada perkara yang belum diatur dalam Al Qur'an tidak jarang Nabi mengajak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan konteks negara modern yang jauh lebih kompleks seperti sekarang, proses musyawarah yang dijalankan pada zaman Nabi sebenarnya secara substantif tidak berbeda dengan dengan apa yang diperlihatkan dengan proses politik sekarang, yaitu apa yang kita kenal dengan *representative democracy*, karena kita juga memahami bahwa Nabi dalam melakukan musyawarah tidak melibatkan segenap warga masyarakat yang telah memiliki "*political franchise*", akan tetapi musyawarah yang melibatkan para

29 Karen Armstrong, *Op.Cit.,* hal. 18.

sahabat yang tentu saja sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.[30]

Islam lahir pada awal kelahirannya bukan hanya kritik terhadap relijiusitas masyarakat arab yang menyembah berhala pada waktu itu tetapi merupakan gerakan ekonomi. Islam dengan Al Qur'an sangat menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas yang secara umum melingkupi kota Makkah sebagai tempat asal mula Islam. Bagi orang yang memperhatikan Al Qur'an secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran Islam yang sangat pokok. Al Quran mengajarkan pada umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan dan dalam Al Quran keadilan merupakan bagian integral dari ketakwaan. Takwa dalam Islam bukan Cuma dalam tataran ritualistik, namun sangat terkait erat dengan keadilan ekonomi dan sosial.

Al Quran bukan saja menentang penimbunan harta (dalam arti tidak disumbangkan untuk fakir miskin, janda-janda, dan anak yatim) namun juga menentang kemewahan dan tindakan yang menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan diri sementara banyak sekali orang yang miskin dan membutuhkan. Kedua tindakan tersebut adalah kejahatan dan merusak keseimbangan sosial.

Maka keadilan didalam Al Quran bukan hanya berarti norma hukum namun juga keadilan distribusi pendapatan. Keseimbangan sosial hanya dapat dijaga bila kekayaan sosial dimanfaatkan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penumpukan kekayaan dan penggunaan yang tidak sebagaimana mestinya tidak akan dapat menjaga keseimbangan tersebut dan akan berujung kehancuran.

Jika orang mengkaji dan mendalami Al Quran sebagai sumber ajaran Islam. Ia akan banyak sekali menjumpai ayat tentang konsep keadilan distributif tersebut. Misalnya ada ayat yang berbunyi "dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakan" (Al Quran 23:84). Ungkapan ini adalah penentangan secara langsung terhadap

30. Bernard Lewis, *Islam Liberalisme Demokrasi: membangun sinergi warisan sejarah, doktrin dan konteks global* (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 123.

sistem kapitalisme karena yang menjadi pemilik sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat produksi. [31]

Nabi sangat memperhatikan berbagai malpraktek dalam perdagangan dan perniagaan. Satu penolakan yang tegas adalah penolakan terhadap spekulasi. Sebenarnya sangat banyak masalah dalam masyarakat industrial atau niaga yang berasal dari praktek-praktek spekulasi yang membuka jalan untuk meraih keuntungan dengan cepat. Semua praktek ini ditentang tegas dalam Al Quran. Dilarang menjual buah yang belum masak dan belum dipetik karena tidak diketahui jumlahnya, juga tidak boleh menjual bayi hewan dalam kandungan, tidak boleh mengurangi dan melebihkan takaran dalam jual beli, inilah prinsip-prinsip dalam perdagangan yang diatur dalam Islam.

Konsep tauhid dalam Islam bukan hanya berimplikasi pada tataran teologis tentang pengesaan Tuhan dengan segala tata cara ritualnya, tetapi juga berimplikasi pada tatanan masyarakat dan secara otomatis berpengaruh pada sistem ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tujuannya adalah untuk saling mengenal, dan tidak ada perbedaan stratifikasi sosial dalam Islam kecuali dalam hal ketakwaan. Islam menginginkan bentuk atau sistem ekonomi sosialistis yang tidak ada kepemilikan alat produksi mutlak oleh seseorang.

Sejarah Islam mencatat bahwa pada waktu kaum Imigran (muhajirin) Makkah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor lalu membagikan harta benda mereka pada kaum Muhajirin yang tidak mempunya harta. Selain itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang kepemilikan harta benda dan melarang terhadap akumulasi kekayaan. Misalnya dalam surat al Maun dan al humazah ayat 1-4. Masyarakat kapitalis barat sekarang yang didasarkan pada struktur yang menindas dan eksploitatif hidup makmur dengan merampas

---

31. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 57-61.

sumber-sumber ekonomi negara dunia ketiga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan standar hidup yang tinggi. Konsumerisme barat adalah pangkal dari ketimpangan ekonomi dunia. Sebaliknya sistem ekonomi sosialis bias menghambat konsumerisme. Sistem ekonomi sosialis ini menekankan pada produksi barang-barang untuk mencukupi kebutuhan pokok bukan produks untuk mencukupi kebutuhan barang-barang mewah.

Semua praktek yang mengarah pada eksploitasi sesama manusia termasuk industri dan perniagaan yang tidak adil dianggap sebagai riba. Kritik Islam ini juga mengarah pada sistem dalam masyarakat industrial modern, semua praktek monopoli, kartel dan pengawasan multi nasional terhadap pasar harus diperlakukan sebagai riba. Semua ini jelas bagi orang yang paham ekonomi industrial bahwa penghapusan bunga atau memberlakukan Bank bebas bunga tidak akan menyelesaikan substansi persoalan monopoli atau ekonomi yang dikontrol oleh perusahaan multi nasional. Sistem ekonomi yang seperti ini hanya akan mengakibatkan kerugian dalam tataran masyarakat. [32]

Dakwah Nabi pada waktu periode Makkah adalah merupakan kritik terhadap sistem merkantilisme dan akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh elit-elit Quraisy sehingga mengakibatkan hancurnya kode etik kesukuan yang berasaskan solidaritas dan egalitarianism berganti menjadi sistem untung rugi dan eksploitasi.

3. Pendidikan ekonomi

Pendidikan Islam pada masa Rasulullah dapat dibedakan menjadi dua periode yaitu, periode Makkah dan Madinah.

32. Asghar Ali Engineer, *Op.Cit.,* hal. 68.

a. **Masa Rasulullah di Makkah**

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di Makkah pada tahun 610 M. Dalam wahyu itu termaktub ayat al-qur'an yang artinya: "Bacalah (ya Muhammad) dengan nama tuhanmu yang telah menjadikan (semesta alam). Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan tuhanmu maha pemurah. Yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya (Q.S. Al- Alaq: 1-5).

Kemudian disusul oleh wahyu yang kedua termaktub ayat al-qur'an yang artinya: Hai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah. dan perbuatan dosa tinggalkanlah. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah (Q.S. Al-Mudatsir: 1-7).

Dengan turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah, supaya bangun melemparkan kain selimut dan menyingsingkan lengan baju untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia, sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Kemudian kedua wahyu itu diikuti oleh wahyu-wahyu yang lain. Semuanya itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi, mula-mula kepada karib kerabatnya dan teman sejawatnya dengan sembunyi-sembunyi.

Setelah banyak orang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al- Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama kali dalam sejarah pendidian. Disanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu (ayat-ayat) alqur'an kepada para pengikutnya serta Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan

dengan agama Islam. Bahkan disanalah Nabi beribadah (shalat) bersama sahabat-sahabatnya.[33]

Lalu turunlah wahyu untuk menyuruh kepada Nabi, supaya menyiarkan agama Islam kepada seluruh penduduk jazirah Arab dengan terang-terangan. Nabi melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Banyak tantangan dan penderitaan yang diterima Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nabi tetap melakukan penyiaran Islam dan mendidik sahabat-sahabatnya dengan pendidikan Islam. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Makkah, Nabi Muhammad juga mengajarkan alqur'an karena al-qur'an merupakan inti sari dan sumber pokok ajaran Islam. Disamping itu Nabi Muhamad SAW, mengajarkan tauhid kepada umatnya.[34]

Intinya pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Makkah memperioritaskan pendidikan keagamaan dan akhlak serta menganjurkan kepada manusia, supaya mempergunakan akal pikirannya memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta seagai anjuran pendidikan 'akliyah dan ilmiyah.

Mahmud Yunus dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam*, menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah meliputi:

1. Pendidikan Keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata jangan dipersekutukan dengan nama berhala.
2. Pendidikan Akliyah dan Ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.
3. Pendidikan Akhlak dan Budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.
4. Pendidikan Jasmani atau Kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan dan tempat kediaman.[35]

---

33 Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1992), hal. 6.
34 Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 28.
35 Zuharini, dkk, *Op.Cit.,* hal. 27.

b. **Masa Rasulullah di Madinah**

Berbeda dengan periode di Makkah, pada periode Madinah Islam menjadi motivator sekaligus sebuah kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala Negara.

Cara atau metode Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut:

1. **Menanamkan rasa kesatuan sosial dan politik.**

Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern (ke dalam), dan ke luar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya (sebagai satu kesatuan politik). Dasar-dasar tersebut adalah:

a. Nabi Muhammad Saw mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antar suku, dengan jalan mengikat tali persaudaraan diantara mereka. Nabi mempersaudarakan dua-dua orang, mula-mula diantara sesama Muhajirin, kemudian diantara Muhajirin dan Anshar. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin.36 [6]

b. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum Muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan masing-masing seperti waktu di Makkah.

c. Untuk menjalin kerjasama dan saling tolong menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunlah syari'at zakat dan puasa, yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab sosial, baik secara materil maupun moral.

---

36 Mahmud Yunus, *Op.Cit., hal.26*

d. Suatu kebijaksanaan (politik) yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah, adalah disyari'atkannya media komunikasi berdasarkan wahyu, yaitu shalat Juma't yang dilaksanakan secara berjama'ah dan diawali dengan suara adzan. Dengan shalat Jum'at tersebut hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk secara langsung mendengar khutbah dari Nabi Muhammad SAW dan shalat berjama'ah Jum'at.

Rasa harga diri dan kebanggaan sosial tersebut lebih mendalam lagi dirasakan, setelah Nabi Muhammad SAW menapat wahyu dari Allah untuk memindahkan arah kiblat dalam shalat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram Makkah, karena dengan demikian mereka merasa sebagai umat yang memiliki identitas.[37]

Setelah Nabi Muhammad mempersatukan kaum muslimin, sehingga menjadi bersaudara, lalu Nabi mengadakan perjanjian politik dengan kaum Yahudi Madinah. Dalam perjanjian itu ditegaskan, bahwa kaum Yahudi bersahabat dengan kaum muslimin, tolong-menolong, bantu-membantu, terutama bila ada serangan musuh terhadap Madinah. Mereka harus memperhatikan negeri bersama-sama kaum Muslimin, disamping itu kaum Yahudi merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadat menurut kepercayaannya. Inilah salah satu perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.[38]

2. Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan.

Materi pendidikan sosial dan kewarnegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah, yang dalam prakteknya diperinci lebih lanjut dan di sempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah.

Tujuan pembinaan adalah agar secara berangsur-angsur, pokok-pokok pikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi lebih luas, baik dalam kehidupan bangsa Arab

37 Zuharini, dkk, *Op.Cit.,* hal. 37.
38 Mahmud Yunus, *Op. Cit.,* hal. 16.

maupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia atau disebut berpikir jauh kedepan.

3. Pendidikan anak dalam Islam

Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad saw dan generasi muda muslimlah yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Oleh karenanya banyak peringatan-peringatan dalam Al-qur'an berkaitan dengan itu. Diantara peringatan-peringatan tersebut antara lain: Pada surat At-Tahrim ayat 6 terdapat peringatan agar kita menjaga diri dan anggota keluarga (termasuk anak-anak) dari kehancuran (api neraka). Pada surat An-Nisa ayat 9, terdapat agar jangan meninggalkan anak dan keturunan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya menghadapi tantangan hidup.

Pada surat Al-Furqan ayat 74, Allah SWT memperingatkan bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan antara lain adalah orang-orang yang berdo'a dan memohon kepada Allah SWT, agar dikaruniai keluarga dan anak keturunan yang menyenangkan hati. [39]

Adapun garis-garis besar materi pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surat Luqman ayat 13-19 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Tauhid
2. Pendidikan Shalat
3. Pendidikan adab sopan dan santun dalam bermasyarakat
4. Pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga
5. Pendidikan kepribadian. [40]
6. Pendidikan kesehatan
7. Pendidikan akhlak.[41]

---

39 Zuharini, dkk, *Op.Cit.,* hal. 55.
40 Zuharini, dkk, *Op.Cit,* hal. 58.
41 Mahmud Yunus, *Op.Cit*., hal. 18.

c. **Ciri pendidikan Makkah dan Madinah:**

Periode kota Makkah: Spesialisasi pada pembinaan dan pendidikan ketauhidan, penekanannya dititik beratkan kepada menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim, agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan **Periode Madinah:** Spesialisasi dan ciri utamanya adalah pendidikan sosial dan politik. Yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran, merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut.

d. Kurikulum Pendidikan Rasulullah SAW

Mengindentifikasikan kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah terasa sulit, sebab Rasul mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa di batasi dinding kelas. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan Rasulullah menyampaikan ajarannya dimana saja seperti di rumah, di masjid, di jalan, dan di tempat-tempat lainnya.

Sistem pendidikan Islam lebih bertumpu kepada Nabi, sebab selain Nabi tidak ada yang mempunyai otoritas untuk menentukan materi-materi pendidikan Islam, dapat dibedakan menjadi dua periode:

1. **Makkah:** Materi yang diajarkan hanya berkisar pada ayat-ayat Makiyyah sejumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadits. Dan materi yang diajarkan menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitikberatkan pada keimanan, ibadah dan akhlak.
2. **Madinah**: Yaitu, upaya pendidikan dengan pertama-tama membangun lembaga masjid, melalui masjid ini Nabi memberikan pendidikan Islam. Setelah itu, materi pendidikan Islam yang

diajarkan berkisar pada bidang keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan jasmanai dan pengetahuan kemasyarakatan.

3. Metode kurikulum yang dikembangkan oleh Nabi adalah:

   a. Bidang keimanan: melalui tanya jawab dengan penghayatan yang mendalam dan di dukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah.

   b. Bidang ibadah: disampaikan dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah didikuti masyarakat.

   c. Bidang akhlak: Nabi menitikberatkan pada metode peneladanan. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan dalam keseharian.[42]

   d. Kebijakan dan politik Rasulullah Dalam Pendidikan

      Untuk melaksanakan fungsi utamanya sebagai pendidik (guru umat), Rasulullah telah melakukan serangkaian kebijakan yang amat strategis serta sesuai dengan situasi dan kondisi (kedinamisan politik). Proses pendidikan pada zaman Rasulullah berada di Makkah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal yang demikian belum di mungkinkan, karena pada saat itu Nabi Muhammmad belum berperan sebagai pemimipin atau kepala Negara, bahkan beliau dan para pengikutnya berada dalam bayang-bayang ancaman pembunuhan dari kaum kafir quraisy. Selama di Makkah pendidikan berlangsung dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi. Diantaranya yang terkenal adalah rumah Al- Arqam. Langkah yang bijak dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahap awal Islam ini adalah melarang para pengikutnya untuk menampakkan keislamannya dalam berbagai kesempatan. Tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dalam mendidik mereka.

---

42 Armai Arief, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), hal. 135-136.

Setelah masyarakat islam terbentuk di Madinah barulah, pendidikan Islam dapat berjalan dengan leluasa dan terbuka secara umum dan kebijakan politik yang telah dilakukan Nabi Muhammmad ketika di Madinah adalah:

a. Membangun masjid di Madinah. Masjid inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah.

b. Mempersatukan berbagai potensi yang semula saling berserakan bahkan saling bermusuhan. Langkah ini dituangkan dalam dokumen yang lebih popular disebut piagam Madinah. Dengan adanya piagam tersebut terwujudlah keadaan masyarakat yang tenang, harmonis dan damai.[43] [13]

B. Era Khulafa Al Rasyidin

Tahun-tahun pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan perjuangan berat dan terus menerus dilakukan antara hak yang mereka bawa dan dakwahkan kebatilan yang mereka perangi dan musuhi. Pada zaman khulafa al-Rasyidin seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu terulang kembali. Pendidikan Islam masih tetap memantulkan Al-Qur'an dan Sunnah di ibu kota khilafah di Makkah, di Madinah dan di berbagai negeri lain yang ditaklukan oleh orang-orang Islam.[44]

Berikut penguraian tentang pendidikan Islam pada masa Khulafa al- Rasyidin:

1. Masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq

Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Menurut Ahmad Syalabi

43

44 Abuddin Nata, *Pendidikan Islam Perspektif Hadits* (Ciputat: UIN Jakarta Press 2005), hal. 24

lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan Kuttab. Kuttab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid, selanjutnya Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa *Kuttab* didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah, sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat rasul terdekat.[45]

Lembaga pendidikan Islam masjid, masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan, dan lembaga pendidikan Islam, sebagai tempat shalat berjama'ah, membaca Al-qur'an dan lain sebagainya.

2. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Berkaitan dengan masalah pendidikan, Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah, beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukan itu, mereka bertugas mengajarkan isi Al-qur'an dan ajaran Islam lainnya. Adapun metode yang mereka pakai adalah guru duduk di halaman masjid sedangkan murid melingkarinya.

Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Kattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah negara dalam keadaan stabil dan aman, ini disebabkan disamping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya.[46]

Pendidikan dikelola di bawah pengaturan gubernur yang berkuasa saat itu (daerah otonom-otonom), serta diiringi kemajuan sarana dan fasilitas pendukung di berbagai bidang, seperti jawatan pos, kepolisian, baitulmal dan sebagainya. Adapun sumber gaji para pendidik waktu itu

---

45 Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 45.
46 Samsul Nizar, *Op.Cit.,* hal. 48.

diambilkan dari daerah yang ditaklukan dan dari baitul mal. Materi pendidikan Islam yang diajarkan pada masa khalifah Al-Rasyidin sebelum masa Umar bin Khattab, untuk pendidikan dasar:

a. Membaca dan menulis
b. Membaca dan menghafal Al-Qur'an
c. Pokok-pokok agama islam, seperti cara wudlu, shalat, shaum dan sebagainya

Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, ia menginstruksikan kepada penduduk kota agar anak-anak diajari: Berenang, Mengendarai unta, Memanah, Membaca dan menghapal syair-syair yang mudah dan peribahasa.

Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari: Al-qur'an dan tafsirnya, Hadits dan pengumpulannya, dan Fiqh (tasyri')

3. Masa Usman bin Affan.

Pada masa Usman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa khalifah Umar, diberikan kelonggaran untuk keluar ke daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah.

Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Usman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam dan dari segi pusat pendidikan juga lebih

banyak, sebab pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.[47]

Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa ini diserahkan pada umat itu sendiri, artinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru, dengan demikian para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah.

4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pada masa Ali, situasi kemanan sudah mulai bergejolak berupa, terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa pemerintahannya tidak stabil. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab seluruh perhatiannya itu ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam.[48]

Adapun pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin antara lain di Makkah, Madinah, Basrah, Kuffah, Damsyik (Syam), dan Mesir. [49]

C. Sempilan Barat: Arah Dan Pilar Pendidikan Islam

Kerusakan yang lama pada pola pendidikan di negara Barat sepatutnya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kerusakan tersebut timbul dikarenakan tidak adanya muatan ruhiyah dalam penelitian dan pengembangan sains dan teknologinya. Sehingga dampak yang bisa dirasakan, pola pendidikan tersebut menghasilkan *output* berpikir dan bersikap berdasarkan pada prinsip materialisme dengan menanggalkan prinsip syari'at Islam. Dari sinilah problem sosial kemasyarakatan

47 *Ibid,* hal, 49.
48 Samsul Nizar, *Op.Cit.,* hal 50.
49 Mahmud Yunus, *Op.Cit.,* hal. 33.

muncul dan kerusakan tatanan kehidupan. Sebagaimana telah disitir dalam ayat Al qur'an berikut ini:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Ar-Rum: 41.

Makna ayat di atas diantaranya bila, segala urusan dunia jika solusinya diserahkan pada hasil pemikiran manusia tanpa melibatkan hukum-hukum Allah didalamnya, maka solusi tersebut tidak bisa menuntaskan masalah. Sehingga yang terjadi adalah fenomena tambal sulam ataupun gali lubang, tutup lubang atas masalah yang ada. Maka dari itu jika ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah termasuk pendidikan harus berujung pangkal pada Islam.

Islam diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad tidak sekadar melakukan perbaikan akhlak. Namun lebih jauh lagi, turunnya Islam menjadi penyempurna dari semua agama yang ada dan memuat semua tata aturan kehidupan secara paripurna. Islam menjelaskan aturan mulai dari masuk kamar mandi hingga masuk parlemen, mulai dari menegakkan shalat hingga menegakkan Negara Islam. Demikian pula, Islam menjelaskan secara total bagaimana kaidah pendidikan sesuai dengan Khitab As-Syaari'. Jadi sangat disayangkan jika kaum muslimin berpaling dari Islam malah meniru total pendidikan ala Barat karena silau dengan kemajuannya.

Perhatikan firman Allah: (1) Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah : 208). (2) Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata (QS.Al-Ahzab : 36). (3) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? (QS.An-Nisa':).

Sepanjang sejarah dunia, Islam telah terbukti mampu membangun peradaban manusia yang khas dan mampu menjadi pencerah serta penerang seluruh dunia dari masa-masa kegelapan dan kejayaannya 13 abad lamanya. Faktor paling menentukan atas kegemilangan Islam membangun peradaban dunia adalah keimanan dan keilmuannya. Tidak ada pemisahan ataupun dikotomi atas kedua faktor tersebut dalam pola pendidikan yang diterapkan. Sehingga generasi yang dihasilkan juga tidak diragukan kehandalannya hingga kini.

Kalau begitu pola pendidikan seperti apa yang mampu mencetak generasi Islam berkualitas sekaliber tokoh-tokoh dunia tersebut? Penting kiranya menyatukan persepsi tentang pendidikan sesuai kaidah Syara'. Hakekat pendidikan adalah proses manusia untuk menjadi sempurna yang diridhoi Allah SWT. Hakikat tersebut menunjukkan pendidikan sebagai proses menuju kesempurnaan dan bukannya puncak kesempurnaan, sebab puncak kesempurnaan itu hanyalah ada pada Allah dan kemaksuman Rasulullah SAW.

Karena itu, keberhasilan pendidikan hanya bisa dinilai dengan standar pencapaian kesempurnaan manusia pada tingkat yang paling maksimal. Setelah diketahui hakikat pendidikan maka berikutnya bisa dirumuskan tujuan dari pendidikan Islam yang diinginkan yaitu:

1. Membangun kepribadian Islami yang terdiri dari pola pikir dan pola jiwa bagi umat yaitu dengan cara menanamkan tsaqofah Islam

berupa Aqidah, pemikiran, dan perilaku Islami kedalam akal dan jiwa anak didik. Karenanya harus disusun dan dilaksanakan kurikulum oleh negara.

2. Mempersiapkan generasi Islam untuk menjadi orang 'alim dan faqih di setiap aspek kehidupan, baik ilmu diniyah (Ijtihad, Fiqh, Peradilan, dll) maupun ilmu terapan dari sains dan teknologi (kimia, fisika, kedokteran, dll). Sehingga output yang didapatkan mampu menjawab setiap perubahan dan tantangan zaman dengan berbekal ilmu yang berimbang baik diniyah maupun madiyah-nya.

Kedua tujuan dari pola pendidikan Islam bisa terlaksana jika ditopang dengan pilar yang akan menjaga keberlangsungan dari pendidikan Islam tersebut. Pilar penopang pendidikan Islam yang dibutuhkan untuk bekerja sinergis terdiri dari:

1. **Keluarga**

Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan gerbang utama dan pintu pertama yang membukakan pengetahuan atas segala sesuatu yang dipahami oleh anak-anak. Keluargalah yang memiliki andil besar dalam menanamkan prinsip-prinsip keimanan yang kokoh sebagai dasar bagi si anak untuk menjalani aktivitas hidupnya. Berikutnya, mengantarkan dan mendampingi anak meraih dan mengamalkan ilmu setingggi-tingginya dalam koridor taqwa. Jadi keluarga harus menyadari dan memiliki beban tanggung jawab yang pertama untuk membentuk pola akal dan jiwa yang Islami bagi anak. Singkatnya, keluarga sebagai cermin keteladanan bagi generasi baru. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه

Setiap anak dilahirkan atas fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Bukhari)

رضى الرّبّ في رضى الوالدوسخط الرّبّ في سخط الولد

Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, demikian juga kemurkaan Tuhan terletak pada kemurkaan orang tua. (HR.Al-Bukhari no. 6521)

Pendidikan generasi merupakan aktivitas yang berkelanjutan tanpa akhir dan sepanjang hayat manusia. Oleh karena itu, pola pendidikan Islam tidak berhenti dan terbatas pada pendidikan formal (sekolah), namun justru pendidikan generasi Islami yang bersifat non formal di tengah masyarakat harus beratmosfer Islam pula. Kajian tsaqofah islam serta ilmu pengetahuan dan sarana penunjangnya menuntut peran aktif dari masyarakat pula. Ada beberapa peran yang bisa dimainkan masyarakat sebagai pilar penopang pendidikan generasi islami yaitu sebagai control penyelenggaraan pendidikan oleh negara dan laboratorium permasalahan kehidupan yang kompleks.

خذاالحكمة ممن سمعتموها فانه قديقول الحكمة غير الحكيم وتكون الرمية من غير رام

“Ambillah hikmah yang kamu dengan dari siapa saja, sebab hikmah itu kadang-kadang diucapkan oleh seseorang yang bukan ahli hikmah. Bukankah ada lemparan yang mengenai sasaran tanpa disengaja?” (HR. Al-Askari dari Anas ra dalam kitab Kashful Khafa’ Jilid II, hal.62).

العلم ضالة المؤمن حيث وجده أخذه

“Hikmah laksana hak milik seorag mukmin yang hilang. Dimanapun ia mejumpainya, disana ia mengambilnya” (HR. Al-Askari dari Anas ra)

2. Madrasah.

Tempat untuk mengkaji keilmuan lebih intensif dan sistematis terletak pada Madrasah. Semasa Rasulullah SAW, masjid-masjid yang didirikan kaum muslimin menjadi lembaga pendidikan formal bagi semua manusia. Didalamnya tidak semata-mata membahas ilmu diniyah, namun juga ilmu terapan. Rasulullah menjadikan masjid untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tapi penyusunan strategi perang pun juga seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat didalam masjid.

Sedangkan dimasa kemajuan teknologi dan era reformasi modern saat ini, pendidikan bisa dialihkan yang semula di masjid ke tempat dengan fasilitas yang menunjang dalam proses pembelajaran lebih efektif baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini sah-sah saja dan tidak bisa dianggap sebagai upaya memisahkan anak didik dari masjid.

Peradaban Islam mengalami puncak kegemilangan pada saat Bani Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan dalam sistem pemerintah Khilafah Islamiyah. Sepanjang pemerintahan Khilafah Abbasiyah, perhatian sangat besar diberikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan pola pendidikan Islami. Sejarah mencatat berdirinya Bait Al-Hikmah sebagai madrasah dengan jenjang pendidikannya yang sistematis. Bait Al-Hikmah dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sebagai khalifah pencinta ilmu pengetahuan. Dari Bait Al-Hikmah inilah lahir tokoh-tokoh muslim berilmu dan ternama yang telah disebutkan sebelumnya. Juga Bait Al-Hikmah lah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang didatangi oleh semua orang dari segala penjuru dunia termasuk Barat. Dan munculnya Renaissance di Eropa terjadi setelah banyak orang Eropa menggali ilmu pengetahuan dari bait Al-Hikmah.

Sistematika pendidikan Islam yang bisa diterapkan dalam madrasah dikelompokkan secara berjenjang (marhalah) yang harus memperhatikan fakta anak didik di setiap tingkatan. Tentunya bobot

yang diberikan disetiap tingkatan memiliki komposisi yang berbeda namun proporsional. Sedangkan keberhasilan sistematika pendidikan Islami yang ada pada madrasah tergantung pada para tenaga pendidiknya (guru professional).

Perkembangan sikap dan pemahaman yang terdapat pada anak didik merupakan tanggung jawab terbesar pada para tenaga pendidik. Lebih dari itu, Syakhsiyah Islamiyah yang dicita-citakan pada anak didik menjadi sempurna apabila para tenaga pendidiknya lebih dahulu memiliki Syakhsiyah Islamiyah tersebut dan mampu meningkatkan secara berkelanjutan. Madrasah meletakkan harapan besar kepada para tenaga pendidik untuk memberikan proses yang tidak sekadar *transfer of knowledge* tapi juga *cultivate of spirit and value*. Maka dari itu arti guru yaitu digugu dan ditiru benar-benar bisa terlaksana dan terjaga dengan baik.

3. Negara

Negara sebagai pilar penopang bisa mewujudkan pendidikan Islami lebih optimal, efektif, produktif, dan sempurna jika didukung dengan semua kebijakan yang dikeluarkan terhadap aspek kehidupan ini berlandaskan syari'at Islam. Peran yang bisa diambil oleh negara dalam mewujudkan pola pendidikan Islami diantaranya:

a. Menyusun kurikulum berdasarkan aqidah Islam untuk semua institusi pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi). Filterisasi terhadap paham-paham sesat dan menyesatkan bisa dijalankan melalui standar kurikulum Islami. Sehingga harapannya tidak lagi masuk di materi sekolah tentang teori Darwin, ekonomi ribawi, serta filsafat liberal-sekuler dan lainnya yang tidak sesuai dengan Aqidah Islam.

b. Seleksi dan kontrol ketat terhadap para tenaga pendidik. Penetapan kualifikasi berupa ketinggian syakhsiyah islamiyah dan kapabilitas mengajar. Jika sudah didapatkan tenaga pendidikan yang sesuai

kualifikasi, negara harus menjamin kesejahteraan hidup para tenaga pendidik agar mereka bisa focus dalam penelitian dan pengembangan ilmu bagi anak didik dan tidak disibukkan aktivitas mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

c. Menyajikan content pendidikan dengan prinsip al Fikru lil Amal (Link and Match/ilmu yang bisa diamalkan). Artinya jangan sampai isi materi pendidikan tidak membumi (tidak bisa diterapkan) sehingga tidak berpengaruh dan tidak memotivasi anak didik untuk mendalaminya.

d. Tidak membatasi proses pendidikan dengan batasan usia dan lamanya belajar. Karena hakekat pendidikan adalah hak setiap manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Allah mengamanahkan penguasa negara untuk benar-benar memenuhi kebutuhan umat tanpa syarat termasuk pendidikan.

الامام راع وهو مسؤول عن رعيته

"Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya." (HR. Ahmad, Syaikhan, Tirmidzi, Abu Dawud, dari Ibnu Umar)

C. Kesimpulan

Islam adalah agama yang natural dimana faktor kelahirannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi pilitik yang ada. Muhammad tidak pernah menetapkan sistem pemerintahan dalam Islam tetapi hal itu diserahkan pada ummat Islam itu sendiri. Di satu sisi sistem masyarakat yang hendak dibangun oleh Islam mempunyai implikasi langsung terhadap corak politik dan bentuk pemerintahan yang dibentuk. Di sisi lain hal yang ingin dibangun oleh Islam adalah *civil society* yang mana setiap warga negara berhak mendapat keadilan dalam hukum, ekonomi, politik dan kesetaraan dalam hubungan sosial.

Di zaman Nabi Muhammad sistem pemerintahan ketika merujuk pada Piagam Madinah terdiri dari Eksekutif, Yudikatif, dan legislatif, dimana bidang Eksekutif dan yudikatif dipegang oleh Nabi secara langsung, sementara legislatif diserahkan pada setiap suku dengan konsep musyawarah. Sistem kesetaraan dalam Islam berimplikasi pada sistem ekonomi yang hendak dibangun oleh Nabi yaitu ekonomi yang tidak ada unsur eksploitatif dan akumulatif yang nantinya melahirkan riba. Konsep ekonomi ini adalah kritik terhadap sistem merkantilis yang dibentuk oleh elit Quraisy Makkah. Dalam sistem ekonomi Islam setiap manusia mendapatkan dari hasil kerjanya dan setiap Muslim harus menafkahkan kelebihan hartanya dari kebutuhan pokoknya.

Adapun sistem pendidikan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah:

1. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Makkah adalah pendidikan tauhid, titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim, agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik. Yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran , merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut.
3. Masa Khalifah: Pendidikan pada masa khalifah Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, pendidikan sudah lebih meningkat dimana pada masa khalifah Umar, guru-guru sudah diangkat dan digaji untuk mengajar ke daerah-daerah yang baru ditaklukan. Pada masa khalifah Usman bin Affan, pendidikan diserahkan pada rakyat dan sahabat tidak hanya terfokus di Madinah saja, tetapi sudah di bolehkan ke daerah-daerah untuk mengajar.pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan kurang mendapat perhatian, ini

disebabkan pemerintahan Ali selalu dilanda konflik yang berujung kepada kekacauan.

Pembangunan dan pembentukan generasi Islam berkualitas sebagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'-tabi'in dan ulama-ulama kenamaan merupakan bukti keberhasilan pola pendidikan Islami. Generasi Islam dinilai berkualitas apabila terbentuk pola pikir dan pola jiwa berlandaskan pada aqidah Islam yang kuat sehingga mampu mengintegrasikan keimanan dan kompetensi pada diri anak didik. Pola pendidikan Islami sudah ada semenjak Rasulullah SAW hidup dan Beliaulah yang meletakkan pondasinya dengan banyak keteladanan yang bisa diambil.

Dengan dihasilkannya generasi Islami juga akan didapati peradaban mulia seperti yang sudah tercatat dalam sejarah dunia tentang kegemilangan peradaban Islam mengubah dunia dari kegelapan menuju pencerahan hakiki. Pendidikan Islami mampu membuktikan janji AllahSWT dengan munculnya umat terbaik sesuai dengan ayat al-Qur'an:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Ali Imron : 110).

خير كم قرني ثمّالذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم

"Sesungguhnya yang terbaik dari kalangan kamu ialah sezaman denganku, kemudian orang yang hidup selepas zaman aku, setelah itu orang yang hidup selepas mereka". (HR. Al-Bukhari, no. 1496).

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata. *Pendidikan Islam Perspektif Hadits*. Ciputat: UIN Jakarta Press 2005.

Armai Arief. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Penerbit Angkasa. 2005.

Arnold Toynbee. *Sejarah Umat Manusia : Uraian Analitis, Kronologis, Naratif dan Komparatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Bernard Lewis. *Islam Liberalisme Demokrasi: membangun sinergi warisan sejarah, doktrin dan konteks global*. Jakarta: Paramadina. 2002.

John L. Esposito. *Islam Warna Warni : Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*. Jakarta : Paramadina. 2004.

Karen Armstrong. *Sejarah Islam Singkat*. Yogyakarta: Elbanin Media. 2008.

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1992.

Niel Robinson. *Pengantar Islam Koprehensif*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2001.

Nurkholis madjid. Jurnal Paramadina, vol.1, no 1.,juli-desember 1998.

Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.

Zainab Al Khudhairi. *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1995.

Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

BAGIAN 4

PENGARUH POLITIK DAN BUDAYA TERHADAP KADERISASI PEMIMPIN MASA DEPAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Dalam menjalani hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama manusia serta dengan lingkungan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk Tuhan lainnya. Manusia di anugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial manusiapun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri.

Sejarah mencatat, sejak awal pergerakan kebangsaan 1908, peran pemuda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa sangat dominan terutama untuk mengubah strategi pergerakan dari yang semula bersifat kedaerahan menjadi semacam gerakan massif yang menyentak kemapanan kolonial di negeri jajahan Indonesia. Nama-nama pemuda, terutama mahasiswa masa awal pergerakan kebangsaan seperti Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Sukarno, Muhammad Hatta dan banyak lagi lainnya adalah sederet kampiun mahasiswa yang menempatkan idealisme sebagai modal menginspirasi anak negeri untuk menyadari betapa nasionalisme merupakan determinan dalam menggelorakan pergerakan mencapai Indonesia merdeka. Semangat dan gelora pergerakan inilah yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda 1928, yang kemudian mencapai klimaks dengan dikumandangkannya Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola diri sendiri, kelompok dan lingkungan dengan baik. Khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Di sinilah dituntut seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak pengikutnya, dan seberapa lama ia memimpin, tapi terlihat dari seberapa banyak ia bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru sebagai kaderisasi atau sudah mewariskan sebuah hasil yang dicita-citakan masyarakat.

Kaderisasi atau menciptakan atau mencetak calon-calon pemimpin baru merupakan tugas besar dalam kepemimpinan, dimana kaderisasi kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting di lingkungan organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang bervariasi, karena dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam proses seperti itu kepemimpinan akan berlangsung efektif, apabila fungsi-fungsi kepemimpinan diwujudkan sesuai dengan tipe kepemimpinan yang mampu memberikan peluang bagi orang yang dipimpin, untuk ikut berperan serta dalam menetapkan

dan melaksanakan keputusan-keputusan. Dengan demikian berarti setiap kreativitas dan inisiatif dalam kepemimpinan yang efektif harus disalurkan dan dimanfaatkan.

B. Pengaruh Politik dan Budaya Terhadap Kaderisasi

1. Kaderisasi Pemimpin

Kepemimpinan adalah suatu peranan dan juga merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Menurut John C. Maxwell, bahwa "Pemimpin" diharapkan dapat mengatasi tantangan dengan cara antara lain menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya kepemimpinan baru, memperlengkapi dan membekali calon pemimpin dengan berbagai keahlian dan kearifan, komitmen seumur hidup seorang pemimpin untuk mengembangkan calon pemimpin, membentuk tim impian, serta mereproduksi atau menciptakan generasi kepemimpinan masa depan. Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi suatu kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kedudukannya.

Kaderisasi juga diartikan sebagai proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. Dalam Al qur'an disebutkan: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Ali Imran : 110)

Kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, sasaran kaderisasi (obyek). Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan

pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi.

Pemimpin menjadi ujung tombak dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga sering dikatakan kesalahan dari masyarakat maupun bawahan ditangung oleh seorang pemimpin. Calon pemimpin banyak menggelorakan janji-janji dalam upaya untuk mencari simpati di masyarakat pada saat dilangsungkannya prosesi kampanye. Akan tetapi setelah terpilih justru banyak melakukan tindakan kurang terpuji baik yang dilakukan secara diam-diam maupun secara terbuka. Hal ini justru memicu ketidak percayaan masyarakat terhadap pemimpin, terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal, anarkisme dari sekelompok masyarakat, dan masih banyak lagi kasus sejenis lainnya.

Perlu diingat bahwasanya pengaruh globalisasi, kapitalisme, hedonisme, dan segala embel-embel yang mengikutinya terus membuat cengkraman kuat sehingga karakteristik bangsa secara perlahan-lahan akan dirong-rong dan mulai terkikis. Banyak contoh yang bisa dilihat bagaimana generasi muda sekarang dalam upaya menyikapi pengaruh zaman yang semakin menjadikan manusia budak dari materi. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi *dissending generation*, dimana generasi penerus bangsa tidak akan mampu menjadi tulang punggung bangsa dan hilang (Sukadi, 2011:4).

Mengingat akan dampak negatif dari pengaruh globalisasi, kapitalisme, hedonisme dan sebagainya, sekiranya dalam sebuah pelembagaan negara diharapkan mampu mempersiapkan kader-kader muda dengan kualifikasi dan kualitas yang baik guna menggantikan kepemimpinan lama yang sudah "lapuk". Kader muda ini merupakan power bagi perubahan bangsa kearah kemajuan. Kader ini harus dipikirkan matang-matang dan memang harus berkualifikasi melalui proses pematangan yang maksimal dalam sebuah organisasi. Kualifikasi ini diperlukan, karena kader nantinya akan diharapkan memegang jabatan tinggi yaitu menjadi seorang pemimpin pengganti (estapet).

Seorang pemimpin adalah seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan mampu menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok yang disertai dengan penuh kejujuran. Pemimpin yang jujur adalah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukan untuk memimpin. Kader dapat diartikan sebagai orang yang akan memegang jabatan atau pekerjaan penting disuatu kelompok atau tim (pemerintahan, partai, dll).

Sedangkan kaderisasi adalah proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Dengan demikian, kaderisasi kepemimpinan adalah proses untuk mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin dimasa yang akan datang, yang akan memikul tanggung jawab penting dilingkungan suatu organisasi atau tim.

Kaderisasi diperlukan semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, pasti harus mengakhiri kepemimpinannya, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendakinya. Dari satu sisi proses penggantian itu dapat terjadi karena adat kebiasaan atau ketentuan di dalam etika kelompok/organisasi, yang menerapkan batas/tenggang waktu tertentu disebabkan oleh penolakan anggota kelompok/ organisasi, yang menghendaki pemimpin diganti, baik melalui proses yang wajar sifatnya maupun secara tidak wajar. Berikutnya sebab lain yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari oleh pemimpin sebagai manusia adalah proses alamiah sebagai ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pemimpin tidak mungkin menghindari proses menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin, sehingga mau tidak mau harus mengakhiri kepemimpinannya.

Kemampuan itu secara perlahan-lahan berkurang, tidak saja mengenai kemampuan fisiknya tetapi juga kemampuan psikisnya. Dalam keadaan itu seseorang akan sampai pada batas kesepakatan di dalam organisasinya, yang disebut pensiun pada usia tertentu. Batas usia diasumsikan sebagai saat kemampuan fisik dan psikisnya sudah tidak mampu berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu dianggap sebagai saat yang tepat untuk diganti, dengan mengakhiri kepemimpinannya

untuk diteruskan oleh orang yang lebih muda. Sedang batas akhir yang tidak dapat dielakkan manusia disebut kematian. Untuk itu bagi setiap orang yang menjadi pemimpin, perlu mempersiapkan kader sebagai penerus kepemimpinannya (Nawawi, 1992 : 111).

Mengapa perlu adanya kaderisasi? Karena semua orang yang termasuk sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinan, suka atau tidak, mau - tidak mau, hal tersebut akan terjadi. Proses tersebut dapat terjadi karena:

1. Dalam suatu organisasi ada ketentuan periode kepemimpinan seseorang
2. Adanya penolakan dari anggota kelompok, yang menghendaki pemimpinnya diganti, baik secara wajar maupun tidak wajar.
3. Proses alamiah, menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin.

Menurut KBBI, kaderisasi berawal dari kata “kader” yang memiliki makna yaitu, “orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam sebuah organisasi”. Dengan demikian kaderisasi adalah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi tersebut.

Organisasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tatanan sosial. Pengaruh yang kuat organisasi terhadap masyarakat menyebabkan pula pengaruh organisasi terhadap sumber daya manusia sebagai anggota organisasi, sehingga mendorong anggota tersebut aktif terlibat dalam proses perubahan sosial (Wahjosumidjo, 1995). Kaderisasi gagal biasanya terjadi karena beberapa hal:

1. Pelatih/Senior tidak memiliki kemampuan melatih
2. Pelatih/Senior tidak memiliki kemauan melatih
3. Tidak ada anggota/kader untuk dilatih.

Penyebab kesatu muncul karena senior hanya bersandar kepada pengalaman yang dimiliki. Seorang pelatih yang baik mutlak perlu cukup bacaan. Dalam kaderisasi, senior harus mampu

mengkomunikasikan ilmu dan pengalaman. Sebab kedua yang paling memprihatinkan. Kemauan adalah awal dari semuanya terjadi. Jika tidak ada kemauan melatih dari senior anda, maka carilah orang lain. Jika tidak ada, jadilah pelatih bagi anda dan teman-teman.

2. Fungsi Kaderisasi pemimpin

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya.

Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rekrutmen anggota baru
2. Penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru bisa paham dan bergerak menuju tujuan organisasi.
3. Menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota. Membina anggota dalam setiap pergerakkannya. Menjaga anggota dalam nilai-nilai organisasi dan memastikan anggota tersebut masih sepaham dan setujuan. Mengembangkan skill dan knowledge anggota agar semakin kontributif.
4. Menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif.
5. Kaderisasi akan gagal ketika potensi anggota mati dan anggota tidak terberdayakan.

6. Mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi.
7. Kaderisasi bisa menjadi evaluator organisasi terhadap anggota. Sejauh mana nilai-nilai itu terterima anggota, bagaimana dampaknya, dan sebagainya (untuk itu semua, diperlukan perencanaan sumber daya anggota sebelumnya).

3. Proses Kaderisasi Pemimpin

Di dalam Alqur'an disebutkan sebuah ayat yang berkenaan dengan kaderisasi: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (Q.S. Ash-Shaff : 4)

Dari ayat diatas bisa kita lihat bahwa untuk mengahasilkan kader-kader yang berpotensi yaitu dengan perencaan yang matang dan sistem yang teratur. Dimana jika kita lihat sekilas tentang luar biasanya sistem kaderisasi yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah, dalam mengkader, tidaklah sembarangan. Beliau melakukan kaderisasi secara teratur dan terencana. Beliau melakukan apa yang ia katakan. Sehingga kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan. Kunci kaderisasi yang sukses melalui yaitu:

1. Kaderisasi Informal

Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa indikator atau kriteria kelebihan calon pemimpin yang berkepribadian positif dalam merebut kepemimpinan yang dilakukannya secara gigih berdasarkan prestasi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap kelompok/organisasi, memilki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak atas segalanya

2. Kaderisasi Formal

Perkataan formal menunjukkan bahwa usaha untuk mempersiapkan seseorang sebagai calon pemimpin dilakukan secara berencana, teratur dan tertib, sistematis, terarah, dan disengaja.

3. Pengaruh Politik Dalam Proses Kaderisasi

Aristoteles, menyatakan bahwa pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Joice Mitchel, yang mengatakan bahwa pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. Meriam Budhiarjo, pengertian politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu.

Sedangkan pengertian politik menurut definisi Johan Kaspar Blunchli, adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. F. Soltau, mengatakan bahwa pengertian politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.

Menurut Robert, mengatakan bahwa pengertian politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Paul Janet, yang mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian politik adalah Ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. Pengertian politik menurut definisi Paul Janet adalah hal-hal praktis yang mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW.

Faktor yang mempengaruhi kaderisasi yang baik dan kuat sangatlah banyak, yaitu:

Pertama: adalah faktor politik. Disini dapat kita lihat bahwa politik memainkan perananan yang cukup vital terhadap keberlangsungan proses kaderisasi. Politik bisa menjadi tolak ukur dan persistensi kader penerus. Maka dari itu pengaruh pertama politik terhadap proses

kaderisasi yaitu dalam dimensi kompetisi. Kompetisi didalam politik sangatlah kental sehingga ketika kaderisasi sudah terpengaruh oleh kepentingan politik, maka kaderisasi pun akan mengarah kepada persaingan yang kuat, sehingga proses kaderisasi lebih dominan mengarah ke pembentukan karekter yang kompetitif. Seperti contoh mengedepankan kompetensi para kader yang di kaderisasikan untuk menghadapi persaingan di panggung politik.

Kedua: adalah faktor dimensi inovasi. Dimensi inovasi merupakan suatu proses dimana serorang kader dituntut untuk selalu menghasilkan pembaharuan dan ide-ide cerdas dan cemerlang sehingga dia mempunyai cara yang berbeda yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan kompetisi.

Ketiga: adalah faktor dimensi regenerasi. Dimensi ini merupakan suatu dimensi yang sudah terbiasa dilakukan dalam dunia politik yaitu para politisi selalu menyiapkan regenerasi sebagai penerus dalam mencapai tujuan sehingga ketika hal ini terjadi maka kaderisasi lebih mengarah kepada kapitalisme. Kaderisasi yang sesuai didalam kapitalisme adalah kaderisasi yang dipimpin dan dibentuk dengan gaya kepemimpinan otoriter.

4. Pengaruh Budaya Dalam Proses Kaderisasi

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, dinamis, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sitem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni.

Bahasa sebagaimana juga sebuah budaya, adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, dan membuktikan

bahwa budaya itu dapat dipelajari. Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh. Budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Bebagai budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial-budaya ini tersebar, serta meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Pada hakikatnya budaya juga mempunyai pengaruh terhadap seorang pemimpin dan berpengaruh juga kepada kaderisasi yang dilakukan pemimpin tersebut. Sesungguhnya bahwa kebudayaan yang berlaku di suatu daerah akan membedakan sistem kaderisasi satu dengan kaderisasi lain yang berlaku di daerah yang berbeda. Sebagai contoh yaitu budaya kerja keras yang berlaku di suatu tempat yang sudah padat penduduknya dan yang sangat ketat persaingannya maka dengan sendirinya akan membentuk sebuah kerja keras yang menghasilkan sesuatu berdasarkan hal yang ditargetkan. Berbeda halnya dengan kadersisasi yang dilakukan di suatu daerah yang mana di daerah tersebut belum banyak persaingan maka peoses kaderisasinya pun akan berbeda.

Sebagai contoh lain budaya kepemimpinan yang ada dipesantren akan berbeda dengan kepemimpinan di tempat lain. Hal ini disebabkan budaya dipesantren mempunyai pemahamaan budaya kharismatik. Hal ini bisa kita lihat dalam pewaris kepemimpinan yang turun temurun.

5. Kesimpulan

Kaderisasi adalah proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi tersebut atau proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin penganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Sedangkan kepemimpinan yaitu adalah suatu peranan dan juga merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain.

Dalam pelaksanaannya proses kaderisasi terdiri dari dua macam yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Sedangkan usaha peningkatan kualitas kemampuan menggali kreativitas di lingkungan

orang yang dipimpin sebagai anggota organisasi, usaha-usaha tersebut meliputi; berfikir efektif dalam menentukan keputusan, mengkomunikasikan hasil berfikir, meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah, dan meningkat kreatifitas.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).

Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene (2006) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

http://padatu.blog.ugm.ac.id/books/buku-kaderisasi-kepemimpinan-2/

Nawawi & Hadari. 1992. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

S. N Dubey (2007) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra. Hal 20

Wahjosumidjo. 1995. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BAGIAN 5

URGENSI KAJIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Ilmu sosial merupakan ilmu yang unik. Ia tidak dapat dirumuskan secara pasti sebagaimana ilmu eksak, tidak dapat ditentukan secara mutlak salah atau benarnya, serta tidak dapat di rangkum dalam sebuah teori yang berlaku sepanjang masa. Ilmu sosial mempelajari manusia dari banyak sudut pandang dan banyak cara. Oleh karena itu, tidak ada satupun teori sosial yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan teori sosial yang lain.50 Bila Ilmu eksak dikaitkan dengan ilmu yang mempelajari tentang berbagai gejala alam, ilmu sosial mempelajari aktivitas manusia dalam hidup bersama. Aktivitas manusia tersebut berpikir, bersikap dan berprilaku dalam menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. Dengan pengertian sederhana tersebut dalam

---

50 Sindung Haryanto*, Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal.5.

lingkungan ilmu sosial termasuk ilmu antropologi, sejarah, hukum, ekonomi, politik, psikologi, sosiologi dan lainnya.[51]

Ilmu sosial lahir tidak jelas kapan waktunya, seiring dengan adanya manusia bermasyarakat tentu analisis dan penelahaan-penelahaan tentangnya terus berlangsung. Artinya ilmu sosial adalah ilmu yang cukup tua usianya. Perlu disadari bahwa kitab-kitab suci, tidak hanya secara dogma, secara ilmu pengetahuan di dalamnya implisit mendeskripsikan kondisi suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Hal ini memberi petunjuk bahwa perhatian tentang masalah sosial telah ada semenjak lama; bukan resmi pasca revolusi industri.

Secara ringkas, sejak manusia membentuk kelompok yang dinamakan masyarakat maka di saat itu ilmu sosial tumbuh. Dalam perkembangannya, sistematika ilmu serta metodeloginya mengalami penambahan dan penyempurnaan sehingga ilmu sosial mantap berdiri di samping ilmu pengetahuan lain.

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang majemuk dan sangat kaya ragamnya. Perbedaan yang terjadi dalam kebudayaan Indonesia dikarekan proses pertumbuhan yang berbeda dan pengaruh dari budaya lain yang ikut bercampur di dalamnya. Di setiap budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial dan seni yang tinggi. Seiring dengan masuknya era globalisasi saat ini, turut mengiringi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia.

Negara Indonesia mempunyai norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Setiap butir norma memiliki peranan masing-masing dalam mengatur hidup manusia. Norma merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan oleh manusia dan wajib dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki manfaat positif bagi kelangsungan hidup khalayak.

---

51 Taufik Abdullah, Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hal. 31.

Pada kondisi saat ini, kebudayaan mulai ditinggalkan bahkan sebagian masyarakat Indonesia malu akan kebudayaannya sebagai jati diri sebuah bangsa. Hal ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman budaya Indonesia secara perlahan-lahan, yang tidak terlepas dari pengaruh budaya.

Generasi muda termasuk mahasiswa di dalamnya, baik disadari atau tidak memegang amanah dalam menjaga kelestarian keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia tersebut banyak cara yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan batasan-batasan yang ada.

Manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia itu mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan kadang kala disadari atau tidak manusia merusak kebudayaan.52

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang asal mula ilmu sosial dan budaya dasar, perlu diketahui pengelompokan ilmu pengetahuan. Prof Dr.Harsya Bactiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Ilmu-ilmu Alamiah (natural scince). Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan

---

52 Parsudi Suparman, Manusia, Kebudayaan, dan lingkungan, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal.161.

suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian digeneralisasikan. Atas dasar ini lalu dibuat prediksi.

2. Ilmu-ilmu sosial (social scince). Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Tetapi hasil pengkajian ini lebih bersifat kualitatif, sebab hal ini menyangkut pola perilaku dan tingkah laku manusia di masyarakat yang cenderung berubah-ubah.
3. Pengetahuan budaya (the humanities) bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti.53.

B. Spesifik perbedaan ilmu sosial dan badaya

1. Ilmu Sosial.

Ilmu sosial dan budaya adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integritas dari dua ilmu lainnya, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi (sosio: sosial, logos: Ilmu) dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Pengertian lebih lanjut tentang ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial, sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk dalam pengetahuan budaya, mengkaji masalah kemanusiaan dan budaya.54

Ilmu Sosial merupakan studi analisis atas aneka fenomena sosial masyarakat dengan segala dinamika dan implikasinya dari sudut pandang kajian dasar falsafah keilmuan. Manusia sebagai makhluk sosial

53 http:// massofa.wordpress.com/2008/10/21/ *pengertian-tujuan-dan-ruang –lingkup ilmu budaya* dasar. Html.
54 http: // Afri zalwzaini. Wordpress.com

tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sejak zaman prasejarah hingga sejarah, manusia telah disibukkan dengan terciptanya berbagai aturan dan norma dalam kehidupan berkelompok mereka. Dalam berbagai keterciptaan itulah ilmu pengetahuan terbukti memainkan peranan signifikan.

Ilmu Sosial membicarakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Hubungan ini dapat diwujudkan melalui kenyataan sosial dan kenyataan sosial inilah yang menjadi titik perhatiannya. Dengan demikian Ilmu Sosial memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk melengkapi gejala-gejala sosial agar daya tanggap, persepsi, dan penalaran kita dalam menghadapi lingkungan sosial dapat ditingkatkan.

Ilmu sosial bukanlah suatu bidang keahlian ilmu-ilmu sosial tertentu, seperti politik, antropologi dan sebagainya, tetapi menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang ilmu sosial seperti ilmu politik, sosiologi, sejarah dan sebagainya.

Pengertian ilmu sosial menurut para ahli:

Menurut, Achmad Sanusi, Ilmu Sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis & biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah. Lalu menurut, Peter Herman, Sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namuntetap merupakan sebagai satu kesatuan, dan menurut, Gross, Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat & pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk.55

55 Hamid Hasan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.25.

Jadi **pengertian ilmu sosial secara menyeluruh** adalah: ilmu yang mencangkup semua aspek didalam kehidupan mulai dari sifat seseorang, atau individu, interaksi antar individu, antara individu dan kelompok dan interaksi antara kelompok dan kelompok.56

2. Ilmu Budaya.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan di sebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistim agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bangunan dan karya seni.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat komplek, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.57

Pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa ahli:

1. **R. Seokmono** menerangkan bahwa budaya adalah hasil kerja atau usaha manusia yang berupa benda maupun hasil buah pemikiran manusia dimasa hidupnya.

---

56 Bert.F.Hoselitz, Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hal. 15.
57 Taufik Abdullah, *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*, (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2006), hal. 56

2. **Effat al-Syarqawi** mendefinisikan budaya Islam, Ia menjelaskan bahwa budaya adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin didalam kesaksian & berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai makna dan tujuan rohaniah.

3. **Lehman, Himstreet, dan Batty** mendefinisikan budaya sebagai kumpulan beberapa pengalaman hidup yang ada pada sekelompok masyarakat tertentu. Pengalaman hidup yang dimaksud bisa berupa kepercayaan, perilaku, & gaya hidup suatu masyarakat.

4. **Parsudi Suparian**, mengatakan budaya akan melandasi segala perilaku dalam masyarakat, karena budaya merupakan pengetahuan manusia yang seluruhnya digunakan untuk mengerti dan memahami lingkungan & pengalaman yang terjadi kepadanya..

Jadi Ilmu budaya adalah: suatu ilmu pengetahuan yang menelaah berbagai masalah kemanusiaan dan budaya, dengan menggunakan pengertian yang berasal dari dan telah dikembangkan oleh berbagai bidang pengetahuan atau keahlian.

C. Perkemabangan Sosial dan Kebudayaan di Indonesia

Posisi Indonesia terletak di persimpangan dua Samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua Benua (Asia dan Australia), yang sejak dahulu merupakan daerah perlintasan dan pertemuan berbagai macam agama dan ideologi serta kebudayaan. Dalam kondisi yang demikian, maka terdapat 5 (lima) lapisan perkembangan sosial budaya Indonesia:

1. Lapisan sosial budaya lama dan asli, yang memperlihatkan persamaan yang mendasar (bahasa, budaya, dan adat) di samping perbedaan-perbedaan dari daerah ke daerah. Persatuan dan kesatuan yang bersumber kepada lapisan ini tidak di tiadakan oleh datangnya agama dan nilai-nilai baru.

2. Lapisan keagamaan dan kebudayaan yang berasal dari India, wilaya Indonesia merupakan pusat pengembangan peradaban Hindia di

pulau Jawa, namun kesadaran akan kebersamaan tetap dijunjung tinggi (Bineka Tunggal Ika).

3. Lapisan yang datang dengan agama Islam tersebar luas di Wilayah Indonesia yang sekaligus juga memberikan corak tata kemasyarakatan, sebagaimana halnya agama Budha dan Hindu yang telah memberi warna pada tatanan masyarakat dan struktur ketata Negaraan.
4. Lapisan yang datang dari Barat bersama dengan agama Kristen melengkapi kehidupan umat beragama di Indonesia di tengah tengah pengaruh dominasi asing yang silih berganti dari kerajaan kerajaan Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris.
5. Lapisan kebudayaan Indonesia yang dimualai kesadaran bangsa. Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap kekuasaan asing telah memberikan inspirasi dan tekad untuk mendorong lahirnya gerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, kemudian disusul dengan pemantapan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Sejak periode perkembangan nasional, semakin dirasakannya perkembangan percaturan ideologi yang pada garis besarnya terbagi atas 3 kategori yaitu:

1. Ideologi yang menitikberatkan pada nilai-nilai agama
2. Ideologi yang menitikberatkan pada sosialisme
3. Ideologi yang menitikberatkan pada nasionalisme.

Negara Republik Indinesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, nilai-nilai luhur yang merupakan kepribadian yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa inilah yang kemudian menjadi ideologi dan dasar negara yang di kenal sebagai pancasila, yang akhirnya di tuangkan dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan sosial budaya di

Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam falsafah dan dasar negara pancasila.

Setelah kemerdekaan, salah satu hal penting yang menyangkut konsepsi nusantara dan yang berkembang menjadi wawasan nusantara ialah Deklarasi 13 Desember 1957 tentang wilayah perairan Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja, 1993).

"Bahawa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang di ukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar daripada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan di tentukan dengan UDD".

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah mengeluarkan pernyataan wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bentuk geografi RI sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan sendiri pula
2. Bagi kesatuan wilayah RI, semua kepulauan dan laut harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat
3. Penetapan batas laut teritorial (1939) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keslamatan dan keamanan Negara RI

4. Setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang di pandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.58

D. Unsur-unsur sosial dan kebudayaan

1. Unsur-unsur Sosial

Suatu sistem sosial yang menjadi perhatian pelbagai ilmu sosial, pada dasarnya merupakan wadah dari proses-proses, pola-pola interaksi sosial. Secara struktural, suatu sistem sosial akan mempunyai unsur-unsur pokok dan unsur-unsur pokok ini merupakan bagian yang menyatu di dalam sistem sosiak.

Alvin L. Bertrand (1980), Soerjono Soekanto (1985) telah mengungkapkan mengenai unsur-unsur itu. Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kepercayaan** yang merupakan pemahaman terhadap semua aspek alam semesta yang dianggap sebagai suatu kebenaran.
2. **Perasaan dan pikiran**, yakni suatu keadaan kejiwaan manusia yang menyangkut keadaan sekelilingnya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial.
3. **Tujuan**, yang merupakan suatu cita-cita yang harus dicapai dengan cara mengubah sesuatu atau mempertahankannya.
4. **Kaidah atau norma** yang merupakan pedoman untuk bersikap atau berperilaku secara pantas.

---

58 http://asri-blog-blogsspot.co.id/2011/07/*makalah-perkembangan-sosial-budaya*.

5. **Kedudukan dan peranan**; kedudukan merupakan posisi-posisi tertentu secara vertikal, sedangkan peranan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik secara struktural maupun prosesual.
6. **Pengawasan**, yang merupakan proses yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk menaati kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
7. **Sanksi**, yakni persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan terhadap perilaku tertentu dinamakan sanksi positif, sedangkan penolakan dinamakan sanksi negatif.
8. **Fasilitas**, yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah ditentukan terlebih dahulu.
9. **Keserasian dan kelangsungan hidup**
10. **Keserasian antara kualitas hidup dengan lingkungan**.

Ada baiknya kita pula unsur-unsur sistem sosial menurut pendapat Alvin L. Bertrand. Ada sepuluh unsur sistem sosial menurutnya, antara lain:

1. Keyakinan (pengetahuan)
2. Perasaan (sentimen)
3. Tujuan, sasaran atau cita-cita
4. Norma
5. Kedudukan – peranan
6. Tingkatan atau pangkat (rank)
7. Kekuasaan atau pengaruh
8. Sanksi
9. Sarana atau fasilitas

10. Tekanan-ketegangan.

Berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing unsur-unsur.

1. Keyakinan

Setiap sistem sosial mempunyai unsur-unsur keyakinan-keyakinan yang ditaati oleh para warganya. Mungkin juga terdapat aneka ragam keyakinan di luar keyakinan umum yang dipeluknya di dalam suatu sistem sosial. Akan tetapi hal itu tidaklah begitu penting. Dalam kenyataanya, keyakinan itu tidak musti benar. Yang penting, keyakinan tersebut dianggap benar atau tepat oleh warga yang hidup di dalam sosial yang bersangkutan. Misalnya, para anggota dari suatu aliran agama, mungkin percaya bahwa api, batu-batuan tertentu memiliki kekuatan gaib. Keyakinan termasuk unsur sangat penting dalam sistem sosial, sebab orang bertibgkah laku sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan yakini. Dan mereka tahu bahwa keterangan dan penilaian tertentu di dalam sistem sosialnya adalah mesti benar, tepat dan bak.

2. Perasaan (sentimen)

Unsur kedua ini mempunyai kaitan dengan unsur pertama, tetapi dari segi analitis keduanya mudah dipisahkan. Keyakinan menunjuk pada apa yang diketahui oleh para anggota dari sistem sosial tentang dunia mereka, sedangkan perasaan menunjuk pada bagaimana peraaan para anggota suatu sistem sosial tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat tertentu, tanpa memperdulikan cara mereka mempunyai perasaan semacam itu.

Perasaan sangat membantu menjelaskan pola-pola perilaku yang tidak bisa dijelaskan dengan cara lain. Dalam soal perasaan ini misalnya, dapat menjelaskan tentang sebab seorang ayah mau menghadapi bahaya apapun untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi dalam

kesempatan lain seorang juru bom tanpa ragu-ragu menjatuhkan bom di suatu tempat yang juga didiami oleh banyak anak-anak.

Proses elemental yang secara langsung membentuk perasaan adalah komunikasi perasaan. Hasil komunikasi itu lau membangkitkan perasaan, yang bila sampai pada tingkatan tertentu memang harus diakui.

3. Cita-cita, tujuan atau sasaran

Orang-orang yang berinteraksi pada lazimnya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Tujuan atau sasaran dari suatu sistem sosial, paling jelas bisa dilihat dari fungsi sistem-sistem itu sendiri. Misalnya, keturunan merupakan fungsi dari lembaga keluarga.

4. Norma

Norma-norma sosial dapat dikatakan merupakan patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Oleh para sosiolog, norma ini dipandang sebagai unsur yang paling kritis untuk memahami serta meramalkan aksi atau tindakan manusia di dalam menilai tingkah laku. Norma-norma menggambarkan tata tertib atau aturan-aturan permainan; dengan kata lain, norma memberikan petunjuk tentang standard untuk bertingkah laku di dalam menilai tingkah laku. Ketertiban atau keteraturan merupakan hasil ketaatan orang terhadap norma-norma dan niali merupakan unsur-unsur universal di dalam semua kebudayaan.

Wujudnya termasuk (1) folkways atau aturan di dalam melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh umum, akan tetapi sebetulnya tidak memiliki status paksaan atau keharusan, (2) moress, atau segala tingkah

laku yang menjadi keharusan, di mana setiap oramg wajib melakukan, dan (3) hukum, di dalamnya menjelaskan dan mewajibkan ditaatinya mores serta mengekang tingkah laku yang berada di luar ruang lingkup mores tersebut.

5. Kedudukan dan peranan

Status dapat didefinisikan sebagai kedudukan di dalam sistem sosial yang tidak tergantung pada para pelaku tersebut. Sedangkan peranan dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari satu status yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial. Norma-norma tersebut, sedikit banyak terintegrasi di dalam membentuk suatu peranan.

Semua sistem sosial, di dalamnya mesti terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti misalnya suami, istri, anak laki-laki atau perempuan. Hal ini merupakan akibat wajar dari adanya dua orang atau lebih di dalam setiap sistem sosial.

6. Kekuasaan

Kekuasaan sosial sebagai suatu konsep tidak mudah dirumuskan definisinya oleh para sosiolog. Dewasa ini, terdapat konsensus yang agak luas bahwa istilah tersebut harus digunakan untuk menunjuk pada "kapasitas untuk atau dalam menguasai orang lain". Kekuasaan seringkali dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu otoritatip dan non-otoritatip. Kekuasaan otoritatipselalu bersandar pada posisi status, sedangkan non-otoritatip seperti pemaksaan dan kemampuan mempengaruhi orang lain tidaklah implisit dikarenakan posisi-posisi status.

7. Tingkatan atau pangkat

Pangkat atau tingkat sebagai unsur dari sistem sosial dapat dipandang sebagai kepangkatan sosial (*social standing*). Pangkat

tersebut bergantung pada posisi-posisi status dan hubungan-hubungan peranan. Ada kemungkinan ditemukan orang-orang yang mempunyai pangkat bermiripan. Akan tetapi tidak ada sistem sosial manapun yang semua orang-orangnya berpangkat sama untuk selama-lamanya.

Setiap pelaku di dalam suatu sistem sosial secara terus-menerus menilai pelaku-pelaku lain untuk bisa menentukan pangkat antar mereka masing-masing. Jadi penilaian terhadap pelaku-pelaku merupakan proses elemental yang mendorong terjadinya keterlibatan tindakan di dalam unsur struktural dari kepangkatan. Sesudah diadakan penilaian oleh sesama pelaku, seorang individu tertentu diberi sutu status. Penilaian terhadap pemangku tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan keterampilan, pengalaman, pendidikan atau menggunakan kriteria lain baik penting maupun sepele.

8. Sanksi

Istilah sanksi digunakan oleh sosiolog untuk menyatakan tentang sistem ganjaran atau imbalan (reward) dan hukuman (punishment). Ganjaran dan hukuman tersebut ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku mereka supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sanksi positf mungkin meliputi hal-hal kecil seperti misalnya sepatah kata pujian dan mungkin juga berbentuk besar seperti pemberian hadiah uang jumlah yang banyak. Sebaliknya, sanksi negatif (hukuman), antara lain bisa berbentuk penurunan pangkat atau yang paling ekstrim, seseorang dihukum buang atau dihukum mati.

Penerapan sanksi dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan tingkah laku. Diberikan sanksi atau tidak terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran norma bergantung pada banyak faktor. Faktor paling penting adalah diketahui atau tidaknya pelanggaran itu sendiri oleh masyarakat. Bagaimanapun juga, setiap orang mesti terlibat di dalam penggunaan sanksi-sanksi pada sistem sosial tempat ia berada.

9. Sarana (facility)

Secara luas, sarana itu dapat dikatakan sebagai semua cara atau jalan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan sistem itu sendiri. Sarana itu mungkin berbentuk gedung, alat teknik apapun bentuknya, atau boleh jadi merupakan jangka waktu dilakukan pengawasan terhadap suatu pekerjaan, misalnya kapan, sesuatu pekerjaan itu harus selesai.

Bukan sifat dari sarana itu yang penting di dalam sistem sosial. Pusat perhatian para sosiolog terletak pada masalah penggunaan dari sarana-sarana itu sendiri. Penggunaan sarana itu dipandang sebagi suatu proses yang erat hubungannya dengan sistem-sistem sosial. Sebagai contoh, dalam dunia dewasa ini terdapat orang-orang yang tidak mau memakan daging babi, sapi atau kuda, padahal babi, sapi atau kuda hanya merupakan sarana, yaitu makan bagi banyak orang. Hal tersebut terjadi karena perbedaan nilai.

10. Tekanan-ketegangan

Dalam sistem sosial akan terdapat unsur-unsur tekanan dan ketegangan. Hal ini muncul karena tidak akan ada dua orang sekalipun yang mempunyai interprestasi persis sama mengenai peranan dan posisi status, di dalam suatu sistem sosial manapun. Sistem sosial akan mengalami tekanan apabila terjadi perbedaan interprestasi dan bila perbedaan itu berubah menjadi pola-pola tindakan.

Ketegangan merupakan wujud tingkah laku yang tidak bisa dipisahkan dengan tekanan. Sebab tekanan merupakan sumber timbulnya kekangan. Ketegangan tersebut erat dengan taraf kekangan yang diterima oleh seseorang dari seorang individu atau kelompok. Kekangan tersebut oleh pihak penekan dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan menyimpang terhadap norma. Pihak yang ditekan atau dikekang tentu saja menerimanya dengan ketegangan

Konflik, penyimpangan dan ketidakserasian timbul adanya tekanan-ketegangan dan hal itu mengakibatkan perpecahan (disorganization). Dengan kata lain, tidak ada satupun sistem sosial yang secara seratus persen teratur atau terorganisasikan dengan sempurna. Selamanya akan terdapat kepecahan dikarenakan tekanan. Suatu sistem sosial, sedikit banyak bisa dikatakan terorganisasi bergantung kepada besar-kecilnya unsur tekan-ketegangan yang diorientasikan kepada tujuan dari sistem itu sendiri.59

2. Unsur-unsur kebudayaan

Kebudayaan dari tiap-tiap bangsa atau masyarakat dapat dibagi ke dalam suatu jumlah unsur yang tak terbatas jumlahnya. Dari keseluruhan unsur-unsur yang merupakan suatu kebudayaan yang bulat itu dapat terdiri dari unsur-unsur besar dan unsur-unsur kecil. Sosiologi mengklasifikasi tiap kebudayaan menjadi beberapa macam unsur. Unsur-unsur pokok atau besar disebut culture universal, hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal artinya dijumpai pada setiap kebudayaan yang ada dipermukaan bumi ini.

Culture universal tersebut dapat dibagi lebih lanjut ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Akhirnya sebagai unsur terkecil dari unsur-unsur kebudayaan yang membentuk trait adalah sistem misalnya bajak sebagai unsur yang membentuk, trait dibagi kedalam alat-alat atau bagian-bagian kecil yang dapat dilepaskan, tetapi hakihatnya merupakan satu kesatuan.

Kelompok manusia yang sangat berkembang dari waktu ke waktu cepat maupun lambat akan mengalami perubahan. Kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan adalah kebutuhan ekonomi ini dari cara manusia memenuhi kebutuhan atau perkembangan. Dalam memanfaatkan sumber daya atau lingkungan manusia tidak melakukan

---

59 www.bonarsitimorang.com/2016/03/*unsur-unsur-sistem-sosial*.html

perubahan cara, mulai dari cara menanam kepada cara bercocok tanam sampai kepada pertanian dan peternakan dan akhirnya sampai mencapai tingkat industri modern.

Perubahan cara memenuhi kebutuhan tadi atau secara lebih sempit lagi perubahan proses produksi sudah pasti diikuti oleh perubahan-perubahan lainnya. Ke dalam perubahan-perubahan tadi termasuk perubahan struktur, perubahan nilai dan norma atau kaidah-kaidah. Kalau perubahan dalam masyarakat telah meliputi aspek-aspek struktur, nilai dan norma atau kaidah, lembaga-lembaga industri dan telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, maka pada masyarakat itu telah terjadi perubahan atau perkembangan kebudayaan. Perubahan atau perkembangan kebudayaan itu terjadi karena adanya faktor dari dalam dan dari luar.

1. Faktor dari dalam

Perkembangan akal budi dan daya kreasi anggota masyarakat dapat membawa perubahan dalam masyarakat itu. Rekaan dan penemuan yang terjadi dalam masyarakat baik yang berupa kebudayaan kebendaan, maupun yang berupa kebudayaan spiritual, dapat membawa perubahan pandangan dan penilaian terhadap segala yang ada pada masyarakat itu. Perubahan tadi sebelum dapat diterima oleh anggota-anggota masyarakat, harus melaluai proses yang panjang dan lama. Cepat lambatnya perkembangan dipengaruhi oleh sifat-sifat tradisional, konservatif, progresif, reaktif, aktif dan kematangan masyarakat yang bersangkutan.

2. Faktor dari luar

Perkembangan kebudayaan tidak hanya didorong oleh faktor yang berasal dari dalam. Karena kalau hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut tidak akan berjalan dengan cepat sesuai tuntutan zaman. Hal ini dapat dibuktikan pada masyarakat yang masih tertutup,

perubahan relatif kecil bila dibandingkan dengan perubahan pada masyarakat tang telah terbuka terhaap pengaruh luar. Oleh karna itu faktor-faktor yang berasal dari luar perlu mendapat perhatian pula. Faktor dari luar seperti: Akulturasi, Asimilasi dan Difusi

Bagian inti dari kebudayaan adalah nilai-nilai dan kosep-konsep dasar yang memberikan arah kepada berbagai tindakan, baik yang dapat, layak, atau harus dilakukan oleh warga suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut, maupun yang layak dihindari atau dicegahnya.

Bagian inti kebudayaan inilah yang perlu diinternalisasikan kepada anak didik sepanjang proses belajarnya. Seorang anak didik memang dibentuk untuk menjadi seorang yang terampil, berpengetahuan, dan berkemampuan kerja namun ia juga perlu dijadikan seseorang yang berpribadi utuh, yang hidup hati nuraninya, dan yang mempunyai kepekaan akan hal-hal yang indah dalam kehidupan ini.

Kebudayaan memberikan sukma kepada pembangunan. Pada jalur utama pembangunan itu kita kembangkan nilai-nilai budaya nasional yang bersifat serba menyongsong masa depan: nilai keilmiahan, nilai keterbukaan, dan demokrasi, nilai persaingan yang sportif untuk mencapai prestasi, nilai mementingkan perencanaan dan evaluasi dalam setiap pekerjaan, dan nilai-nilai lain yang searah dengan itu.

Apa yang ada dalam kebudayaan etnik lokal itu pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jatidiri bangsa serta nasional. Warisan budaya itulah yang membuat suatu bangsa merasa mempunyai akar. Disamping itu kesadaran sejarah, yaitu kesadaran akan perjalanan masa lalunya sebagai suatu rangkaian perjuangan atau eksplorasi untuk mengatasi masalah masalah sezaman, pun merupakan suatu topangan untuk menegakkan harga diri bangsa.

Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa dari zaman ke zaman bangsa indonesia mengalami berkali-kali proses akulturasi pada waktu berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan besar dari luar indonesia.

Masalah yang kita hadapi sebagai bangsa yang tetap menganggap relevan untuk memiliki jati diri ini adalah bagaimana kita secara terpadu dapat senantiasa mengadakan pilihan-pilihan yang tepat atas tawaran–tawaran nilai dari luar negara indonesia itu, yang disampaikan melalui media informasi yang dari waktu ke waktu berkembang semakin cepat dan semakin luas jangkauannya. 60

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya di Indonesia

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata "buddhi" yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.

Di samping kebudayaan ada kata kultur yang berasal dari bahasa Inggris *culture. Culture* berasal dari kata latin yaitu "*colere*" yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam. Selain kebudayaan ada kata "peradaban" para ahli sosioligi membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Peradaban dipakai untuk *technical skill* (keterampilan teknik) seperti kemampuan membangun bendungan, pembuatan gedung-gedung bertingkat, kapal-kapal laut dan pesawat-pesawat terbang.

Berhubung dengan masalah kebudayaan maka kita membedakan seorang yang dapat mengembangkan tekniknya, sehingga dapat membangun gedung-gedung bertingkat, mesin raksasa, robot, komputer dan sebagainya. Kebudayaan yang khusus yang terdapat pada suatu golongan dalam masyarakat, yang berbeda dengan kebudayaan

60 Edi Sedyawati, *KeIndonesiaan Dalam budaya,* (Jakarta: Wedatama widya sastra: 2007) hal. 41.

golongan masyarakat lain maupun kebudayaan seluruh masyarakat mengenai bagian yang tidak pokok dinamakan kebudayaan khusus.

Di daerah Indonesia yang luas terdapat macam-macam kebudayaan, yang satu berbeda dari yang lain di sebabkan oleh perjalanan yang berbeda. Sebagai mana diketahui, bahwa unsur sejarah yang menentukan perkembangan kebudayaan Indonesia itu terbagi dalam 5 lapis:

1. Kebudayaan Indonesia asli
2. Kebudayaan India
3. Kebudayaan Islam
4. Kebudayaan Modern
5. Kebudayaan Bhineka Tunggal Ika

1. Kebudayaan Indonesia asli

Tentulah kebudayaan Indonesia asli, sebelum kedatangan kebudayaan India adalah hasil pertumbuhan sejarah yang berbeda-beda di berbagai pulau dan bagian pulau di Indonesia yang luas ini. Di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah dan dalam hukum adat pun jelas kelihatan perbedaan yang nyata antara lingkungan hukum adat yang satu dengan yang lain, meskipun banyak perbedaannya antara penjelmaan kebudayaan yang satu dengan yang lain, ciri diri hakikat yang sama diantara kebudayaan-kebudayaan itu sedemikian banyak dan kenyataannya dapat kita menggolongkan sekaliannya pada dasar kebudayaan yang sama.

Seperti dalam kebudayaan yang bersahaja yang lain bangsa Indonesia sebelum datang kebudayaan India itu pun dapat dikatakan mempunyai cara berpikir yang kompleks, yaitu besifat keseluruhan dan emosional, yaitu amat dikuasai oleh perasaan. Kepercayaan kepada roh-roh dan tenaga-tenaga yang gaib meresapi seluruh kehidupan, baik kehidupan manusia secara individu, maupun kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan.

Ekonomi, Hukum, Pemerintahan, dan Kesenian bukanlah keaktifan manusia yang terpisah pisah, tetapi semuanya itu erat

hubungannya, dimana yang satu mulai dan yang satu berakhir serta semuanya berlaku di bawah naungan anggapan dan konsep-konsep agama. Demikian juga perkawinan, kelahiran dan kematian bukanlah kejadian atas diri manusia secara individu, tetapi seluruh masyarakat berkepentingan kepadanya dan oleh karnanya terikat kepada aturan masyarakat.

Ciri lain masyarakat Indonesia yang lama ialah berkuasanya nilai solidaritas. Susunan masyarakat merupakan persekutuan yang kecil yang hidup dalam desa atau mengembara dalam lingkungan daerah yang tentu. Persekutuan-persekutuan itu dapat kita bandingkan dengan repoblik demokrasi yang kecil, kepalanya dipilih oleh orang-orang keturunan cabang suku yang tertua yang mengatur segala keperluan dan kepentingan masyarakat itu dibantu oleh mejelis orang-orang yang tua dalam desa. Keputusan-keputusan yang penting diambil bersama-sama dengan musyawarah.

Salah satu ciri masyarakat Indonesia asli ialah besarnya pengaruh perhubungan darah. Persekutuan itu terjadi dari satu atau beberapa suku dan perhubungan di dalam maupun di antara suku-suku itu diatur oleh adat. Dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia asli terdapat beberapa corak susunan suku, yang menentukan cara menghitung keturunan, menentukan bentuk perkawinan, hak atas tanah, soal warisan, dan sebagainya.

Kehidupan ekonomi masyarakat yang kecil tentulah amat terbatas. Sebagian besar dari keperluan dan bahan-bahan keperluan manusia masih dapat diambil dengan mudah dari alam yang luas, baik untuk makanan maupun untuk keperluan yang lain seperti ramuan rumah, alat pembakaran, bermacam-macam perkakas, dan obat-obatan. Dalam hubungan ini, jelaslah bahwa baik pertanian maupun peternakan masih sangat terbatas. Orang masih sebagian besar mengambil saja dari sumber alam, baik air maupun darat yang sangat kaya. Dalam suasana ini, tiap-tiap keluarga atau suku atau desa itu dalam arti yang luas masih bersifat autarki.

Kalau kita simpulkan uraian tentang nilai-nilai kebudayaan Indonesia asli, dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu dikuasai oleh nilai agama, yang ikuti oleh nilai solidaritas (kebersamaan) dan nilai kesenian. Sedangkan sifatnya dalam demokrasi, nilai kuasa dalam susunan dalam masyarakat adalah lemah. Nilai ilmu lemah karna pemikiran yang belum berkembang, sedangkan perasaan masih terlampau berkuasa dalam menghadapi alam. Nilai ekonomi belum juga berkembang karna kekayaan alam belum timbul. Dalam hubungan ini, teknik tak dapat tumbuh karena orang masih terlampau terpengaruh oleh kepercayaan bahwa kecakapan dan kekuasaan yang sesungguhnya terletak pada yang gaib, baik berupa jiwa maupun berupa tenaga gaib.

2. Kebudayaan India

Pada permulaan kurun masehi bangsa Indonesia berkenalan dengan kebudayaan Hindu yang datang dari India, telah lebih maju dari kebudayaan Indonesia asli, tetapi pada pokoknya, kebudayaan Hindu itupun bulat bersahaja dalam arti bahwa dalam kebudayaan itu pun berkuasa agama berdasarkan cara berfikir, komplek dan emosional.

Dalam kebudayaan Indonesia asli pun susunan pikiran masih kabur dalam selubung mistis dan adat, di India lambat laun timbul pribadi-pribadi yang dengan sadar memikirkan dan mengatur dalam susunan pikirannya tentang roh-roh dan tenaga-tenaga yang gaib, tentang manusia dalam hubungan alam dan masyarakat, tentang bahasa, tentang bangunan-bangunan dan sebagainmya.

Dalam ajaran karma dan penitisan atau ingkarnasi kelihatan bahwa kepercayaan bangsa yang bersahaja kepada pengembaraan roh yang disebut animisme, dengan sangat berasio dipikirkan sehingga mendapat fungsi etik yang kuat dalam kehidupan. Mesti diakui, bahwa etik yang berasio dan kuat itu membantu memecah masyarakat India menjadi suatu hierarki evolusi inkarnasi berdasarkan kelahiran yang amat kaku, ia tak dapat mengubah nasibnya yang dibawanya waktu lahirnya. Dilihat dari suatu jurusan etik evolusi inkarnasi itu menjadi

tiang agung timbuknya suatu sistem kasta dan feodalisme, yang amat kukuh dan kaku, tidak dapat di ganggu gugat. Orang yang lahir pada tingkat kasta yang tinggi sebagai brahmana atau satria, tak dapat di ganggu gugat dalam kedudukannya berdasarkan kelahirannya.

Perkembangan rohani dan materi yang terjadi di India dalam 1000 tahun sebelum masehi yang memberi kedinamisan dalam kehidupan, itu harus dianggap sebagai dorongan dan sebab orang-orang India datang ke pulauan Indonesia sehingga kebudayaan India menjadi faktor yang penting dalam pembentukan kebudayaan Indonesia dan pengaruh itu berjalan lebih dari 1000 tahun lamanya.

Di Indonesia, sesungguhnya pada waktu itulah tumbuh hukum-hukum yang baru yang terpengaruh oleh hukum-hukum India yang mengatur soal-soal kerajaan yang besar. Semua itu sejalan dengan timbulnya suatu hirarki kepegawaian Negara yang menjalankan pemerintah dan memegang hukum puncak dari dari hirarki itu.

3. Kebudayaan Islam

Pada abad ke 14 masehi, bangsa Indonesia pula berkenalan dengan budaya baru yaitu, kebudayaan Islam atau kebudayaan Arab Islam. Seperti kebudayaan Indonesia asli dan hindu, kebudayaan Islam itupun berpusat kepada kepercayaan kepada tenaga yang gaib (Tuhan), yang dalam kebudayaan (Agama) Islam dinamakan Allah. Tetapi berbeda dengan animisme dan dinamisme kepercayaan kebudayaan Indonesia asli dan berbeda dengan hierarki dewa-dewa dan imanentisme kepercayaan kebudayaan India. Dalam kepercayaan Islam ada suatu jarak antara manusia, Allah, dan alam.

Dari ayat-ayat Alquran, kitab suci agama Islam, disimpulkan tentang perhubungaan Allah. Allah yang mah kuasa itu adalah asal dan pencipta segala sesuatu. Dicipkakannya alam semesta dan diaturnya segala sesuatu menurut rencana-Nya dan hukum-Nya. Diciptakannya matahari dan bintang-bintang, diaturnya hujan agar membasahi tanah

dan lain-lain. Allah adalah yanng menciptakan, menumbuhkan, memelihara serta menjaga segala bentuk dan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Dalam perkembangan Islam yang cepat sesudah abad pertama hijrah, dalam waktu yang pendek, kebudayaan Islam berkenalan dengan filsafat kebudayaan yunani kuno dengan perantaraan terjemahan yang dibuat kedalam bahasa arab. Dengan demikian, kebudayaan Islam menjadi pewaris filsafat dan ilmu-ilmu yang bukan hanya diulang-ulang saja, tetapi terus ditumbuhkan dengan pemikiran dan penyelidikan yang bebas, yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam maupun oleh pemeluk agama Kristen dan Yahudi yang hidup dalam suasana kebebasan kebudayaan Arab-Islam.

4. Kebudayaan modern

Kebudayaan modern ini dapat juga disebut kebudayaan modern Eropa Amerika dan haruslah kita anggap bermula pada zaman Renaissance. Ini terletak pada zaman yunani yang kira-kira lima abad sebelum masehi melepaskan diri mereka dari suasana kebudayaan ekspresif yang dikuasai oleh mitos agama dan mulai berpikir dengan bebas tentang alam semesta dengan penyelidikannya secara teratur berdasarkan tenaga pikiran dan pancaindera. Kebudayaan Yunani ini tersebar, baik ke arah Asia maupun ke arah Eropa, tetapi terutama sekali di sekitar Lautan Tengah. Bangsa Romawi dapat dianggap sebagai pewarisnya yang pertama, tetapi tidaklah banyak benar yang dapat ditambahkan oleh bangsa Romawi tentang hal filsafat dan kepada warisan kebudayaan Yunani itu. Sumbangan bangsa Romawi terletak dalam nilai kekuasaan yang berupa organisasi pemerintah dan pembentukan hukum hal kemiliteran dan teknologi. Agama Kristen pun sekedarnya menerima pengaruh dari kebudayaan Yunani itu.

Sebagaimana diuraikan terdahulu bagaimana usaha menyatukan kepercayaan dan konsep-konsep agama Islam dengan warisan Yunani

itu, selain daripada memberikan kemajuan filsafat dan ilmu yang amat sangat tinggi pada kebudayaan Islam.

Manusia lambat laun bertambah lama bertambah percaya kepada rasio atau tenaga berpikirnya, serta kesanggupannya untuk mengets an menguasai alam sekitarnya. Kebenaran agama yang di wahyukan terus menerus akan mendapat serang dari ahli-ahli pikir, seperti Giordano Bruno, Copernicus, serta Galileo dan lain-lain dalam abad ke-16 dan ke-17. Dalam abad-abad berikutnya perjuangan itu di teruskan oleh Linaeus, Darwin, Marx, dan Freud. Dalam abad ke-19 kekuasaan gereja telah amat berkurang sehingga dapatlah Darwin mengumumkan pikiran-pikirannya dengan tidak membahayakan jiwanya seperti rekan-rekannya yang lain, justru abad ke-18 hal itu tidak mengherankan lagi, karna antara Darwin dan Renaissans terdapat zaman Aufklaerung.

Dapat kita simpulakn bahwa citi-ciri terpenting dari pada Ilmu Modern ialah kekuatan disiplin, cara berpikir dan penyelidikannya yang menuju pengetahuan positif dan teliti.

5. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika

Setelah kita mengikuti sejarah kebudayaan Indonesia dengan perurutan keempat kebudayaan yang berbeda-beda konfigurasinya, dapatlah kita sekarang memahami kesatuan kebudayaan Indonesia dengan bermacam-macam penjelmaannya yang biasanya kita sebut Bineka Tunggal Ika. Seiring dengan kemajuan zaman serta teknologi yang canggih, Indonesia bangkit menjadi negara berkembang yang semakin lama semakin tumbuh menjadi negara maju dan ini merupakan salah satu perkembangan zaman yang sangat cepat yang sering disebut dalam bahasa sosiologi sebagai revolusi seperti dalam al-qur'an yang terdapat dalam surat yaasin ("wassyamsu tajrii limustaqarrillaha dzaalika taqdiirul azizi al-'aliem") yang artinya" dan matahari berjalan di tempat peredarannya demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui"(Q.S. Yaasin: 38) Hilangnya budaya indonesia secara bertahap di akibatkan karena adanya perubahan sosial yang terjadi

dalam masyarakat, faktor yang terjadi dalam masyarakat maupun luar masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat dapat berupa penemuan baru, atau pertentangan dari masyarakat itu sendiri. Faktor yang berasal dari luar masyarakat dapat berupa adanya pengaruh budaya dari masyarakat lainnya.

Menurut Soekanto faktor-faktor penyebab perubahan/ dinamika sosial dibagi menjadi dua golongan besar, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, antara lain sebagai berikut:

a. Bertambah atau berkurangnya penduduk

Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat seperti munculnya kelas sosial yang baru dan profesi yang baru. Selain itu pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan- kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Padahal sumbersumber pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, sehingga akan imbul masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain.

Kondisi ini akan mengubah pola interaksi dan meningkatnya mobilitas sosial. Selain itu, berkurangnya penduduk yang diakibatkan oleh migrasi dan urbanisasi akan mengakibatkan kekosongan dalam pembagian kerja dan jumlah angkatan kerja, sehingga akan memengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

b. Adanya Penemuan baru (discovery)

Penemuan baru dalam masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

c. Pertentangan (konflik) masyarakat

Dalam interaksi sosial di masyarakat yang heterogen dan dinamis, pertentangan-pertentangan (konflik) mungkin saja terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Apalagi pada masyarakat yang berkembang dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern akan selalu terjadi pertentangan, misalnya golongan muda yang ingin mengadopsi budaya asing, golongan tua yang tetap mempertahankan tradisi lama. Konflik ini akan menimbulkan perubahan nilai-nilai, pola perilaku dan interaksi yang baru di masyarakat tersebut.

d. Terjadinya pemberontakan (revolusi)

Revolusi adalah perubahan yang sangat cepat dan mendasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Revolusi akan berpengaruh besar pada struktur masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pengaruh tersebut mulai dari lembaga negara sampai keluarga yaitu mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Contohnya revolusi industri di Inggris, revolusi Perancis, revolusi fisik tahun 1945 di Indonesia.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat, antara lainberikutini:

1. Lingkunganalamfisik

Salah satu faktor penyebab perubahan yang bersumber dari lingkungan alam seperti terjadinya bencana alam banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, dan sebagainya. Di daerah yang terkena banjir menyebabkan masyarakat yang berada di sekitar daerah tersebut terpaksa harus mencari tempat tinggal baru, sehingga mereka harus

menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga masyarakat.

2. Peperangan

Peperangan antara negara satu dengan negara yang lain kadang bisa menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakatnya. Biasanya negara yang menang memaksakan nilai-nilai, cara-cara, dan lembaga yang dianutnya kepadanegarayangkalah.

Contohnya rakyat Indonesia saat kalah melawan Belanda. Belanda memaksakan penerapan sistem pemerintahan kolonial menggantikan sistem pemerintahan kerajaan yang dianut sebagian besar daerah-daerah di Indonesia. Hal itu berakibat terjadinya perubahan-perubahan pada struktur lembaga kemasyarakatan.

3. Pengaruh kebudayaan lain

Di era globalisasi ini tidak ada satupun negara yang mampu menutup dirinya dari interaksi dengan bangsa lain. Interaksi yang dilakukan antara dua negara mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh lain kadang juga bisa menerima pengaruh dari masyarakat lain. Dengan demikian akan timbul suatu nilai-nilai sosial budaya yang baru sebagai akibat asimilasi atau akulturasi kedua budaya. Dalam kaitannya dengan pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dikenal istilah-istilah sebagai berikut:

a. Akulturasi (culturalcontact)

Akulturasi adalah suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, yang lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur/menyatu ke dalam kebudayaan sendiri (asli), tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama.

Hal-hal yang biasa terjadi dalam akulturasi seperti berikut:

- Substansi, yaitu unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti, dan melibatkanperubahanstrukturalyangkecilsekali.
- Sinkretisme, yaitu unsur-unsur lama bercampur dengan yang baru dan membentuk sistem yang baru.
- Adisi, yaitu unsur-unsur baru ditambahkan kepada unsur yang lama.
- Dekulturasi, yaitu hilangnya bagian substansial sebuah kebudayaan.
- Orijinasi, yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhansituasiyangberubah.
- Rejection (penolakan), yaitu perubahan yang sangat cepat, sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, menyebabkan penolakan, pemberontakan, dan gerakan pembangkitan.

b. Difusi

Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain, dari orang ke orang lain, dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Manusia dapat menghimpun pengetahuan baru dari hasil penemuan-penemuan.

c. Penetrasi

Penetrasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing secara paksa, sehingga kebudayaan lama kalah. Apabila kebudayaan baru seimbang dengan kebudayaan lama, masing-masing kebudayaan hampir tidak mengalami perubahan atau tidak saling memengaruhi. Hal yang demikiandisebuthubungansymbiotic.

d. Invasi

Invasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat, dengan peperangan (penaklukan) bangsa asing terhadapbangsalain.

e. Asimilasi

Asimilasi adalah proses penyesuaian (seseorang/ kelompok orang asing) terhadap kebudayaan setempat. Dengan asimilasi kedua kelompok baik asli maupun pendatang lebur dalam satu kesatuan kebudayaan.

f. Hibridisasi

Hibridisasi adalah perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh perkawinan campuran antara orang asing dengan penduduk setempat.

g. Milenarisme

Milenarisme adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah.

h. Adaptasi

Adaptasi adalah proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organisme pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organisme (penyesuaian dua arah).

i. Imitasi

Imitasi adalah proses peniruan kebudayaan lain tanpa mengubah kebudayaan yang ditiru

DAFTAR PUSTAKA

Haryanto, Sidung, *Spektrum Teori Sosial dan Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.

Abdullah, taufik. *Ilmu Sisial dan Tantangan Zaman.* Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006.

Suparlan, Persudi. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta: Rajawali. 1984.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Penerapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012

Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.2011

Nasikun, Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.2009

http:// massofa.wordpress.com/2008/10/21/pengertian-tujuan-dan-ruang-lingkup ilmu budaya dasar.html.

Hoselitz, F Bert. *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial Sebuah Kajian Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.2011

Heriyanto, Winarto. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara: 2016

www.bonarsitumorang.com/2016/03/unsur-unsur-sistem-sosial.html.

BAGIAN 6

EKONOMI DAN ISLAMIC ENTERPRENEURSHIP, LAPANGAN KERJA TERHADAP LULUSAN PONDOK PESANTREN

A. Latar Belakang

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian lembaga pendidikan nasional, kemunculan pesantren dalam sejarahnya telah berusia puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, dan disinyalir sebagai lembaga yang memiliki kekhasan, keaslian (*indegeneous*) Indonesia.[61] Sebagai institusi *indegeneous*, pesantren muncul dan terus berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat di sekitar lingkungannya. Akar kultural ini barangkali sebagai potensi dasar yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah.

Pesantren sebagai sebuah institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak

61 Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 3.

awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren hanya memposisikan dirinya sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berusaha melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan kepadanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diembannya, yaitu: (1) sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*centre of exellence*), (2) sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), (3) sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).[62] Selain ketiga fungsi tersebut pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah perubahan yang terjadi.

Dalam keterlibatannya dengan peran, fungsi, dan perubahan yang dimaksud, pesantren memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksionis-kultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian harus diakui, belum semua potensi besar yang dimiliki pesantren tersebut dimanfaatkan secara maksimal, terutama yang terkait dengan konstribusi pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat.

Pada batas tertentu pesantren tergolong di antara lembaga pendidikan keagamaan swasta yang *leading*, dalam arti berhasil merintis dan menunjukkan keberdayaan baik dalam hal kemandirian penyelenggaraan maupun pendanaan (*self financing*). Tegasnya selain menjalankan tugas utamanya sebagai kegiatan pendidikan Islam yang bertujuan regenerasi ulama, pesantren telah menjadi pusat kegiatan

---

62 Suhartini, Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren, dalam A. Halim et. al. (*eds*). *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 233.

pendidikan yang konsisten dan relatif berhasil menanamkan semangat kemandirian, kewiraswastaan, semangat berdikari yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain.[63]

Pengembangan ekonomi masyarakat pesantren mempunyai andil besar dalam menggalakkan wirausaha. Di lingkungan pesantren para santri dididik untuk menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha.[64] Pesantren giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah swasta. Secara kelembagaan pesantren telah memberikan tauladan, contoh riil (*bi al-haal*) dengan mengaktualisasikan semangat kemandirian melalui usaha-usaha yang konkret dengan didirikannya beberapa unit usaha ekonomi mandiri pesantren. Secara umum pengembangan berbagai usaha ekonomi di pesantren dimaksudkan untuk memperkuat pendanaan pesantren, latihan bagi para santri, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perubahan dan pengembangan pesantren terus dilakukan, termasuk dalam menerapkan manajemen yang profesional dan aplikatif dalam pengembangannya. Karena istilah manajemen telah membaur ke seluruh sektor kehidupan manusia.[65] Di antara pengembangan yang harus dilakukan pesantren adalah, pengembangan sumber daya manusia pesantren, pengembangan komunikasi pesantren, pengembangan ekonomi pesantren, dan pengembangan teknologi informasi pesantren.

---

63 Habib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 52.

64 Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 95.

65 Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Grha Guru, 2004), hal. 15-16.

B. Entrepreneurship Dalam Islam

Sejarah Islam mencatat bahwa Entrepreneurship telah dimulai sejak lama, pada masa Adam AS. Dimana salah satu anaknya Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qobil berwirausaha dengan menggembala hewan ternak. Banyak sejarah nabi yang menyebutkan mereka beraktivitas di kewirausahaan, sebagian dari mereka berwirausaha di sektor pertanian,peternakan, kerajinan dan bisnis perdagangan.Contoh yang paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW, awalnya beliau terlibat di bisnis dengan memelihara dan menjual domba, kemudian membantu bisnis pamannya dan akhirnya me-manageri bisnis saidatina, khadijah.

Istilah kewirausahaan mulai dipopulerkan sejak tahun 1990. Sebelum itu istilah kewirausahaan atau *entrepeneur* (Bahasa Perancis) adalah lebih populer yang artinya orang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum tahu dengan harga berapa barang itu akan di jual.

Kemudian kewirausahaan dipersamakan dengan *entrepeneurship* atau wirausaha diartikan berbeda beda namun pada prinsipnya maksud dan ruang lingkupnya sama. Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Wirausaha berasal dari kata ***Wira*** artinya berani, utama, mulia. ***Usaha*** berarti kegiatan bisnis komersil maupun non komersil. Jadi kewirausahaan di artikan secara harfiah sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis maupun non bisnis secara mandiri.

Kewirausahaan berasal dari istilah *entrepeneurship* yang sebenarnya berasal dari kata *entrepeneur* (Soeparman Soemahamidja 1977:2) yang artinya suatu kemampuan (*ability*) dalam berfikir kreatif dan berprilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam pengertian ini Marzuki Usman (1997:3) mengatakan *entrepeneur* adalah seorang yang memiliki kombinasi unsur elemen internal yang meliputi kombinasi inovasi, visi, komunikasi, optimisme,

dorongan semangat dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. Pendapat lain mengatakan kewirausahaan (*entrepeneurship*) muncul apabila seorang berani mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide barunya. Proses kewirausaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha, oleh sebab itu wirausaha adalah orang yang memperoleh peluang dan menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang itu (Bigrave,1995).[66]

Saat ini istilah "kewirausahaan (*entrepreneurship*)" dan "kewirausahaan korporasi (*intrapreneurship*)" banyak dipakai dalam literatur dan diskusi manajemen. *Intrapreneurship* berawal dari fenomena produksi di Amerika yang lahir berkat kontribusi dari beberapa figur nasional Amerika yang membangun perusahaan besar sebagaimana menciptakan seorang *entrepeneur*, misalnya : James Ling dari LTV, J.B. Fuqua dari Industri Fuqua dan Charles Thornton dari Industri Litton (Luchsinger & bagby, 1987).

Secara garis besar, penelitian *entrepreneurship* dapat dibagi menjadi tiga kategori (Stevenson & Jarillo, 1990):

1. Dampak *entrepreneurship*; apa yang terjadi jika seseorang bertindak sebagai *entrepreneurs*.
2. Penyebab *entrepreneurship*; mengapa seorang *entrepreneurs* bertindak seperti itu.
3. Manajemen *entrepreneurial* bagaimana seorang *entrepreneurs* bertindak.

Kata "wirausaha" atau dalam bahasa inggris "*entrepreneur*" merupakan kata yang berasal dari bahasa perancis yang berarti "to undertake", yang mempunyai arti "mengambil". Definisi "kewirausahaan" mengalami perubahan terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Schumpeter (1949) dalam tulisan Luchsinger &

---

66 Aris Dwi Cahyono, *Kewirausahaan (Penanaman Jiwa Kewirausahaan),* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hal.3.

Bagby (1987) menjelaskan bahwa wirausahawan (*entrepreneur*) adalah seseorang yang berani mengambil risiko, berinisiatif, dan tidak tergantung pada orang lain. Vesper (1980) menyatakan bahwa tipe seorang *entrepreneur* adalah solo self employed individuals, team builders, independent innovators, pattern multiplier, economy scale exploiters, acquirers conglomerators, dan speculators (luchsinger & Bagby, 1987).

Menurut Erkkila (1990), *entrepreneur* sebaiknya dipandang sebagai orang yang memiliki sifat sebagai berikut.

Gambar 1.1 sifat *Entreprenurship*
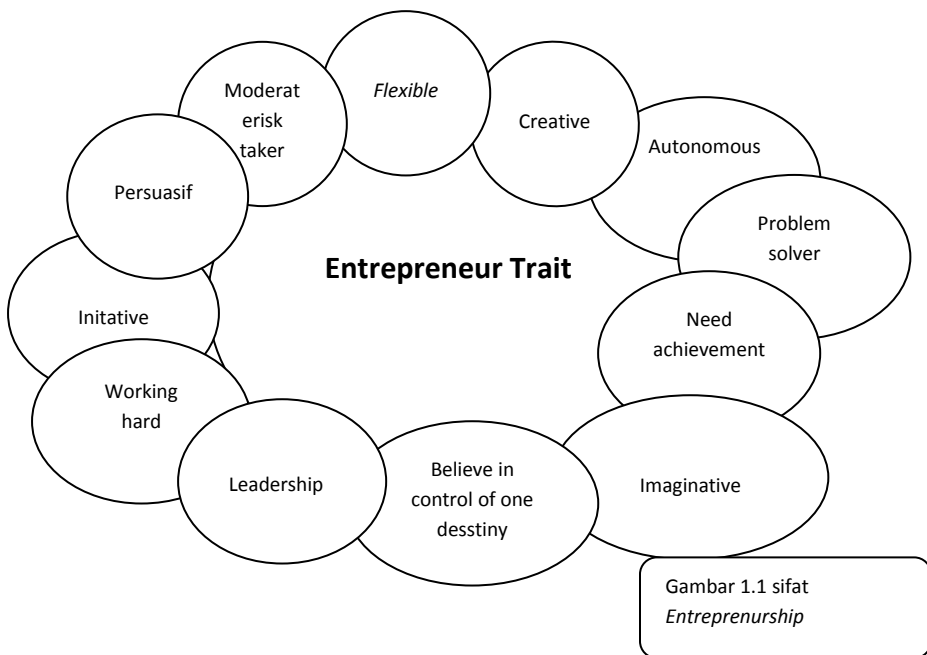
Menurut *Gundry dan Kickul* (2007), kewirausahaan (*entrepeneurship*) adalah pengidentifikasi dan pengeksploitasi kesempatan yang belum tereksploitasi. Jadi, hal ini dapat diumpamakan sebagai sebuah perjalanan yang diwajibkan seorang individu atau grup untuk beraksi atau bertindak baik dalam hal menemukan, mengevaluasi, serta mengeksploitasi kesempatan yang ada dalam produksi barang,

jasa, atau proses baru yang efektif, sehingga dapat berkompetisi di pasar.

Dari berbagai pendapat diatas, secara umum wirausahawan (*entrepeneur*) dapat didefinisikan sebagai seseorang mengorganisasikan, mengatur dan memperkirakan risiko dari bisnis atau usaha.[67] Kata *entrepreneur* yang dahulunya sering diterjemahkan dengan kata kewiraswataan akhir-akhir ini diterjemahkan dengan kata kewirausahaan. *Entrepreneur* berasal dari bahasa prancis yaitu *entreprendre* yang artinya memulai atau melaksanakan. Wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. Wirausahawan adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Sedangkan, wiraswasta atau wirausaha berasal dari kata : Wira yang berarti utama, gagah berani, luhur, swa yang berarti sendiri, sta yang berarti berdiri, usaha yang berarti kegiatan produktif. Dari asal kata tersebut, wiraswasta pada mulanya ditujukan pada orang-orang yang dapat berdiri sendiri.

Menurut Hisrich, Peters, dan Sheperd (2008) mendifinisikan kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta resiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi.68

Kata wirausaha atau “pengusaha” diambil dari bahasa prancis”*entrepreneur*” yang pada mulanya berarti pemimpin musik atau pertunjukan dalam ekonomi, seorang pengusaha berarti orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan peluang secara berhasil.[69]

---

67 Wawan Dhewanto, *Intrapreneurship : Kewirausahaan Korporasi* (Bandung: Rekasaya Sains, 2013), hal.15.
68 Susatyo Herlambang, *Entrepreneurship Untuk Kesehatan,* (Yogyakarta: Gosyen publishing, 2012), hal. 5.
69 Dani Garjito, *Berani Berwirausaha,* (Yogyakarta: Akmal Publishing, 2014), hal. 6.

1. Konsep Entrepreneurship dalam pandangan Islam

a. Syumul (terintegrasi) yang berarti entrepreneurship tidakterpisah atau terisolasi dari islam itu sendiri, justru entrepreneurship berada dalam sistem Islam (aqidah, syariah, akhlak & etika) supaya kegiatanberwirausaha tidak terasing dari kewajiban-kewajiban lain di dalam islam.

b. Berniaga di dunia tetapi punya hubungan dengan agama dan kehidupan di akhirat. Dunia Untung, Akhirat Untung

c. Sebagai agama untuk kesejahteraan dunia dan akhriat, Islam memandang tinggi kegiatan kewirausahaan ini.

   Dalil hadist Nabi : sesungguhnya 9/10 sumber rejeki diperoleh melalui perniagaan. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs:2:275)

d. Dengan niat dan cara yang diridhoi Allah, berwirausaha menjadi salah satu ibadat dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah karena ia menyumbang kepada sumber rejeki individu dan keluarga. Dengan memenuhi keperluan masyarakat baik dengan barang/jasa dianggap sebagai penunaian Fardhu kifayah dengan jalan memenuhi salah satu barang/jasa keperluan masyarakat.

2. Definisi Entrepreneurshi (E/ship) dalam Islam

Kewirausahaan adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat:

a. Kewirausahaan dianggap sebagai jihad fii sabilillah (strong efforts to do good things in the name of Allah)

b. Entrepreneur dianggap sebagai amal Sholeh (good deeds) karena kegiatan e/ship menyediakan pendapatan kepada individu, menawarkan kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga

mengurangi kemiskinan. Dimana kemiskinan adalah salah atu dari persoalan sosial.

c. E/ship juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan melakukan kebajikan melalui E/ship, akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara individu dan individu serta akan membantu menjaga hubungan yang lebih baik antara individu dengan tuhannya.

d. Meningkatkan kualitas hidup, hidup lebih nyaman menguatkan kedudukan socio-econimic negara, agama dan bangsa.

e. Membantu mengembangkan khairun ummah (masyarakat terbaik, yang produktif dan maju (progreessive)

3. Pedoman utama dalam kewirausahaan islami

Agar kegiatan kewirausahaan dianggap sebagai "ibadah":

a. Tetap melakukan Ibadah, Shalat, dan Puasa dan ibadah-ibadah lain di antara kesibukan sebagai entrepreneur.

b. Hindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah.

c. Pelajari sikap seorang pengusaha muslim yang baik.

d. Bisnis yang baik perencanaan strategi (tidak pergi dari ajaran Islam).

e. Mengetahui aturan (hukum) bermuamalah secara islami.

4. Manajemen Kewirausahaan Kependidikan

Istilah "kewirausahaan" dalam manajemen kewirausahaan menurut Thompshon dan Riccuci, sebagaimana dikutip oleh Fadel Muhammad menunjukkan makna manajemen yang dilandasi "*enterprise culture*", atau yang dilandasi oleh karakter "*risk culture*".[70] Dalam

70 Fadel Muhammad, *Reinventing Local Government Pengalaman dari Daerah* (Jakarta: PT Elex Media Computindo, Compas Gramedia, 2008), hal. 24.

perkembangannya, makna kewirausahaan tidak hanya diterapkan pada sektor swasta tetapi juga pada sektor publik dan sektor pendidikan.

Pada sektor publik, makna tersebut terus berkembang dengan munculnya pemikiran tentang *public entrepreneurship* yaitu proses penciptaan nilai bagi warga negara dengan mengkombinasikan sumber daya publik dan atau swasta dan memanfaatkannya untuk mendapatkan *social opportunities*. Makna ini diilhami oleh konsep yang telah berkembang sejak tahun 1980-an seperti *social*, *political*, *and policy entrepreneur*. Makna kewirausahaan ini menuntut adanya *public sector entrepreneurship* yang menjelaskan jenis-jenis perilaku entrepreneurial yang harus ditunjukkan oleh sejumlah aktor politik dan pemerintahan.[71]

Manajemen kewirausahaan dalam lembaga pendidikan merupakan substansi manajemen pendidikan ekstensi yang mempunyai peran penting untuk bersama-sama substansi manajemen pendidikan inti mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kewirausahaaan dalam lembaga pendidikan mengandung dua pengertian dan penerapan, yaitu:

a. Upaya menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam mengelola lembaga pendidikan.

b. Memanfaatkan potensi yang dimiliki/dapat diupayakan oleh suatu lembaga pendidikan menjadi kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk memajukan lembaga pendidikan yang bersangkutan.[72]

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa fungsi-fungsi manajemen mencakup beberapa aktifitas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Begitu pula dengan

---

71 *Ibid.*, hal. 24-25.

72 Sulton, Manajemen Kewirausahaan Kependidikan dalam Ali Imron at. al. (ed), *Manajemen Pendidikan Analisis Subtantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), hal. 233.

manajemen kewirausahaan kependidikan, aktifitas manajerialnya sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut.[73]

Nilai-nilai kewirausahaan dalam lembaga pendidikan menjadi isu baru yang selalu digalakkan pemerintah. Dalam faktanya, di antara lembaga pendidikan yang telah banyak mengembangkan unit usaha adalah pesantren. Keberhasilan pesantren dalam mengembangkan unit usaha ini tentunya didukung oleh beberapa faktor, di antaranya semangat entrepreneur seorang kiai, manajemen pengembangannya dan networking yang dibentuk oleh pesantren tersebut.

5.Tinjauan Umum tentang Kewirausahaan

a. Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahaan dan Perdagangan dalam pandangan islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah mu'amalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan di pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan untuk berusaha mencari rizki (QS.Al-Mulk:15) Semangat kewirausahaan diantaranya terdapat dalam (QS. Hud: 61), dan (QS. Al-Jumuh:10), dimana manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan untuk berusaha mencari rizki. Semangat kewirausahaan terdapat dalam Al-Qur'an yang akan di uraikan sebagai berikut, (QS.Hud: 61), yang artinya : "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat

73 Justin G Longenecker, dkk, *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil,* Buku 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 486-487.

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS.Al-Mulk:15), yang artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.“ (QS. Al-Jummuah) 10 yang artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Baqarah: 275) yang artinya : “…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“. Konsep kewirausahaan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum beliau menjadi Rasul. Rosulullah telah memulai bisnis kecil-kecilan pada usia kurang dari 12 tahun dengan cara membeli barang dari suatu pasar, kemudian menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan agar dapat meringankan beban pamannya. Bersama pamannya, Rasulullah melakukan perjalanan dagang ke Syiria. Bisnis Rasulullah terus berkembang sampai kemudai Khadijah menawarkan kemitraan bisnis dengan sistem profit sharing. Selama bermitra dengan Khadijah, Rasulullah telah melakukan perjalanan ke pusat bisnis di Habasyah, Syiria dan Jorash (Ermawati, n.d.). Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan wirausaha. Banyak ditemukan ayat atau hadits yang mendorong umat Islam untuk berwirausaha, misalnya keutamaan berdagang seperti disebutkan dalam hadits yang artinya: “Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rizki (HR. Ahmad). Kemudian Pernah Nabi ditanya Oleh para sahabat: ”pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah ?”beliau menjawab “Seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.”(HR. Al Bazzar). Oleh karena itu, “..apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rizki) Allah” (QS. al-Jumu’ah: 10). Perjalanan bisnis Rosulullah selama bertahun-tahun memberikan hikmah tentang bagaimana unsur-unsur manajemen usaha Rasulullah SAW. Bahkan dalam aktifitas penggembalaan kambing yang dilakukan oleh Rosulullah terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung yaitu: pendidikan rohani, latihan merasakan kasih sayang kepada kaum lemah, serta kemampuan mengendalikan pekerjaan berat dan besar.

Antonio (2007) mengungkapkan hikmah dari kegiatan menggembala kambing terhadap unsur-unsur manajemen adalah sebagai berikut: (1) Pathfinding (mencari) Mencari padang gembalaan yang subur, (2) Directing (mengarahkan) Mencari padang gembalaan yang subur, (3) Controlling (mengawasi) kambing Agar tidak tersesat atau terpisah dari kelompok, (4) Protecting (melindungi) kambing gembalaan dari hewan pemangsa dan pencuri, (5) Reflecting (perenungan) alam, manusia dan Tuhan. Trim (2009) mengungkapkan bahwa kredibilitas dan kapabilitas Nabi Muhammad SAW terdapat dalam empat karakter unggulnya, yaitu FASTI (*Fathonah*, *Amanah*, *Shiddiq dan Tabligh*) ditambah faktor I, yaitu *Istiqomah*.

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau suatu kegiatan yang mengarah pada pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangkap memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.[74] Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.[75]

b. Ciri-Ciri yang Perlu Dimiliki Wirausaha

Menurut John Hornaday, sebagaimana yang dikutip oleh Winardi, ciri-ciri wirausahawan yang berhasil adalah mereka yang memiliki sifat-sifat: kepercayaan pada diri sendiri (*self-confidence*), penuh energi, dan bekerja dengan cermat, kemampuan untuk menerima resiko yang diperhitungkan, memiliki kreativitas, fleksibilitas, reaksi positif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, jiwa dinamis dan jiwa

---

74 Sulton, Manajemen Kewirausahaan Pendidikan, dalam Ali Imron, et. al (ed), *Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan,* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), hal. 233.

75 W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. 2 Cetakan 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 1012.

kepemimpinan, kemampuan bergaul dengan orang lain, kepekaan untuk menerima saran-saran dari orang lain, menerima kepekaan terhadap kritik-kritik yang dilontarkan terhadapnya, memiliki pengetahuan (memahami) pasar, dan keuletan serta kebulatan tekad untuk mencapai sasaran-sasaran (*perseverance*, *determination*), banyak akal (*resourcefulness*), rangsangan/kebutuhan akan prestasi, inisiatif, memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri (*independent*) dan pandangan tentang masa yang akan datang (*foresight*), berorientasi pada laba, memiliki sikap perseptif (*perceptivness*), berjiwa optimisme, memiliki keluwesan (*versatility*) dan pengetahuan/pemahaman tentang produk dan teknologi.[76]

Lebih rinci Ahmad menyebutkan bahwa seorang wirausaha selalu tidak merasa puas dengan kesuksesannya. Mereka akan selalu memperbaiki kinerjanya dari segi kualitas dan kuantitas serta mengungguli kemampuan dan kerja orang lain.[77] Ketidakpuasan ini mendorong wirausaha tersebut berusaha lebih giat dan bersungguh-sungguh untuk mencapai standar yang ditetapkan olehnya dan standar orang lain. Hal ini akan mendorong wirausaha untuk terus belajar tanpa mengenal batas.

c. Pengembangan Wirausaha dan Penyelenggaraan Unit Usaha Ekonomi di Pesantren

Berpedoman pada anggapan dasar bahwa tidak semua lulusan atau alumni pesantren akan menjadi ulama atau kiai, dan memilih lapangan pekerjaan di bidang agama, maka keahlian-keahlian lain seperti pendidikan ketrampilan perlu diberikan kepada santri sebelum santri itu terjun ke tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya. Di pihak lain, guna menunjang suksesnya pembangunan, diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk pihak pesantren sebagai suatu

76 J. Winardi, *Entrepreneur*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 27-28.
77 Nor Aishah Buang dan Isteti Murni, *Prinsip-Prinsip Kewirausahaan Konsep, Teori, Model Pembentukan Wirausaha* (Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: 2006), hal. 13.

lembaga yang cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat ini merupakan potensi yang dimiliki oleh pesantren secara historis dan tradisi. Urgensi pengelolaan dan pengembangan mengingat banyaknya potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren. Potensi ekonomi yang dimiliki pesantren adalah:[78]

1.Kiai-Ulama

Kiai-ulama pesantren yang dipandang sebagai potensi pesantren yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya dapat kita lihat pada tiga hal:

a. Kedalaman ilmu kiai-ulama. Artinya, figur seorang kiai merupakan magnet (daya tarik) yang luar biasa bagi calon santri untuk berburu ilmu.

b. Pada umumnya, seorang kiai adalah tokoh panutan masyarakat dan pemerintah. Ketokohan seorang kiai ini memunculkan sebuah kepercayaan, dan dari kepercayaan melahirkan akses.

c. Pada umumnya, seorang kiai sebelum membangun pesantren telah mandiri secara ekonomi, misalnya sebagai petani, pedagang, dan sebagainya. Sejak awal kiai telah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, tidak hanya dari aspek mental, tetapi juga sosial ekonomi. Jiwa dan semangat entrepreneurship inilah yang mendasari kemandirian perokonomian pesantren. Apabila aset dan jiwa entrepreneurship ini dipadukan, maka hasilnya dapat dijadikan dasar membangun tatanan ekonomi pesantren.[79]

78 A. Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren, dalam A. Halim, et. al*. (ed), *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 223.
79 *Ibid.,* hlm. 223.

2. Santri

Potensi ekonomi kedua yang melekat pada pesantren adalah para santri. Hal ini dipahami bahwa pada umumnya santri mempunyai potensi/bakat bawaan seperti kemampuan membaca al-Qur'an, kaligrafi, pertukangan, dan lain sebagainya. Bakat bawaan ini sudah seharusnya selalu dipupuk dan dikembangkan agar menjadi prokuktif.

3. Pendidikan

Potensi ekonomi dari pendidikan pesantren ini terletak pada santri/murid, guru, sarana dan prasarana. Dari sisi santri/murid, sudah barang tentu dikenai kewajiban membayar SPP, di samping sumbangan-sumbangan wajib lainnya. Untuk kelancaran proses belajar mengajar, diperlukan seperangkat buku, kitab, dan alat-alat tulis. Dari sini bisa dikembangkan salah satu unit usaha pesantren yang menyediakan sarana belajar tersebut. Misalnya toko buku/kitab, alat tulis, dan photo copy. Belum lagi dari sisi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, air, telephon, asrama, pakaian, dan lain sebagainya.[80]

Melihat begitu banyaknya peluang untuk mengembangkan wirausaha di pesantren, maka akan sangat menguntungkan jika pesantren mengelolanya menjadi kegiatan usaha ekonomi. Kegiatan ini dapat dikembangkan oleh pesantren dan dimulai dengan:

a. Perencanaan (menumbuhkan gagasan, menetapkan tujuan, mencari data dan informasi, merumuskan kegiatan-kegiatan usaha dalam mencapai tujuan sesuai dengan potensi yang ada, melakukan analisis SWOT, dan memusyawarahkan).

b. Pemilihan jenis usaha dan macam usaha. Dalam menentukan kegiatan ini yang perlu diperhatikan adalah:

    1) Luas lahan yang dimiliki oleh pesantren.

    2) Sumber daya manusia pesantren.

---

80 *Ibid.,* hlm. 224.

3) Tersedianya sarana peralatan dan bahan baku yang ada di pesantren.

4) Kemungkinan pemasarannya. Ini erat kaitannya dengan potensi permintaan masyarakat terhadap jenis produksi, barang atau bahkan jasa tertentu.[81]

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, maka jenis-jenis usaha yang dapat didirikan di pesantren adalah:

a. Bidang perdagangan.
b. Bidang pertanian dan agribisnis.
c. Bidang industri kecil.
d. Bidang elektronika dan perbengkelan.
e. Bidang pertukangan kayu.
f. Bidang jasa.
g. Bidang keuangan/lembaga keuangan.
h. Bidang koperasi.
i. Bidang pengembangan teknologi tepat guna.[82]

Berbagai bidang wirausaha yang sangat strategis di atas telah dikembangkan dan dikelola di berbagai pesantren. Dengan pengelolaan dan pengembangan wirausaha banyak manfaat yang diperoleh, di antaranya membantu pendanaan pesantren, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan pendidikan kewirausahaan bagi para santrinya. Beberapa pesantren yang telah berhasil mengembangkan unit usaha ekonomi pesantren adalah:

81 Tim Penyusun, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 94-95.
82 *Ibid.,* hal. 95.

1. Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Produk-produk usaha yang telah dihasilkan oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat antara lain: perkebunan dan jus mengkudu, industri minyak kayu putih cap "Cobra", minuman (vitamin) penggemukan sapi, dan pupuk alam.[83] Salah satu faktor keberhasilan Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam mengembangkan wirausaha adalah keberhasilannya dalam menjalin *networking* dengan berbagai instansi.

2. Pesantren Sidogiri Pasuruan

Usaha yang dikembangkan oleh Pesantren Sidogiri Pasuruan ini di antaranya adalah BPR dan BMT. Beberapa Cabang BMT Pondok Pesantren Sidogiri adalah BMT I di Wonorejo, BMT II di Sidogiri, BMT III (Produksi dan Penjualan Padi), BMT IV Sidogiri (kantor pusat), BMT V di Warungdowo, BMT VI di Kraton, BMT VII di Rembang, BMT VIII (Selep Padi di Jetis), BMT IX di Nongkojajar, BMT X di Grati, dan BMT XI di Gondang Wetan. BPR dan BMT ini bersifat independen secara organisatoris dengan pondok pesantren, tetapi dependen secara nilai dan moral.[84]

Selain BPR dan BMT Pondok Pesantren Sidogiri juga memiliki Koppontren yang secara garis besar dibagi dalam dua wilayah, yaitu:

a. Di kompleks ponpes dengan sasaran utama komunitas santri. Yang termasuk jenis usaha ini adalah toko kitab dan serba ada, dan warung makan.

b. Di luar pesantren dengan sasaran utama masyarakat umum. Yang termasuk jenis usaha ini adalah: toko serba ada, toko kebutuhan

---

83 Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren dalam A. Halim, et. al.* (ed), *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 241.

84 Mahmud Ali Zein, *Model-Model Perkembangan Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dalam A. Halim*, et. al. (ed), *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 305-307.

pokok, percetakan dan stationary, pertanian dan perekebunan, warpostel, dan mini market.

Di samping jenis usaha tersebut, Koppontren Sidogiri juga mempunyai komoditi unggulan: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), baju takwa “Sidogiri”, sarung “Santri”, telepon kartu bebas (kerjasama dengan Telkom), dan percetakan. Koppontren ini secara struktural terkait langsung dengan pondok pesantren.

Keberhasilan Pondok Pesantren Sidogiri dalam mengembangkan usaha ekonominya didukung oleh networking yang dibangun dengan instansi bisnis yang lainnya, serta manajemen kewirausahaan yang variataif sebagian secara *integrated structural* dan sebagaian *integrated non structural* yang lebih memberikan keleluasaan bagi lembaga usaha tersebut untuk mengembangkan usahanya.

3. Pesantren Putri al-Mawaddah Ponorogo

Usaha-usaha ekonomi yang telah dibuka Pesantren Putri al-Mawaddah Ponorogo adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum), AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) “Maaunnada”, Koperasi Pesantren Putri al-Mawaddah (KOPPMADA), perkebunan palawija, peternakan sapi, unit produksi pakan ternak probiotik, produk-produk industri kecil mandiri, wartel al-Mawaddah, warnet al-Mawaddah, foto copy dan percetakan Alma Offset, mini market Kiswah, dan transportasi Alma Transport.[85]

Keberhasilan Pesantren Putri al-Mawaddah dalam mengembangkan berbagi wirausaha didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jiwa wirausaha dan penerapan nilai-nilai wirausaha yang dimiliki oleh para pimpinan pesantren, networking yang dijalin dengan instansi lain, dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola berbagai wirausaha tersebut.

---

85 Lailatu Rohmah, *Manajemen Kewirausahaan Pesantren* (Studi di Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo), *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Tidak dipublikasikan, hal. 119-133.

4.Pesantren al-Ittifaqiyah Ogan Ilir Palembang

Melalui *network* yang dibangun, Pesantren Ogan Ilir mampu mengembangkan beberapa unit usaha ekonomi, yaitu jasa foto copy, percetakan, unit simpan pinjam pola syari'ah dan transformasi. Mereka juga mempunyai koperasi pesantren, toko buku, dan kantin. Selain itu dalam bidang pertanian memiliki perkebunan karet, pohon jati, sayur-sayuran, dan juga memiliki peternakan itik dan ikan air tawar.[86]

D. Problem Pengembangan Wirausaha di Pesantren

Salah satu fungsi dan peran pesantren adalah pemberdayaan ekonomi umat. Pengembangan wirausaha menjadi salah bidang yang penting untuk dikelola. Mengacu pada peran dan fungsi pesantren yang diemban tersebut, setidaknya ada tiga problem mendasar dalam pengembangan unit usaha di pesantren yang harus disadari bersama dan segera dicari solusinya.

1.Sumber daya manusia (SDM)

Kualitas SDM di Indonesia yang dinilai masih sangat minim, secara objektif harus diakui bahwa sebagian di antaranya adalah sumber daya manusia pesantren. SDM di sini tentu saja tidak hanya meliputi kemampuan dasar akademis, tetapi juga kemampuan skill individual-kolektif. Perpaduan antara kemampuan akademis dan skill individual-kolektif inilah yang pada saatnya sangat menentukan terhadap kualitas suatu produk. Terbatasnya sumber daya manusia pesantren inilah yang menjadi problem pengembangan wirausaha di pesantren.

---

86 M. Isnaini "*Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Modern Studi terhadap Peran Santri di Pesantren Roudhotul Ulum dan Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir*", dalam Irwan Abdullah, et. al (*eds*) *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 186.

2.Kelembagaan

a. *Integrated Structural*

Model kelembagaan *integrated structural* adalah semua unit/bidang yang ada dalam pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dalam pesantren. Model seperti ini, sebenarnya tidak terlalu bermasalah, dengan syarat masing-masing bagian mempunyai *job description* yang jelas, termasuk hak dan kewenangannya. Sebaliknya, apabila tanpa adanya *job description* yang jelas, sementara kendali organisasi berpusat hanya pada satu orang, maka dapat dipastikan bahwa sistem keorganisasian dan kelembagaan sulit untuk berkembang.[87]

b.*Integrated Non Structural*

Model kelembagaan pesantren *integrated non structural* adalah unit atau bidang-bidang, misalnya bidang usaha ekonomi, bidang pengabdian masyarakat, dan bidang kesehatan yang dikembangkan pesantren terpisah secara struktural organisatoris. Artinya, setiap bidang mempunyai struktur tersendiri yang independen. Meski demikian, secara emosional dan ideologis tetap menyatu dengan pesantren. Pemisahan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya kemandirian lembaga, baik dalam pengelolaan atau pengembangannya. Model kelembagaan seperti ini biasanya mengadopsi sistem manajemen modern. Karenanya tolok ukurnya adalah profesionalisme.

3.Terobosan/Inovasi dan Networking/Jaringan

Problem ketiga yang dirasa mendasar adalah kurangnya keberanian dari pesantren untuk melakukan terobosan ke luar, atau membuat jaringan, baik antara pesantren, maupun antara pesantren dengan institusi lain. Pentingnya pesantren untuk membina hubungan dengan institusi lain

87 *Ibid.,* hal. 238-239.

adalah untuk memahami eksistensinya sebagai *agent of development*. Sebab, untuk menjadi agen perubahan dan pemberdayaan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antar lain: wawasan, komunikasi, kekuasaan/kekuatan, politik, dan modalitas ekonomi. Dengan jaringan dan kerjasama yang dijalin, pesantren diharapkan mampu meningkatkan komunikasi, wawasan, dan kekuatan yang dimilikinya.

E. Kesimpulan

Secara umum dapat digambarkan bahwa lembaga pendidikan yang telah banyak berhasil dalam mengembangkan wirausaha dan mengelola berbagai bidang unit usaha adalah pesantren. Hal ini merupakan upaya nyata dari para pimpinan pesantren dalam menerapkan nilai-nilai wirausaha dalam mengelola lembaga pendidikannya seperti kemampuan melihat peluang, keberanian dan bertanggungjawab atas usaha yang dilakukan, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki atau yang diupayakan oleh pesantren menjadi kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk mendukung eksistensi pesantren. Inilah makna manajemen kewirausahaan dalam lembaga pendidikan.

Beberapa model pengembangan usaha ekonomi pesantren di antaranya adalah; usaha ekonomi yang berpusat pada kiai, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi keterampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak keterampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren, dan usaha ekonomi bagi para alumni pesantren.

Model kelembagaan pesantren *integrated non structural* adalah unit atau bidang-bidang, misalnya bidang usaha ekonomi, bidang pengabdian masyarakat, dan bidang kesehatan yang dikembangkan pesantren terpisah secara struktural organisatoris. Artinya, setiap bidang mempunyai struktur tersendiri yang independen. Meski

demikian, secara emosional dan ideologis tetap menyatu dengan pesantren. Pemisahan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya kemandirian lembaga, baik dalam pengelolaan atau pengembangannya. Model kelembagaan seperti ini biasanya mengadopsi sistem manajemen modern. Karenanya tolok ukurnya adalah profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Buang, Nor Aishah dan Murni, Isteti, *Prinsip-Prinsip Kewirausahaan Konsep, Teori, Model Pembentukan Wirausaha*, Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: 2006.

Halim, A., "Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim, et. al. (eds), *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Hidayat, Ara dan Machali, Imam, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Bandung: Pustaka Educa: 2010.

Imron, Ali, "Manajemen Pendidikan: Substansi Inti dan Ekstensi", dalam Ali Imron, et. al (eds), *Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.

Isnaini, M., "Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Modern Studi terhadap Peran Santri di Pesantren Roudhotul Ulum dan Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir", dalam Irwan Abdullah, et. al. (*eds*) *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Longenecker, Justin G, dkk, *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Muhammad, Fadel, *Reinventing Local Government Pengalaman dari Daerah*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, Compas Gramedia, 2008.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. 2 Cetakan 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Rohmah, Lailatu, Manajemen Kewirausahaan Pesantren (Studi di Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo), *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Tidak dipublikasikan.

Sagala, Syaiful, *Adiministrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Suhartini, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim, et. al (*eds*), *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Sulton, "Manajemen Kewirausahaan Pendidikan", dalam Ali Imron, et. al (*eds*), *Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.

Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek* Yogyakarta: Grha Guru, 2004.

Terry, George R. dan Rue, Leslie W., *Dasar-Dasar Manajemen*, Terj. G. A. Ticoalu, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Tim Penyusun, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.

Thoha, Habib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Usman, Husaini, *Manajemen; Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Winardi, J., *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Jakarta: Kencana, 2004.

Zein, Mahmud Ali, "Model-Model Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan", dalam A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

BAGIAN 7

PENGARUH TOKOH ATAU PEMUKA AGAMA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI PONDOK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

A. Latar Belakang Masalah

Dengan eksisnya pesantren di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan dimana pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang keberadaannya tidak dilembagakan secara formal yang memerlukan semacam akta pendirian yang mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Selain itu, pesantren merupakan lembaga independen masyarakat yang keberadaannya tidak tergantung dengan legalitas resmi dari pemerintah. Biasanya, pesantren lahir dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan akhirnya dapat memberi manfaat untuk masyarakat terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar pesantren. Pendek kata, walaupun pesantren bukan lembaga pendidikan formal, namun sampai saat ini tetap saja

diminati dan memiliki daya tarik bagi masyarakat khususnya masyarakat yang masih memimpikan pendidikan yang memiliki kekuatan moral dan spiritual.

Penulis sepakat dengan Halim Soebahar (2013:1) dan pengamat lain yang menilai bahwa angin transformasi sengaja dihembuskan oleh pemerintah terhadap pesantren karena dua pertimbangan, *pertama*, pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional dan kurang partisipatif, namun potensi yang sangat besar dimiliki pesantren sebagai mobilisator pemberdayaan sumber daya lokal, sumber tenaga kerja, dan sumber dukung politik praktis, bahkan pesantren bisa dijadikan lembaga tandingan (*counter vailing* power) yang potensial. *kedua*, pesantren juga dapat dijadikan instrumen sosialisasi gagasan, mobilisasi sumber daya pembangunan, dan lain sebagainya. Bahkan pesantren saat ini telah dipraktisisasi sebagai kekuatan politik.

Adapun ilmu-ilmu yang diajarkan dalam pesantren-pesantren walaupun belum berkembang menjadi ilmu yang lebih mapan, telah mampu memberi dasar pola hidup kebudayaan dan peradapan. Disamping untuk mendalami ilmu agama, pondok pesantren sekaligus mendidik masyarakat di dalam asrama, yang dipimpin langsung oleh seorang kyai karena itu peranan pesantren sangat perlu untuk ditampilkan. Pada dasarnya pondok pesantren mendidik pada santrinya dengan ilmu agama Islam agar mereka menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu yang mendalam dan beramal sesuai dengan tuntutan agamanya. Namun fungsinya sebagai sosialisasi nilai-nilai dari ajaran Islam ini tidaklah cukup bagi suatu pesantren untuk mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang sudah berkembang dan modern, bahkan untuk bertahan saja ia harus berani beradaptasi dengan arus perubahan-perubahan sosial yang sangat pesat ini. Sehingga secara bertahap sistem pendidikan pesantren mampu berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.

Namun pada akhir-akhir ini ada kecenderungan dari beberapa pondok pesantren yang tidak hanya membekali santrinya dengan pengetahuan agama saja, akan tetapi sudah mulai membekali santrinya

dengan keterampilan-keterampilan seperti pertanian, hal ini terutama didasari oleh adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu terampil dan siap pakai. Saat ini bangsa Indonesia sangat giat dalam gerak pembangunan. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Pondok pesantren sangat memegang peranan penting sebab yang dimaksud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang selalu dapat mengendalikan diri, dapat menjaga keseimbangan matriil dan sprituil antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Realita ini patut disyukuri dan dibanggakan oleh semua pesantren, bahkan berhak untuk bangga, karena meningkatnya perhatian masyarakat luas pada dunia pendidikan dan lembaga pesantren. Dari sebuah lembaga yang hampir-hampir tak diakui eksistensi dan peran positifnya, menjadi sebuah bentuk pelembagaan sistem pendidikan yang mendapatkan "label" asli Indonesia. Maka orangpun membicarakan kemungkinan pesantren menjadi pola pendidikan nasional. Kemungkinan ini diperbesar dengan munculnya anggapan bahwa sistem pendidikan yang kini secara resmi berlaku di Indonesia adalah warisan pemerintahan Belanda yang mengandung ciri kolonial. Sebuah ciri pendidikan yang tidak bisa serta merta kita terapkan sepenuhnya di negara Indonesia, yang moyoritas muslim. Islam sendiri mempunyai konsep tradisi pembelajaran sebagaimana diteladani Rasulullah.

Bahkan lebih dari itu: pesantren diharapkan dapat berperan menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang berjalan. Sebuah dukungan yang dinamis, spontan dan langgeng. Apalagi jika kita kaitkan dengan keperluan untuk menemukan suatu pola pembangunan yang bersifat "indigenous", asli sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Untuk harapan inilah, pemerintah kian menunjukkan perhatiannya pada lembaga pendidikan pesantren.

B. Peran tokoh agama dalam pendidikan dan budaya

Di Indonesia kebudayaan merupakan suatu hal yang menjadi kebanggaan dalam masyarakat. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak keanekaragaman kebudayaan yang unik dan bervariasi. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama menghasilkan budaya. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang hidup tanpa budaya, begitu juga sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa ada masyarakat yang menjadi unsur penghasilnya. Berbagai kebudayaan yang ada saat ini tidak terlepas dari pengaruh zaman dahulu dimana awal budaya tersebut baru berkembang. Jawa merupakan salah satu wilayah di indonesia yang memiliki banyak budaya. Dalam kebudayaan di Jawa banyak hal yang mempengaruhi bagaimana budaya tersebut lahir dan berkembang. Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan budaya tersebut adalah masalah agama.

Sebagaimana yang diketahui, di Jawa budaya sangat kental kaitannya dengan agama. Terlebih agama Islam yang menjadi mayoritas agama penduduk di Jawa. Dalam perkembangannya banyak sekali budaya di Jawa yang di dalamnya sarat dengan unsur religi. Hal ini menjadikan budaya tersebut sakral di kalangan masyarakat.

Masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya hanya membawa ajaran peribadatan. Namun lambat laun lahir budaya dari ajaran Islam tersebut. Selain itu terjadi pula akulturasi dari masuknya Islam ke Indonesia. Jawa merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk mempelajari bagaimana akulturasi tersebut terjadi karena di Jawa banyak budaya yang lahir dan berkembang dari proses ini. Di Jawa, agama Islam merupakan agama yang mudah diterima masyarakat pada awal masuknya agama Islam di daerah tersebut. Penyebaran agama Islam yang berkembang dan dapat diterima masyarakat dengan mudah tidak terlepas dari tokoh yang melakukan penyebaran agama tersebut.

Di Pulau Jawa, tokoh yang terkenal dalam penyebaran agama Islam adalah Wali Songo. Wali Songo memiliki cara tersendiri dalam melakukan dakwah sehingga agama Islam sangat berkembang saat itu.

Saat itu Jawa sedang dikuasai oleh kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa.

1. Proses Masuknya Islam di Indonesia

Saat Islam masuk di Indonesia pengaruh Hindu-Budha masih sangat kuat. Namun Islam dapat berkembang berdampingan dengan agama Hindu-Budha. Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang muslim, sama halnya dengan agama Hindu-Budha masuk ke Indonesia. Para pedagang tersebut datang untuk berdagang sambil menyebarkan agama yang dibawanya karena bagi mereka setiap muslim adalah penyebar agama. Proses persebaran Islam di Indonesia berlangsung lancar. Kelancaran ini dikarenakan syarat-syarat untuk memeluk Islam tidaklah sukar. Selain itu Upacara-upacara dalam Islam juga cenderung lebih sederhana daripada upacara dalam agama Hindu atau Buddha. Menurut catatan Tome Pires, kaum bangsawan Hindu-Buddha di Jawa masuk Islam dengan sukarela tanpa paksaan. Penyebaran Islam disampaikan sesuai dengan adat dan tradisi pribumi Indonesia. Islam juga tidak mengenal pengkastaan dan menganggap derajat manusia itu sama.

Sampai saat ini ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Tidak mudah menyimpulkan bagaimana Islam masuk ke Indonesia karena begitu banyak sumber yang menjelaskan mengenai hal ini. Namun dari banyak teori yang ada, dapat diketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, India (Gujarat dan Benggala) sekitar abad ke-7 sampai ke-13 M. Berbagi teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia antara lain :

a. Teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 H atau abad ke-13 M. Gujarat merupakan wilayah yang terletak di India bagain barat, berdekaran dengan Laut Arab. Tokoh pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pijnapel dari Universitas Leiden

pada abad ke 19. Menurutnya, orang-orang Arab bermahzab Syafei telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriyyah (abad ke-7 M). Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pijnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia.

b. Teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan nama Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia.

c. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi (kini Iran). Pencetus dari teori ini adalah Hoesein Djajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hoesein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia.

d. Teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia (khususnya di Pulau Jawa) berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam masuk dan dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang.

2. Proses Penyebaran Islam di Indonesia

Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, dilakukan secara lancar. Hal ini dikarenakan Islam agama yang mudah dipelajari. Pedagang merupakan awal mula tersebarnya ajaran Islam tersebut. Selain

pedagang ada proses Islamisasi yang terjadi melalui bebrapa hal. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang tersebut, yaitu:

a. Melalui Perdagangan. Diantara saluran Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuia dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad-7 sampai abad ke-16, perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, Tenggara dan Timur benua Asia dan dimana pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia, India) turut serta menggambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang.

b. Melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan. Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian diantara dua individu. Kedua individu yaitu suami isteri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim.

c. Melalui Tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu berkaitan langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya.

d. Melalui Pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja-raja, dan tokoh lainnya berperan besar dalam proses Islamisasi, mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kyai-kyai,atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-

kitab,setelah keluar dari suatu pesantren itu maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kyai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kyai yang mengajarkan semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi.

e. Melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini telihat pada masjid kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, masjid Agung Banten, Baiturrahman di Aceh, Ternate dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang,yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya diadakan dakwah keagamaan Islam.

f. Melalui Politik. Pengaruh kekuasan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini.

C. Wujud Akulturasi Kebudayaan Islam di Indonesia

Sebelum datangnya Islam, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Budha hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut,

tidak hanya bersifat kebendaan/material tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia.

1. Seni Bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, istana. Masjid adalah tempat ibadahnya orang Islam. Di Indonesia, istilah masjid biasanya menunjuk pada tempat untuk menyelenggarakan shalat jumat. Masjid di Indonesia pada zaman madya biasanya mempunyai cirri khas tersendiri, diantaranya:
    a. Atapnya berbentuk "atap tumpang" yaitu atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil, 3 atau 5 seperti di Jawa dan Bali pada masa Hindu.
    b. Tidak adanya menara. Pada masa itu masjid yang mempunyai menara hanya masjid Banten dan masjid Kudus.
    c. Biasanya masjid dibuat dekat istana, berada di sebelah utara atau selatan. Biasanya didirikan di tepi barat alun-alun. Letak masjid ini melambangkan bersatunya rakyat dan raja sesama makhluk Allah.
2. Seni Rupa. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghias Masjid, makam Islam berupa suluran tumbuh-tumbuhan namun terjadi pula Sinkretisme (hasil perpaduan dua aliran seni logam), agar didapat keserasian.
3. Aksara dan Seni Sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda-tanda a, i, u seperti lazimnya tulisan Arab. Di samping itu juga, huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. Sedangkan dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari

perpaduan sastra pengaruh Hindu-Budha dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia.

4. Sistem Pemerintahan. Dalam pemerintahan, sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu ataupun Budha. Tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu/Budha mengalami keruntuhannya dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka dan sebagainya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar Sultan atau Sunan seperti halnya para wali dan apabila rajanya meninggal tidak lagi dimakamkan di candi tetapi dimakamkan secara Islam.

5. Sistem Kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal Kalender Saka (kalender Hindu) yang dimulai tahun 78M. Dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran hari seperti legi, pahing, pon, wage dan kliwon. Setelah berkembangnya Islam Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa, dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan (komariah) seperti tahun Hijriah (Islam). Nama-nama bulan yang digunakan adalah 12, sama dengan penanggalan Hijriyah (versi Islam). Demikian pula, nama-nama bulan mengacu pada bahasa bulan Arab yaitu Sura (Muharram), Sapar (Safar), Mulud (Rabi'ul Awal), Bakda Mulud (Rabi'ul Akhir), Jumadilawal (Jumadil Awal), Jumadilakir (Jumadil Akhir), Rejeb (Rajab), Ruwah (Sya'ban), Pasa (Ramadhan), Sawal (Syawal), Sela (Dzulqaidah), dan Besar (Dzulhijjah).

D. Tokoh agama berpengaruh terhadap pendidikan di indonesia

Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan yang sebelumnya yaitu Hindu dan Budha hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut antara lain dalam hal seni bangunan, seni rupa, seni sastra, dan sistem pemerintahan. Setelah masuknya

islam masuk ke Indonesia Munculah Tokoh-tokong Agama Islam di Indonesia.

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur'an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab '*alima*, *ya'lamu*, '*alim* yang artinya orang yang mngetahui. Kata '*alim* bentuk jamaknya dari 'alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya.[88]

Kata ulama disebut dua kali di dalam al-Qur'an, yakni dalam surat Fathir ayat 28.[89] Secara terminologis ulama adalah seorang yang ahli ilmu agama Islam, baik menguasai ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan ilmu agama lainnya dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi berakhlak mulia serta berpengaruh di dalam masyarakat. Namun pengertian ulama dalam perkembangannya yaitu berarti orang yang mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT yang kemudian disebut *ulum al-din*, maupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil penggunaan potensi akal dan indra manusia dalam memahami ayat-ayat kauniyah yang kemudian disebut dengan ulum al-insaniyah atau al-ulum atau sains.[90]

Ulama dalam pengertian pertama pada umumnya berdiam di pedesaan, mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinnya, atau mereka menjadi kyai dan menjadi "pelayan" masyarakat dalam melakukan ritual agama, seperti memimpin membaca surat yasin, tahlil dan sebaginya untuk doa keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia. Kehidupan mereka umumnya berbasis pertanian. Para santri membantu kyainya dalam mengelola pertanian. Di samping dari hasil

---

88. Abu Luwis Ma'lub, *al-Munjid* (Beirut: Dar al-Masyhur, 1984), cet.27, hal. 526-527. Lihat pula Ibn Manzur Jamaluddin Muhammad Ibn. Mukarrom al-Anshari, *Lisan Arab* (Kairo: Dar al-Misriyyah li Ta'lif wa Tarjamah, t.t), jilid XV, hal. 310-316
89. John. L. Esposito, *Tokoh-tokoh Gerakan Islam Kontemporer*, hal. XII
90 Mead, George H. *Mind, Self, and Society*, (Chicago: University of Chicago Press, 1934), hal. 23.

bertani kyai mendapat honor ala kadarnya dari uang bayaran para santri. Pada setiap kenduri atau selamatan

Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukan perpaduan yang menarik antara peran lama kyai dalam masyarakat muslim. Kaum intelektual digambarkan dengan beberapa cara yang berbeda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda, ada sedikit rasa penerimaan yang samar-samar akan elemen-elemen penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat.[91]

Peran sosial: Peran sosial yang di dalamnya terdapat perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua

91 Dalam salah satu pernyataannya bahwa sebagaimana para ekonom adalah wakil ilmiawan dari kelas borjuis, begitu pula Kaum Sosialis dan Komunis adalah teoretikus dari kelas proletar.

konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.[92]

Tergantung sudut pandang umum terhadap tradisi teoretis, ada serangkaian "jenis" dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku sosial. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi di antara posisi khusus heterogen yang disebut peran:

1. Peran sosial mencakup bentuk perilaku "wajar" dan "diizinkan", dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan;
2. Peran ditempati oleh individu yang disebut "aktor";
3. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut "sah" dan "konstruktif"), mereka akanmemikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran;
4. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kedaluwarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran;
5. Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara prososial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.

92 Dalam hal inilah maka keberadaan Banyumas tidak dapat dipisahkan dari sejarah keberadaan Kerajaan Galuh Purba yang dibangun di sekitar gunung Slamet pada akhir abad ke-IV M. Setelah itu pusat pemerintahan kerajaan ini kemudian pindah ke Garut Kawali daerah Ciamis, Jawa Barat pada abad ke VI-VII M. Perpindahan tersebut menimbulkan interaksi dan penaruh dari kerajaan-kerajaan lain, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah Banyumas tidak dapat dipisahkan dari kerajaan-kerajaan utama di Jawa Tengah dan Jawa Barat antara lain Kerajaan Tarumanegara, Kalingga, Mataram Hindu, Majapahit, Padjajaran, Kesultanan Demak, Pajang dan Mataram Islam. Sartono Kartodirdjo "Suatu Tinjauan Fenomenologis tentang Folklore Jawa," dalam Soedarsono (ed). *Kesenian, Bahasa, dan Folklor Jawa* (Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hal. 409-410. Lihat juga R. Aria wirjaatmadja, *Babad Banjoemas* (t.p, t.t)

Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris.Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan. Karl Marx mngemukakan konsepnya dalam bentuk sejarah perkembangan masyarakat, meskipun demikian dalam teorinya tentang perkembangan tersebut hanya faktor-faktor material yang dipegang memiliki peranan.

Marx menandaskan bahwa teknologilah yang menentukan cara produksi ekonomi; cara produksi menentukan struktur kelas dan relasinya dengan sarana-sarana produksi, dan karenanya menentukan relasi kelas-kelas itu satu sama lain; dan akhirnya seiring dengan waktu memunculkan orientasi kelas-kelas tersebut pada (misalnya menjauhkan mereka dari) sistem produksi dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang akan mengubah bentuk system. Dalam teori sejarah yang diajukan Marx, gagasan dan pengetahuan sosiologis berperan sebagai gejala dependen atau turunan, sebuah super struktur yang dihasilkan dari kondisi-kondisi keberadaan materi. Dalam hal ini Marx adalah pencipta sosiologi pengetahuan; dia menyajikan teori spesifik tentang bgaaimana kondisi-kondisi keberadaan sosial menghasilkan pengetahuan, kepercayaan, dan nilao-nilai mengenai pelaksanaan fungsi sosial-tetapi bukan teori tentang bagaimana pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai mempengaruhi kondisi-kondisi sosial.[93]

Dalam teori Marx tempat terbaik untuk menemukan peran pengetahuan sosiologis adalah dalam prediksi-prediksinya mengenai transformasi kelas sosial dari kelas itu sendiri ke kelas untuk dirinya

---

93. M. Marwin R. Sudarmo, M. Warwin R. Sudarmo dan Bambang S. Purwoko, *Sejarah Banyumas dari Masa ke Masa* (t.p, 2009). hal. 43.

sendiri, artinya perkembangan kesadaran kelas. Upaya aktivis marx sendiri pastinya ditujukan pada upaya untuk membangkitkan kelas-kelas pekerja di Eropa abad ke 19 agar mencapai kesadaran diri. Dalam pernyataan Marx peran para teoretikus ditentukan oleh keadaan kesadaran golongan proletar. Kesadaran golongan proletar sendiri ditentykan oleh struktur ekonomi dan posisi golongan proletar di dalamnya. [94]

Lain halnya dengan Laur, peran biasanya berhubungan dengan perubahan sosial (*social change*) adalah variasi dari waktu ke waktu dalam hubungan antara individu, kelompok, budaya dan masyarakat. Perubahan sosial adalah menembusnya seluruh kehidupan sosial yang mengalami perubahan secara kontinue[95]

Tokoh Islam yang Berprestasi. Proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran aktif yang dilakukan oleh para ulama. Melalui merekalah Islam dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat Nusantara. Para ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara antara lain sebagai berikut:

1. Hamzah Fansuri

Hamzah Fansuri, hidup pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, sekitar tahun 1590. Pengembaraan intelektualnya tidak hanya di Fansur, Aceh. Tetapi juga ke India, Persia, Makkah dan Madinah. Karena itu ia menguasai berbagai bahasa selain bahasa Melayu. Dalam pengembaraannya itu, ia sempat mempelajari ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, sejarah dan sastra Arab. Usai menjalani pengembaraan intelektualnya, Hamzah Fansuri kembali ke kampung halamannya di Fansur, Aceh, untuk mengajarkan keilmuan Islam yang diperolehnya dari guru-guru yang didatanginya di negeri-negeri yang telah

94 *Ibid*, hal. 44
95 *bid*, hal. 45.

disinggahi. Ia mengajarkan keilmuan Islam tersebut di Dayah (pesantren) di Obob Simpang kanan, Singkel.

2.SyamsudinAl-Sumatrani

Syamsudin Al-Sumatrani, merupakan salah seorang ulama terkemuka di Aceh dan Nusantara yang hidup pada abad ke-16. Syamsudin Al-Sumatrani memiliki peran dan posisi penting di istana kerajaan Aceh Darussalam, karena ia berprofesi sebagai Qadli (Hakim Agung), juga kedekatannya dengan Sultan Iskandar Muda sebagai seorang Syeikh Al Islam. Syeikh Al Islam merupakan gelar tertinggi untuk ulama, kadi, imam atau syeikh, penasihat raja, imam kepala, anggota tim perundingan dan juru bicara Kerajaan Aceh Darussalam. Karya-karya Syamsudin Al-Sumatrani adalah Jaubar Al-Haqaid, Risalah Al-Baiyyin al-Mulahaza Al-Muwahhidin Wa Al-Mubiddinfi Dzikr Allah, Mir'ah Al-Mukminin, Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri, Syarah Syair Ikan Tongkol.

3.NuruddinAr-Raniri

Nuruddin Ar-Raniri dilahirkan di Ranir (sekarang Render), sebuah pelabuhan tua di Gujarat. Ayahnya berasal dari keluarga imigran Arab Hadramy, Arab Selatan, yang menetap di Gujarat India. Meskipun ia keturunan Arab, Ar-Raniri dianggap lebih dikenal sebagai seorang ulama Melayu dari pada India atau Arab. Ar-raniri diangkat sebagai Syeikh Al Islam, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani. Dengan memperoleh dukungan dari sultan, Ar-Raniri mulai melancarkan berbagai pembaruan pemikiran Islam di tanah Melayu, khususnya di Aceh. Selama lebih kurang tujuh tahun, ia menentang doktrin wujudiah yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsudin Al-Sumatrani. Diantara karya Ar-Raniri adalah Shiratal Mustaqiem dalam bidang tasawuf, dan Durratul Aqaid bisyarbil-Aqaid dalam bidang akidah Islam.

4. Syeikh Muhammad Yusuf Al-Makassari

Muhammad Yusuf bin Abdullah Abul Mahasin Al-Tajul-Khalwati Al-Makassari, dilahirkan di Moncong Loe, Gowa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 M/1037 H. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ia belajar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tasawuf kepada Sayid Ba Alwi bin Abdullah Al-'Allaham Al-Thahir, seorang Arab yang menetap di Bontoala. Setelah berusia 15 tahun, ia melanjutkan pelajarannya di Cikoang dengan Jalaluddin Al-Aydid, seorang guru pengembara yang datang dari Aceh ke Kutai, sebelum sampai di Cikoang.
Diantara karyanya adalah menyalin kitab Ad-Durrah Al-Fakbira (Mutiara yang Membanggakan), dan Risalah fil-Wujud (Tulisan tentang Wujud)

5. Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani

Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M. Sejak kecil ia dan kedua saudaranya, Tamim dan Abmad, di didik ayahnya dalam bidang agama, ilmu kalam, ilmu nahwu, fikih dan tafsir. Selain itu ia juga belajar dari Haji Sabal, ulama terkenal saat itu, dan dari Raden Haji Yusuf di Purwakarta Jawa Barat.

Syeikh Nawawi A-Bantani termasuk salah seorang ulama Nusantara yang cukup berpengaruh dan sangat dihormati, bukan hanya di kalangan komunitas melayu Nusantara tetapi juga oleh masyarakat Haramain secara keseluruhan. Posisi sosial keagamaan dan intelektual yang dimilikinya memberi kesempatan kepadanya untuk mengajar pada berbagai halaqah di Masjidil Haram sejak tahun 1860, khususnya di Ma'had Nashr Al-Ma'arif Ad-Diniyah, hingga akhirnya ia memperoleh gelar sebagai "Syeikh Al-Hijaz"

6. Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau

Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 1276 H/1855 M. Ayahnya adalah seorang jaksa di Padang, sedangkan ibunya adalah anak dari Tuanku Nan Renceh, seorang ulama terkemuka dari golongan Padri. Ahmad Khatib kecil memperoleh pendidikan awal pada sekolah pemerintah yang didirikan Belanda, yaitu sekolah rendah dan sekolah guru di kota kelahirannya. Kemudian pada tahun 1876, Ahmad Khatib melanjutkan pendidikan agamanya di Makkah, tempat kelak ia memperoleh kedudukan tinggi dalam mengajarkan agama dan imam dari madzhab Syafi'i di Masjidil Haram.

7. Wali Songo

Walisongo, dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 M. Mereka tinggal ditiga wilayah penting pantai utara pulau Jawa, yaitu Surabaya-Gresik-Lamongan-Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Walisongo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang berperan. Namun peran mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat para Walisongo ini banyak disebut dibanding yang lain.Pendapat lain yang mengatakan bahwa walisongo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 M.

Walisongo adalah pembaruan masyarakat pada masanya. Pengaruhnya mereka terasakan dalam berragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Adapun sembilan nama yang dikenal Walisongo tersebut

adalah Sunan Gresik, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati.

E. Peranan pondok pesantren terhadap lingkungan Sekitarnya (bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan ekonomi)

1. pondok pesantren Mamba'ul Ulum.

Pondok pesantren Mamba'ul Ulum yang dirintis dan dibina oleh Kyai Haji Selamet Baharudin, beserta istri Hj. Anis Rif'atin sejak tahun 1980 di kelurahan Patemon bertujuan membentuk generasi Islami yang menganut faham Ahlussunah Waljama' ah dan menganut salah satu dari empat madzhab serta mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling rnempengaruhi. Sebagian besar pesantren berkembang karena dukungan masyarakat. Munculnya atau berdirinya pondok pesantren merupakan inisiatif masyarakat baik secara individual maupun kolektif, demikian pula perubahan sosial dalam masyarakat merupakan dinamika kegiatan pondok pesantren tersebut dalam kegiatan pendidikan pengajaran dan kemasyarakatan. Berdasarkan kondisi pesantren, maka pesantren menjadi cerminan pemikiran masyarakat dalam mendidik dan melakukan perubahan sosial terhadap masyarakat. Dampak yang jelas adalah terjadinya perubahan orientasi kegiatan pesantren sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pondok pesantren Mamba'ul Ulum sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi perubahan tersebut bukan berarti sebagai pondok pesantren yang hilang kekhasannya. Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat yaitu pondok pesantren tradisional, pondok pesantren modern dan pondok pesantren komprehensif. Kegiatan sistem pondok pesantren yang dilakukan oleh pondok

pesantren Mamba'ul Ulum bermuara pada suatu sasaran utama yaitu perubahan baik individual maupun kolektif. Oleh karena itu pondok pesantren dapat dikatakan sebagai agen perubaban artinya pesantren sebagai lembaga pendidikan agama mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat.

Perubahan tersebut berupa pemahaman (persepsi) agama, ilmu serta teknologi serta membekali masyarakat kearah kemampuan masyarakat siap pakai.

Pondok pesantren Mamba'ul Ulum yang tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan turut memajukan dan mencerdaskan masyarakat dalam masa pembangunan. Sebagai pimpinan pondok pesantren Kyai Selamat Baharudin masa depan. Untuk itu harus bersifat terbuka terhadap pembaharuan demi untuk perbaikan mutu pondok pesantren yang dipimpinnya. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan, antara lain membina hubungan dengan lembaga-lembaga lain, dengan teman sejawat, dengan masyarakat untuk menerima saran dan kritik.

Nama pondok pesantren Mamba'ul Ulum yang semakin terkenal membuat masyarakat banyak yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren 48 tersebut. Masyarakat dapat merasakan kehidupan beragama sebagai anggota masyarakat. Dari kegiatan ceramah/dakwah/fatwa oleh para kyai/ulama masyarakat menjadi sadar akan pentingnya beragama, semangat bekerja, memperbaiki kehidupan, bersatu bergotong royong agar mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Demikian pula pondok pesantren Mamba'ul Ulum sebagai media pembaharuan mempunyai peranan dalam berbagai bidang yaitu:

2. Peranan sebagai lembaga da'wah/agama

Lembaga da'wah disini dari segi kegiatan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat disekitar pondok pesantren. Bertujuan untuk menegakan kalimat Allah dalam pengertian peyebaran agama Islam agar pemeluknya agar pemeluknya memahami Islam secara benar. Kegiatan da'wah yang dikembangkan oleh pondok pesantren Mamba'ul Ulum antara lain meliputi:

a. Pengajian yang diadakan tiap RT yang ada sekelurahan Talang Bakung dan diikuti semua warga nya dan waktu kegiatan tersebut sesuai dengan hasil kesepakan semua warga.

b. Pengajian ibu-ibu diadakan setiap seminggu sekali dan diikuti semua warga di Setiap RT yang ada di kelurahan Talang Bakung dan yang yang dibahas dalam pengajian tersebut tentang rukun Islam, Rukun Iman dan sebagainya.

c. Pengajian untuk para remaja yang diadakan sebulan sekali dan dalam pengajian tersebut antara lain mekaji tetang hukum nikah, apa itu zina dan kegiatan tersebut dilakukan remaja setiap Rt yang ada di kelurahan Talang Bakung Kota Jambi

d. Pengajian Kitab Bukhori ba'da Isya' Malam Minggu yang dikuti oleh santri laki-laki dan masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren Mamba'ul Ulum yang dikaji mengenai tentang cara membaca kutbah yang baik yang ada kaitannya tentang agama Islam secara khusus dan Sebagainya.

e. Majelis Ta'lim atau pengajian yang bersifat pendidikan kepada umum Majelis Ta'lim tersebut menjadi sarana da'wah dan tabligh yang Islami coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas

f. Majelis Sholawat Nariyah yang di adakan di sekitar Kota Jambi dan Muaro Jambi Satri Laki-laki perwakilan dengan Masyarakat.

3. Peranan dalam bidang pendidikan

Peran pondok pesantren dalam bidang pendidikan untuk masyarakat Mamba'ul Ulum dan sekitarnya adalah dengan memberikan sarana pendidikan atau [50] meyediakan pendidikan baik formal maupun informal Pendidikan formal terdiri dari:

1. Raudhatul AthFal (RA) Mamba'ul Ulum tahun berdiri 2004 dengan status disamakan.
2. Madrasah Ibtidaiyah Mamba'ul Ulum tahun berdiri 1999 dengan setatus diakui.
3. Madrasah Tsanawiyah mamba'ul Ulum Tahun Berdiri 2001 dengan Status diakui.
4. Madrasah Aliyah Mamba'ul Ulum Tahun Berdiri 2007 dengan Status diakui

Yang Terbaru SMK Mamba'ul Ulum Dan STIT Mamba'ul Ulum dan bekerjasama juga dengan Pascasarjana UIN STS Jambi dan STAl Ahsanta Kota Jambi. Pendidikan informal meliputi :

1. Madrasah Diniyah Mamba'ul Ulum

Kegiatan belajar mengajarnya dilakukan pada malam hari dan di ikuti oleh semua santri yang ada Pesantren tersebut.

a. TPQ Mamba'ul Ulum

Santri yang belajar di TPQ anak-anak yang ada disekitar pondok saja. Segala kegiatan dan kiprahnya pondok pesantren Mamba'ul Ulum telah berhasil menerapkan sistem madrasah dan kurikulum modern dalam proses belajar mengajar dipondok pesantren ini. Sehingga pondok pesantren ini mempunyai peranan besar dalam menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan dibukanya program pendidikan madrasah pondok pesantren Mamba'ul Ulum makin

berkembang menjadi besar, ini terlihat dari jumlah siswa/santri yang masuk mengikuti pendidikan madrasah.

Pondok pesantren Mamba'ul Ulum sebagai sebuah wadah kelembagaan yang berkecimpung di bidang pendidikan sejak awal berdirinya nampak sekali adanya perkembangan kearah modern dan siap menghadapi tantangan dan perubahan sosial kearah kemajuan yang tidak terelakan. Hal ini dapat dilihat alumni-alumnni madrasah pondok pesantren dapat melanjutkan studinya keperguruan-perguruan [51] yang lebih tinggi seperti, UNJA, IAIN, UNBARI, STAI Ma'arif dan lain-lain. Sedang bagi yang tidak meneruskan kependidikan yang lebih tinggi alumni-alumni pondok pesantren tersebut banyak yang terjun ke masyarakat menjadi penggerak keagamaan (wawancara dengan pengasuh pondok 29 maret 2017)

Keberhasilan para lulusan pondok pesantren tersebut mendorong masyarakat sekitar Semarang untuk terus mendukung keberadaan pondok pesantren Mamba'ul Ulum dengan cara sebagai donatur tetap dan tidak tetap maupun memberi motivasi demi kemajuan pondok pesantren Mamba'ul Ulum

2. Peranan dalam bidang sosial budaya.

Peranan pondok pesantren sebagai lembaga sosial menunjukkan keterlibatan pesantren dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah-masalah sosial yang dimaksud disini adalah aspek kehidupan dunia berupa bimbingan rohani yang menurut Hj. Anis Rif'atin merupakan jasa besar pesantren terhadap masyarakat desa, kegiatan sosial dapat dilakukan melalui:

a. Kegiatan bakti sosial untuk lingkungan sekitar pondok
b. kegiatan Khitanan masal dalam rangka hari besar Islam
c. Turnamen sepak bola dalam rangka 17belasan
d. Haul dan Khataman Quran
e. Pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi

3. Peranan dalam bidang ekonomi

Peran pondok pesantren Mamba'ul Ulum dalam bidang ekonomi untuk masyarakat Talang Bakung dan sekitarnya dapat diujutkan melalui kegiatan

a. Pendidikan ketrampilan

b. Kegiatan koperasi

c. Kerajinan

d. Wiraswasta

sehingga dengan adanya kegiatan seperti yang tercatum di atas dapat memacu untuk meningkakan taraf hidup untuk mencapai kehidupan ekonomi lebih baik.

F. Peran Pesantren Dalam Perubahan dan Pembangunan Sosial

Perspektif histories menempatkan pesantren pada posisi yang cukup istimewa dalam khazanah perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Abdurrahman Wahid nmenempatkan pesantren sebagai subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, lima ribu podnok pesantren yang tersebar di enam puluh delapan puluh desa merupakan bukti tersendiri untuk menyatakan sebagai subkultur.

Bertolak dari pandangan Wahid di atas, tidak terlalu berlebihan apabila pesantren di posisikan sebagai satu elemen determinan dalam struktur piramida sosial masyarakat Indonesia. Adanya posisi penting yang disandang pesantren menuntutnya untuk memainkan peran penting pula dalam setiap proses-proses pembangunan sosial baik melaui potensi pendidikan maupun potensi pengembangan masyarakat yang dimilikinya. Seperti dimaklumi, pesantren selama ini dikenal dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki misi untuk membebaskan peserta didiknya (santri) dari belenggu kebodohan yang selama ini menjadi musuh dari dunia pendidikan secara umum. Pada tataran berikutnya, keberadaan para santri dalam menguasai ilmu

pengetahuan dan keagamaan akan menjadi bekal mereka dalam berperan serta dalam proses pembangunan yang pada intinya tiada lain adalah perubahan sosial menuju terciptanya tatanan masyarakat yang lebih sempurna.

Selaras dengan pandangan pembangunan sebagai proses perubahan sosial, pembangunan itu tiada lain merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir bati, termasuk terpenuhinya rasa aman, tentram dan keadilan.

Dalam kontek ini, praktek pembangunan sosial itu bukan saja menjadi milik dan tanggung jawab institusi pemerintah, melainkan tanggung jawab besama antara pemerintah dan masyarakat. Hanya saja, keberadaan pesantren tidak memiliki kewenangan langsung untuk merumuskan aturan sehingga perannya dapat dikategorikan ke dalam apa yang dikenal dengan partisipasi. Dalam hal ini, pesantren melalui kyai dan santri didikannya cukup potensial untuk turut menggerakkan masyarakat secara umum. Sebab, bagaimanapun juga keberadaan kyai sebagai elit sosial dan agama menempati posisi dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Salah satu sector penting dalam pembangunan sosial yang mendapatkan perhatian serius hampir dalam setiap pelaksanaan pembangunan adalah aspek pendidikan. Bidang pendidikan itu sendiri telah menjadi pilar utama penyangga keberhasilan pelaksaan pembangunan sosial. Hampir bisa dipastikan, bagi suatu daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki tingkat keberhasilan pembangunan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya relative rendah.

Terkait dengan pembangunan dibidang pendidikan, pesantren dalam praksisnya sudah memainkan peran penting dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Para kyai atau para ulama yang selama ini menjadi figuran masyarakat Indonesia, dan bukan sekedar sosok yang dikenal sebagai guru, senantiasa peduli dengan lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya. Mereka biasanya memiliki kometmen tersendiri untuk turut melakukan gerakan transformasi sosial melaui pendektan keagamaan. Pada esensinya, dakwah yang dilakukan kyai sebagai medium transformasi sosial keagamaan itu diorientasikan kepada pemberdayaan salah satunya aspek kognitif masyarakat. Pendidirian lembaga pendidikan pesantren yang menjadi ciri khas gerakan transformasi sosial keagamaan para ulama menendakan peran penting mereka dalam pembangunan sosial secara umum melalui media pendidikan.

Muculnya, tokoh-tokoh informal berbasis pesantren yang sangat berperan besar dalam menggerakkan dinamika kehidupan sosial masyarakat desa. Misalnya, tidak bisa dilepaskan dari jasa dan peran besar kyai atau ulama. Demikian pula, lahirnya pendidikan modern yang cukup pesat dewasa ini secara geneologis tidak bisa dilepaskan pula dari akarnya yakni, pendidikan pesantren.

G. Kesimpulan

Masuknya Islam di Indonesia agak unik bila dibandingkan dengan masuknya Islam ke daerah-daerah lain. Keunikannya terlihat kepada proses masuknya Islam ke Indonesia yang relatif berbeda dengan daerah lain. Islam masuk ke Indonesia secara damai dibawa oleh para pedagang dan mubaligh. Sedangkan Islam masuk di daerah lain pada umumnya lewat penaklukan, seperti masuknya Islam ke Irak, Iran, Mesir, Afrika Utara sampai Andalusia. Perbedaan pendapat tentang kapan, darimana, dan dimana pertama kali Islam datang ke Indonesia. Namun secara garis besar, perbedaan pendapat itu dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori dalam buku tersebut, yaitu: Teori Gujarat, Teori Makkah dan Teori Persia, Berita Jepang, Berita Ibnu Battutah, dan Menurut Taufik Abdullah
2. Seminar tentang masuknya Islam di Indonesia pada tahun 1963 di Medan dan di Kuala Simpang Aceh tahun Masuknya Islam di Indonesia pada umumnya berjalan secara damai. Akan tetapi, adakalanya penyebaran harus diwarnai dengan cara-cara penaklukan. Hal itu terjadi jika situasi politik di kerajaan-karajaan itu mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan.

Secara umum Islam masuk di Indonesia dengan cara-cara sebagai berikut: Perdagangan, Perkawinan, Gerakan Dakwah, Pendidikan, Tasawuf, Akulturasi Budaya dan Kesenian. Melalui kerajaan Islam di indonesia antara lain; Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Perlak, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Gowa-Tallo, serta Kerajaan Ternate dan Tidore

Proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran aktif yang dilakukan oleh para ulama. Melalui merekalah Islam dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat Nusantara. Para ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara antara lain sebagai berikut: Hamzah Fansuri, Syamsudin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Syeikh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Wali Songo.

Sebagai lembaga, pesantren dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Pesantren juga berusaha untuk mendidik para santri yang belajar pada pesantren tersebut yang diharapkan dapat menjadi orang-orang yang mendalam pengetahuan keislamannya dan dapat mengajarkannya kepada masyarakat, di mana para santri kembali setelah selesai menamatkan pelajarannya di pesantren.

Adanya posisi penting yang disandang pesantren menuntutnya untuk memainkan peran penting pula dalam setiap proses-proses pembangunan sosial baik melaui potensi pendidikan maupun potensi pengembangan masyarakat yang dimilikinya.

Pesantren dalam praksisnya sudah memainkan peran penting dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Para kyai atau para ulama yang selama ini menjadi figuran masyarakat Indonesia, dan bukan sekedar sosok yang dikenal sebagai guru, senantiasa peduli dengan lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya. Pegangan bagi pesantren dalam menghadapi tantangan era modern sepert saat ini, yaitu prinsip *al-muhafadhah ala al-qadim al-salih aw al-akhdzu bil-jadid al-aslah.*

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 2002. *Jaringan Global dan Lokal, Islam Nusantara* . Mizan: Bandung.

----------------------. 1999. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad* XVII *dan* XVIII . Bandung: Mizan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2013. *Kabupaten Banyumas dalam Angka.* Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

Barsany, al. Noer Iskandar. 2002. *Tasawuf, Tarekat dan Para Sufi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

--------------------------------. 2007. KH. *Askandar, Sejarah dan Perjuangan Pendiri Pondok Pesantren Manbaul Ulum Berasan Banyuwangi*. Surabaya: Visipress

--------------------------------------, 1990. Riwayat Hidup dalam Teologi al-Maturidi, *Tesis*, Fakultas Pascasarjana dan Pendidikan Doktor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

--------------------------------, 2002. *Aktualisasi Paham Ahlussunah Waljama'ah*. Jakarta: Srigunting PT Raja Grafindo Persada

Baqi, al. Muhammad Fuad 'Abd. 1981. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* . Beirut: Dar al-Fikr. cet. 2 Azra, Azyumardi. 2002. *Jaringan Global dan Lokal*, *Islam Nusantara* . Mizan: Bandung.

Darsono, dkk. Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam 3 kelas IX Mts. Solo: PT Tiga SerangkaiPustaka Mandiri, 2013.Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.LKS MA kelas XII program agama, Ulul Albab. Mojokerto: Mutiara Ilmu, 2014.

Sunanto, Musyrifah. Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012.Wathoni, Kharisul. Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Ponorogo: STAIN

BAGIAN 8

KORELASI SOSPOLEKBUD DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari unsur sosial dan budaya. Sepanjang kegiatan kehidupan manusia, aktivitasnya tidak terlepas dari kelompok manusia lainnya. Karena hal itu dikatakan bahwa manusia adalah maKhluk sosial karena memerlukan kehadiran dan bantuan serta peran serta orang lain. Sosial budaya ini tercermin pada kegiatan sekelompok manusia secara bersama-sama.

Hal-hal yang dikerjakan manusia, cara mengerjakannya, bentuk pekerjaan yang diinginkan merupakan unsur sebuah budaya.Maka, aspek sosial ditinjau dari hubungan antara individu, antar masyarakat serta aspek budaya ditinjau dari proses pendidikan manusia tersebut melalui materi yang di pelajari, cara belajarnya, bagaimana gaya belajarnya, bentuk-bentuk belajar serta pengajaranya.

Pendidikan pada hakikatnya adalah kegiatan sadar dan disengaja secara penuh tanggung jawab yang dilakukan orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan yang dilakukan secara bertahap berkesinambungan di semua lingkungan yang saling mengisi (rumah tangga, sekolah, masyarakat)unsur sosial merupakan aspek individual alamiah yang ada sejak manusia itu lahir. Langeveld mengatakan "setiap bayi yang lahir dikaruani potensi sosialitas atau kemampuan untuk bergaul, saling berkomunikasi yang pada hakikatnya terkandung unsur saling memberi dan saling menerima.[96]

Aktivitas sosial tercermin pada pergaulan sehari-hari, saat terjadi interaksi sosial antarindividu yang satu dengan yang lain atau individu dengan kelompok, serta antar kelompok. Didalam interaksi ini ada keterkaitan yang saling mempengaruhi (Abu Ahmadi, 2003:13).

A. Politik Pendidikan

Pendidikan adalah sala satu bentuk interaksi manusia. Pendidikan adalah suatu tindakan sosial yang pelaksanaanya dimungkinkan melalui suatu jaringan hubungan- hubungan kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan peranan individu di dalamnyalah yang menentukan watak pendidikan di suatu masyarakat

Jika politik dipahami sebagai "praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumberdaya dan nilai-nilai sosila". Maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Politik adalah bagian dari paket kehidupan

96 Oemar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara,2005), hal.18.

lembaga- lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldridge, lembaga- lembaga pendidikan dipandang sebagai sitem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik.

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitanya dengan aspek-aspek kependidikan.

B. Aspek-Aspek Dalam Pendidikan

Pendidikan tidak akan terlaksana secara baik bila tidak memandang pada bermacam-macam aspek. Yang dimaksudkan dengan aspek disini adalah sudut pandang, maka sudut pandang tersebut sangat menentukan dalam mempertimbangkan sesuatu. Dalam Pendidikan, memang ada beraneka ragam aspek, di antara aspek yang dominan adalah politik dan sosial.

C. Aspek politik dalam pendidikan

Sebagaimana di maklumi bahwa yang hendak dituju oleh pendidikan nasional ialah pendidikan yang yang menuju kepada masyarakat industri yang tidak terlepas dari tujuan politik ideologi bangsa kita sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, Pancasila dan GBHN. Sistem Pendidikan Nasional telah merumuskan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan, yaitu : Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 kemasyarakatan dan kebangsaan.[97]

97 Asnawir, *Administrasi Pendidikan*, Padang : IAIN Press, 2003

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemajuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional; Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekertu luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab

Apabila dilihat rumusan tersebut di atas, kelihatannya sudah jelas dan sistematik serta merupakan kerangka acuan bagi politik pendidikan nasional dalam semua aspek pendidikan. Sebenarnya rumusan ini merupakan penjabaran dari politik ideologi nasional ke dalam sektor pendidikan. Pada dasarnya pembangunan dalam sektor pendidikan adalah aspek dari pembangunan politik bangsa, yang tidak lain sebagai konsistensi antara arah politik dengan cetak biru pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.[98]

Tujuan nasional sebagai ideologi dasar dari masyarakat dan bangsa kita menjiwai terbentuknya masyarakat industri modern, ideologi pembangunan dan politik pendidikan nasional. Ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi sangat menentukan nya, karenanya sangat perlu diketahui oleh masyarakat serta berkembangnya kehidupan demokrasi. Maka demokrasi modern memerlukan rakyat yang selain berpaham nasionalis itu juga berwatak demokrat. Baik paham nasionalisme maupun watak demokrat tidaklah tumbuh sendiri, melainkan harus dididikan melalui proses sosialisasi pendidikan politik.

Dengan demikian, masyarakat industri modern adalah masyarakat yang mengacu pada kualitas dalam segala aspek kehidupan, kualitas tersebut akan hidup dalam masyarakat yang

98 HAR Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung : Rosdakarya, 2003), 161.

tinggi disiplinnya. Justru itu masyarakat industri modern yang diinginkan tidak dapat dilepaskan dari dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta GBHN, dengan intinya adalah pemerataan, kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia dan pembangunan yang berbudaya nasional.

Salah satu unsur politik pendidikan yang menunjang kehidupan masyarakat industri modern ialah pendidikan yang memperioritaskan kepada kualitas. Pemberian prioritas kepada kualaitas bukan berarsi suatu sistem pendidikan yang elitis tetapi yang memberi kesempatan kepada setiap orang mengembangkan bakat sesuai kemampuannya dengan. Pendidikan yang selektif untuk rogram yang relevan, pendidikan untuk anak pintar, merupakan program yang perlu dilaksanakan.

Politik pendidikan dengan sadar menyiapkan tenaga yang cukup jumlahnya dan terampil untuk mendukung masyarakat industri perlu dengan sungguh-sungguh disiapkan. Persoalannya ialah masyarakat industri modern yang akan kita bina adalah masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu pendidikan merupakan landasan utama bagi tumbuhnya rasa nasionalisme yang positif. Usaha ini tentu saja harus mendapat perhatian utama dalam pendidikan dasar 9 tahun (wajar 9 tahun). Pelaksanaan politik pendidikan ini menuntut cara penyajian yang efektif sesuai dengan taraf pendidikan rakyat dan tumbuhnya kehidupan yang terbuka. Untuk itu metodologi yang rasional dan kritis sangat diperlukan sehingga mampu mengolah berbagai bentuk arus globalisasi.

Dalam hal ini, akhirnya politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efesien dan dikelola oleh yang profesional. Yang tidak dapat dielakkan ialah keterpaduan antara berbagai jenis dan jenjang pendidikan nasional sebagai sistem pengelolaan pembangunan nasional.

D. Aspek sosial dalam pendidikan

Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial (*Soscial Being atau homo saphiens*). Kita sebagai manusia dilahirkan ke alam dunia ini dalam kondisi yang lemah, tak berdaya. Karena manusia tidak berdaya, maka dia tidak akan sanggup melangsungkan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

Fithrah-potensi manusia yang dibawa semenjak lahir baru dapat dan bisa berkembang dalam pergaulan hidupnya, dan manusia yang dilahirkan itu tidak akan menjadi manusia tanpa pengembangan potensi tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Di antara nash yang menyatakan demikian, dapat dipahami dari surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu:[99]

يأيهـــا النـــاس إنّـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر او انثـــى و جعلنـــاكم شـــعوبا و قبائـــل لتعارفوا

Arinya: Hai manusia sesunggunya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.

Dari nash tersebut diatas dapat di artikan betapa penting nya memperdayakan masyarakat. Untuk memperdayakan masyarakat, yang pertama adalah mengembang kan potensinya. Potensi tersebut dapat dikembangkan adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, manusia akan berwawasan, mempunyai bermacam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang akan menjadikan seseorang atau masyarakat dapat diperdayakan untuk bermacam-macam kepentingan, baik yang berhubungan dengan pribadinya maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Kedua, dengan jalan sosialitas manusia (social

99 Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Toha Putra, 1997)

being), dalam ajaran Islam inilah yang dikenal dengan ta'arafu-berkenalan, menjalin hubungan secara baik. Keadaan seperti itulah yang dikehendaki oleh ajaran Islam sekaligus memperdayakan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan, khususnya dalam mengelola pendidikan.

Apabila seseorang telah dapat bergaul dan menyesuaikan dirinya dengan kehidupan kelompoknya, berarti orang tersebut dapat mengenal nilai yang berlaku dalam kehidupan sosialnya, sekaligus memperkembangkan pribadinya. Dengan interaksi sosial itu manusia dapat merealisasikan kehidupannya, sebab tanpa timbal balik dalam interaksi sosial itu, ia tidak akan dapat merealisasikan kemungkinan dan potensi-potensinya sebagai individu.[100] (Gerungan, 1966: 26). Mengenai sosialitas manusia (social being) terlaksananya pendidikan secara baik adalah dengan saling tolong-menolong sebagai makh luk sosial. Pernyataan ini dapat dipertegas dengan firmanAllah:[101]

وتعاونوا علي البرّ و التّقوي (المائدة

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa.

Aspek-aspek sosial pendidikan dapat digambarkan dengan memandang ketergantungan individu-individu satu sama lain dalam proses belajar. Makhluk-makhluk bukan manusia seperti binatang buas, burung-burung, atau serangga dapat hidup hanya berpedoman pada warisan biologis, suatu program genetik bagi tingkah laku makhluk hidup. Pola-pola diwarisi mengajarnya memelihara anaknya, mencari makan, dan menjaga kawasannya.

Sebaliknya, kebanyakan yang perlu diketahui oleh manusia tidak diprogramkan melalui genetik. Semenjak dan masa sangat

100 Departemen Agama RI. Al-Qur`an dan Terjemahnya, Surabaya : Toha Putra, 1997

muda lagi kanak-kanak sudah harus mulai mempelajari cara hidup yang begitu banyak macamnya. Cara hidup yang disebut kebudayaan itu tidak dapat diwariskan secara biologis, harus selalu dipelajari oleh setiap individu.

Sekolah, yang merupakan institusi formal untuk belajar, mengharuskan sejumlah persyaratan kepada pendidikan. Akibatnya, belajar di sekolah sangat berlainan dengan yang berlaku di dalam keluarga, dengan teman-teman sebaya, atau dalam komunitas. Jadi pendidikan dalam pengertiannya yang sangat luas dapat dianggap sebagai suatu proses sosialisasi yang melaluinya seseorang mempelajari cara hidupnya.

Dimensi-dimensi sosial pendidikan yang dibicarakan dalam aspek-aspek sosial pendidikan adalah:

1. Aspek sosial pertama, yang ditanamkan oleh pendidikan yang berlaku disekolah, seperti pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda. Ini berlaku pada semua masyarakat, dahulu atau pun sekarang, termasuk dalam masyarakat Indonesia sendiri. Juga pewarisan keterampilan-keterampilan dan generasi ke generasi. ini juga berlaku di masyarakat manapun, walaupun teknologi keterampilan itu selalu berubah. Juga pewarisan nilai-nilai dan kepercayaan merupakan fungsi pendidikan. Nilai-niiai seperti kejujuran, solidaritas, gotong-royong adalah nilai-nilai yang tak dapat tidak harus terwujud kalau masyarakat itu akan hidup terus. Sebab kumpulan apapun tak akan hidup sebagai kumpulan tanpa nilai-nilai itu sebagai pemersatu.
2. Aspek sosial yang kedua, yang mempengaruhi pendidikan adalah ciri-ciri budaya yang dominan pada kawasan-kawasan tertentu di mana sekolah-sekolah itu wujud. Walaupun pengelompokan seperti ini tidak selalu memberi gambaran yang jernih terhadap kelompok yang dibicarakan di situ. Sebab faktor-faktor lain turut memainkan peranan di

dalamnya, seperti kepercayaan politik dan sosial, status sosio ekonoimi, kelas sosial, etnik, ras, agama dan lain-lain.

3. Aspek sosila ketiga, yang memainkan peranan pada pendidikan yaitu faktor-faktor organisasi, dan segi birokrasi. Adanya sistem adrninistrasi yang bersifat hirarkis dan biasanya berlaku pada tiap organisasi persekolahan. Juga hubungan-hubungan dan segi formal dan informal yang masing-masing tergantung pada sistem-sistem sosial yang mengadakannya. Begitu juga guru dan adininistrasi, hubungan orang tua, guru, hubungan teman-teman sebaya, dan hubungan guru, murid, semuanya besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendidikan.
4. Aspek sosial keempat, yang terpenting mempengaruhi pendidikan adalah sistem pendidikan itu sendiri. Istilah sistem pendidikan bermaksud suatu pola total masyarakat dalam institusi formal, agen-agen dan organisasi yang memindahkan pengetahuan dan warisan kebudayaan yang mempengaruhi pertumbuhan sosial, spiritual, dan intelektual seseorang. Walaupun mungkin kita menganalisa sistem pendidikan dalam kawasan kota, kota madya, propinsi dan lain-lain, tetapi biasanva dibuat dalam bentuk lebih besar, seperti sebuah negara. Tidak ada suatu sistem pendidikan yang tetap dan statis. Perlu juga disadari bahwa sistem pendidikan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan politik.

F. Budaya Politik Menurut Para Ahli

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah

begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.

1. Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

2. Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

3. Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

4. Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

5. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan

pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :

Pertama: Bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan **Gabriel A. Almond** memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.

Kedua: Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

Ketiga: Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal

G. Komponen-Komponen Budaya Politik

Seperti dikatakan oleh **Gabriel A. Almond** dan **G. Bingham Powell, Jr,** bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut **Ranney**, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.

Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (*cognitive orientations*) dan orientasi afektif (*affective oreintatations*). Sementara itu, **Almond dan Verba** dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.

Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.

Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan

H. Hubungan Pendidikan dengan Kehidupan Ekonomi

Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang ajeg dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin tinggi derajat pendidikan makin

tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Meskipun demikian, tidak jelas faktor mana yang muncul lebih dulu, apakah perkembangan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya. Terhadap permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi petumbuhan pendidikan (Bowles dan Gintis 1976, Adiwikarta 1988, Saripudin 2005).

Dalam kebijaksanaan pembangunan, kita gunakan asumsi bahwa keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat digunakan untuk pembangunan bidang lain, termasuk pendidikan. Selanjutnya, para penganut teori konsensus dan penganut teori konflik sepakat bahwa fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi ini adalah mempersiapkan pemuda pemudi untuk mengisi lapangan kerja produktif (Parelius, 1978: 50). Dalam hal mengenai pendidikan orang dewasa, tujuan yang hendak dicapai tentu bukan lagi mempersiapkan kemampuan, melainkan meningkatkannya agar peserta didik dapat mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat itu (Knowles, 1982: 53). Untuk itu mereka mendapat pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Proses tersebut terjadi pada semua masyarakat mulai dari yang paling tradisional sampai pada yang paling modern.* Makalah disajikan dalam International Seminar on Lifelong Education (ISLE), Tanggal 22-23 Agustus 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Ketiga lembaga penyelenggara pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, masing-masing melakukan peran yang berlainan tetapi saling melengkapi. Fungsi tiap lembaga tersebut pada masyarakat yang masih tradisional tentu berbeda pula pada masyarakat yang telah maju, karena tuntutan masyarakat yang

dilayaninya telah lain pula. Pada masyarakat tradisional, keluarga memegang peranan utama dalam menyiapkan generasi muda untuk menjadi manusia mandiri.Orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga tradisional berfungsi mengasuh berbagai keterampilan dan berbagai tradisi. Pada masyarakat modern, keluarga menyerahkan sejumlah fungsinya dalam pendidikan kepada lembaga-lembaga lain yang khusus bertugas menangani tugas itu.

Orang tua dan keluarga membatasi kegiatannya pada pengasuhan dasar dan kerjasama dengan sekolah dalam mendorong anak dan mengawasi pendidikan mereka. Sementara itu, pada masyarakat modern, sekolah berperan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus untuk menjawab tantangan spesialisasi yang semakin luas dan tajam. Sekolah menjadi terbuka untuk masyarakat luas. Prinsip "equal opportunity" dalam pendidikan makin merupakan kenyataan, meskipun masih mengandung banyak persoalan yang hangat. Sekolah yang elitis berubah menjadi "populis" melalui program wajib belajar. Dengan sendirinya materi pengajaran dan metode mengajar yang diselenggarakan pada masyarakat modern akan berlainan dengan yang diselenggarakan pada masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional. Dalam pada itu, fungsi selektif dan alokatifnya pun tentu memiliki perbedaan-perbedaan pula. Sekolah bersama keluarga berperan menyiapkan anak dan pemuda untuk memangku jabatan dan lapangan kerja yang bervariasi.

Peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan kehidupan ekonomi lingkuangan pendidikan ekonomi tradisional ekonomi modern keluarga memegang peran utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa (keterampilan, mental, nilai, sikap), yaitu:

1. Melakukan pengasuhan dasar
2. Menyerahkan pendidikan pada anak berusia tertentu kepada sekolah
3. Mendorong, membantu, mengawasi anak pada sistem sekolah
4. mempersiapkan golongan elite dengan kemampuan dasar (baca, tulis, hitung)
5. Fungsi selektif
6. Menyaipkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan
7. Fungsi Selektif
8. Fungsi Alokatif
9. Fungsi alokatif Masyarakat
10. Menyediakan model untuk ditiru
11. Menyelenggarakan latihan magang
12. Menyelenggarakan upacara inisiasi
13. Menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir
14. Menyediakan media komunikasi
15. Menyediakan arena kompetisi Sumber: Adiwikarta (1988: 46-47)

Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa antara pendidikan dengan sistem ekonomi terdapat huibungan dua arah. Dalam masyarakat yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih besar kerena orang-orang telah lebih siap dan lebih banyak dana tersedia. Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan merupakan komponen-komponen utama dari definisi operasional dari status kelas

sosial atau status sosio ekonomi dan bahwa terdapat suatu korelasi tinggi di antara mereka (Miflen, 1986: 242).

I. Hubungan Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan secara universal berarti upaya pengubahan manusia menjadi lebih cerdas, yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kecerdasan di sini jangan ditafsirkan sebagai kecerdasan kognitif atau intelektual belaka, tapi kecerdasan manusia yang seutuhnya, kecerdasan total manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Di negara berkembang dan terbelakang, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada di negara maju. Meski demikian, umumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di negara maju. Kenapa demikian? Jawabnya adalah: kedua faktor selain tenaga kerja, sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan Prof ekonomi dari Harvard Dale Jorgenson et al. (1987) pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-1979 misalnya menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (capital formation), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi.

Menurut Elwin Tobing102, Dewasa ini berkembang paling tidak tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan

102 http://www.theindonesianinstitute.org/janeducfile.htm

antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial. Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang hadian Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, juga pemenang hadiah nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini. Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih 4 rendah.

Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi. Pada tahun 70-an, teori ini mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan.

Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya noon formal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari

Meyer (1977) dan Collins (1979). Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan.

Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang bependidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.

Akan halnya teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan kelas menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini didukung antara lain oleh Bowles dan Gintis (1976).

Menurut Amich Alhumami103, pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahan tesis itu. Buku terakhir William Schweke, Smart Money: Education and Economic Development (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan

---

103 (http:// www.kompas.com/ kompas-cetak/ 0505/ 03/ opini/ 1724824. htm),

keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Pada saat sekarang ini paradigma pembangunan yang merujuk knowledge-based economy tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal.

Pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia Timur lain seperti Singapura, China, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.

Tidak diragukan lagi, salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea adalah komitmen yang kuat dalam membangun pendidikan. Berbagai studi menunjukkan, basis pendidikan di Korea memang amat kokoh. Pemerintah Korea mengambil langkah-langkah ekspansif antara 1960-an dan 1990an guna memperluas akses pendidikan bagi segenap warga negara. Program wajib belajar pendidikan dasar (universal basic education) sudah dilaksanakan sejak lama dan berhasil

dituntaskan tahun 1965, sementara Indonesia baru mulai tahun 1984.

Sedangkan wajib belajar jenjang SLTP berhasil dicapai tahun 1980-an; dan jenjang SLTA juga hampir bersifat universal pada periode yang sama. Yang menakjubkan, pada jenjang pendidikan tinggi juga mengalami ekspansi besar-besaran; lebih dari setengah anakanak usia sekolah pada level ini telah memasuki perguruan tinggi. Komitmen Pemerintah Korea terhadap pembangunan pendidikan itu tercermin pada public expenditure. Pada tahun 1959, anggaran untuk pendidikan mencapai 15 persen dari total belanja negara, guna mendukung universal basic education dan terus meningkat secara reguler menjadi 23 persen tahun 1971.

Setelah program ini sukses, Pemerintah Korea mulai menurunkan anggaran pendidikan pada kisaran antara 14 sampai 17 persen dari total belanja negara atau sekitar 2,2 sampai 4,4 persen dari GNP. Menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan bagian dari public good, tercermin pada social return lebih tinggi dibanding private return, maka Pemerintah Korea mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar jauh lebih besar dibanding level menengah dan tinggi. Penting dicatat, selain faktor basis pendidikan yang lebih kuat, kelas menengah ekonomi di Korea juga terbentuk dengan baik dan mapan. Pada dekade antara 1960-an dan 1980-an, kalangan pengusaha Korea telah membangun hubungan dagang dan membuka akses pasar ke negara-negara kawasan seperti Jepang, bahkan telah menyeberang ke Amerika dan Eropa.

Korea sukses melakukan inovasi teknologi (otomotif dan elektronik) karena memperoleh transfer teknologi melalui hubungan dagang dengan negara-negara maju tersebut. Bercermin pada pengalaman Korea, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata

berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Untuk itu, investasi di bidang pendidikan harus didukung pembiayaan memadai, terutama yang diperuntukkan bagi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Mengikuti agenda Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar akan memperoleh pendidikan dasar.

Bersamaan dengan itu, akses ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga harus diperluas, guna mendukung upaya menciptakan knowledge society yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa depan. Pendidikan perlu juga memperhatikan kesempatan perempuan dalam mengaksesnya. Pendidikan adalah salah satu jalan menjadikan perempuan menjadi agen 6 perubahan, bukan sekadar penerima pasif program pemberdayaan. Seperti yang disebutkan Amartya Sen, pendidikan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perempuan memiliki independensi ekonomi dengan bekerja di luar kerja di rumahnya. Independensi ekonomi ini membuat perempuan memiliki suara di dalam rumah maupun di masyarakat, antara lain dalam mengatur pembagian "harta" keluarga seperti makanan, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dan perempuan yang memiliki sumber penghasilan di tangannya, cenderung membelanjakan penghasilan itu untuk kesejahteraan anak-anaknya, generasi penerus bangsa.

Untuk memberikan perempuan kesempatan yang lebih besar bisa menikmati pendidikan, pemerintah harus menjalankan perannya secara aktif. Letak sekolah, misalnya, harus sedekat mungkin dengan desa atau kecamatan. Baju seragam mungkin tidak perlu lagi, karena harga baju seragam yang bisa lebih mahal untuk anak perempuan bisa jadi penghalang orangtua menyekolahkan anak perempuannya. Program beasiswa yang mengutamakan anak perempuan juga

bisa menjamin tidak melebarnya kesenjangan jender dalam pendidikan. Tentu saja, affirmative action ini akan selalu ditinjau agar laki-laki dan perempuan mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Schultz (1974) dan Deninson (1962) kemudian memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan interest selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep "revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis". Para peneliti lainya seperti Deninson (1962), Becker (1969) dan yang lainya turut melakukan pengujian terhadap teori human capital ini. Perkembangan tersebut telah memengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investment) dan menjadi "leading sektor" atau salah satu sektor utama.

Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Pada tahun 1970-an, penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan

dan pertumbuhan ekonomi sempat mandeg karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Becker (1964) mengatakan bahwa teori human capital ini lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya.

Kritik Becker ini justru membuka persepektif dari keyakinan filosofis bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorentasi pada dimensi kemanusiaan 7 merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (human dignity). Penelitian Hick (1980), Wheeler (1980), dan beberapa peneliti neoklasik lain, telah dapat menyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung bahkan seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya ke berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya (Psacharopoulos, 1984).

Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut. Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam

bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

J. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI). Laporan HDI tahun 2003 menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 [0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). Meski laporan HDI bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara.

Dalam kenyataannya, sekarang ini masih ada banyak siswa miskin tidak dapat menikmati pendidikan dasar. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Fasli Jalal, masih ada belasan juta anak usia sekolah yang tidak terlayani pendidikannya. Masih ada 1.422.141 anak di usia 7-12 tahun, 5.801.122 pada usia 13-15 tahun, dan 911.394 anak di usia 16-18 yang tidak dilayani pendidikannya (Kompas, 13 Oktober 2003). Inilah yang kiranya perlu diperhatikan oleh pemerintah dan juga wakil rakyat yang memenangi pemilihan umum (pemilu), bagaimana mereka dapat bersekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dalam tuntutan modernisasi dan globalisasi, pendidikan yang bermutu adalah suatu kebutuhan yang semakin penting agar mereka survival dalam persaingan yang semakin ketat. Kebutuhan akan pentingnya pendidikan yang bermutu telah disejajarkan dengan kebutuhan primer lainnya seperti sandang, pangan, dan papan.

Tanpa pendidikan, yang bermutu mereka akan tetap tertinggal dan berada dalam strata sosial paling bawah. Timbulnya semangat para orang tua khususnya dari masyarakat strata bawah untuk menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat pendidikan yang paling tinggi dan berkualitas adalah suatu sikap yang harus didukung oleh semua pihak. Namun semangat ini kandas dalam ketidak berdayannya akibat tidak tejangkaunya biaya pendidikan yang berkualitas. Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan mutu, khususnya bagi sekolah negeri akan tetapi pelaksanaannya kurang merata. Jika ada pelaksanaan pelatihan atau penataran guru, hanya guru tertentu yang diikut sertakan.

Jika ada pengadaan peralatan pendidikan, hanya sekolah-sekolah tertentu yang mendapatkannya. Semua ini dilaksanakan tanpa studi yang faktual, objektif, dan terinci. Hal ini merupakan, suatu titik terang perlu mendapat kajian lebih dalam sehingga pemerataan pendidikan yang bermutu dapat terwujud. Sering terjadi bahwa sekolah-sekolah swasta kurang diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam peningkatan mutu guru maupun sarana dan prasarana lainnya Lemanya pengawasan terhadap standar mutu dan pengaturan/penentuan berbagai tarif, baik itu uang sekolah/kuliah, uang pembangunan, maupun bentuk kutipan lainnya merupakan benang merah yang harus dicarikan solusinya.

Kenyataan menunjukkan pemerataan pendidikan yang bermutu dan terjangkau khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih perlu dipertanyakan. Banyak sekolah atau perguruan tinggi yang bermutu, baik negeri maupun swasta dipadati oleh anak-anak dari golongan ekonomi atas. Kenyataan, setiap tahun ajaran baru tiba permasalahan lama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu yang umumnya menghantui pikiran kebanyakan orang tua, khususnya orang tua yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah.

Keterbatasan daya tampung pendidikan yang diselenggarakan pemerintah membuat persaingan semakin ketatsehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi praktek di luar norma yang telah ditentukan. Pendidikan memang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika tidak, maka sektor ini juga akan menyumbang pada terjadinya pengangguran. Ada paling tidak tiga model perencanaan di bidang pendidikan dikaitkan dengan kemanfaatannya. Pertama, pendidikan direncanakan atas dasar social demand approach.

Dalam pendekatan ini program pendidikan memang dibuat atas dasar permintaan yang ada di dalam masyarakat.Masyarakat ingin sekolah, kemudian ditawarkanlah berbagai program pendidikan kepada mereka. Jika masyarakatnya mampu berpikir rasional, pendekatan ini tidak menjadi masalah. Tetapi manakala masyarakat selalu mau masuk ke satuan pendidikan, meskipun tidak bermutu, hasilnya tidak akan banyak membantu pada persoalan pengangguran. Masyarakat yang tidak kritis akan lebih mementingkan ijazah daripada kompetensi. Bahkan beli ijazah pun bisa jadi.

Kondisi ini sudah menghinggapi beberapa anggota masyarakat dan juga para pejabat kita yang suka membeli gelar demi gengsi. Dalam budaya seperti ini, jelas sekali bahwa proses pendidikan akan berkontribusi pada penganggur semata. Para lulusan satuan pendidikan yang tujuan sekolahnya hanya untuk mendapatkan gelar dan ijazah, hasil pendidikan yang mereka peroleh tidak akan mampu menolong diri mereka sendiri ketika menghadapi persoalan pengangguran. Model perencanaan pendidikan yang kedua dapat dilakukandengan economic return approach. Dalam pendekatan ini pendidikan dapat dianalogikan dengan proses produksi. Dengan menghitung berbagai ongkos yang terlibat dalam program pendidikan (input-proses-produk) dan kemudian melihat produktivitas para lulusan, maka dapat

dikatakan apakah sebuah program pendidikan akan hanya berkontribusi pada penganggur atau memang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki dampak ekonomi secara positif. Dalam model ini pendidikan memang harus bisa menjaga relevansi dan akuntabilitas program yang ditawarkan. Ketika para lulusan tidak bisa berperan dalam dunia kerja yang biasanya ditandai dari rendahnya gaji mereka, atau bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, maka pendidikan yang sedang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat dikatakan gagal, dan dengan demikian hanya akan berkontribusi pada semakin banyaknya penganggur.

Saat ini banyak program pendidikan yang tidak mampu memberikan keuntungan ekonomik bagi upaya investasi yang telah dilakukan oleh penyelenggaranya. Lulusan yang tidak memiliki produktivitas tentu akan berkontribusi pada penganggur. Terlebih-lebih di negeri ini sulit untuk menghapus program pendidikan yang memang jelas-jelas tidak mampu meluluskan lulusannya dengan produktivitas yang memadai di masyarakat. Bahkan tidak jarang pendidikan itu sendiri justru merupakan bagian dari tempat untuk sekadar mencari nafkah bagi penyelenggaranya.

Pendidikan yang seperti ini yang memperburuk keadaan pengangguran di negeri ini. Bahkan ada gejala bahwa sekolah menolak gerakan-gerakan yang pro pada kualitas. Sebagai bukti empirik, dengan ujian nasional yang mematok nilai standar minimal 5,25 (tahun 2008) untuk pendidikan dasar dan menengah banyak sekolah dan anggota masyarakat yang protes. Protes mereka sebenarnya tidak berada pada alasan demi pendidikan. Tetapi lebih untuk menjaga kelestarian sekolah-sekolah mereka yang memang terancam oleh banyaknya siswa yang tidak lulus jika standar nilai itu diberlakukan. Kalau banyak anak yang tidak lulus, maka sekolah itu terancam tidak laku. Ketika sekolah dan masyarakat tidak pro kualitas, maka lulusan

mereka tidak memiliki economic return sama sekali, dan dengan demikian pendidikan yang seperti itu akan berkontribusi pada semakin meningkatnya penganggur kita.

Oleh karena itu, dalam jangka panjang persoalan kualitas lulusan harus menjadi kepentingan semua pihak, baik sekolah, orangtua, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. Kualitas sekolah kita pada saat ini sudah memasuki lampu kuning. Untuk mengatasinya perlu dukungan dari semua stake holder secara sinergis.

Alternatif yang mungkin seperti berusaha dengan pemahaman tentang dunia usaha yang sudah terbentuk sejak di bangku sekolah. Implementasi kewiraswastaan ini tidak hanya proses belajar di kelas, tetapi lebih pada perangsangan dan penggalian ide, pengenalan dunia usaha dan pengetahuan tentang berusaha. Ini kemudian melibatkan dunia usaha dimana baik secara fungsional dan institusi, dunia usaha dapat membantu pengimplementasian program tersebut. Dalam kewiraswastaan ter-internalize semangat kerjasama, kerja keras dan penghargaan akan waktu.

Dengan demikian pengimplementasiaan kewiraswastaan terhadap pendidikan nasional baik menengah dan tinggi dengan secara serius dan melibatkan dunia usaha secara sungguh-sungguh akan mendorong lahirnya generasi penerus yang berwatak kerja keras, memiliki toleransi dan mandiri. Selama Orde Baru, para pelaku dunia usaha muda umumnya karena memiliki kedekatan dengan birokrat, aparat dan karena dari keluarga bisnis. Memang ada satu dua yang berhasil dengan kerja keras dan keuletan tetapi dari segi persentase, jumlahnya relatif kecil. Jadi pengembangan kewiraswastaan ini dengan sungguh-sungguh akan berdampak ganda, yakni dapat menjadi salah satu solusi dalam masalah mismatch dan juga mempersiapkan

K. Kesimpulan

Pendidikan adalah suatu tindakan sosial yang pelaksanaanya dimungkinkan melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan-peranan individu di dalamnyalah yang menentukan watak pendidikan di suatu masyarakat. Politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan.

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur- unsur politik, begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitanya dengan aspek- aspek kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Gaffar, MS., Dasar Dasar Administrasi dan Supervisi Pengajaran, Padang : Angkasa Raya, 1992

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung : Rosdakarya, 2005

Asnawir, Administrasi Pendidikan, Padang : IAIN Press, 2003

Departemen Agama RI. Al-Qur`an dan Terjemahnya, Surabaya : Toha Putra, 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Harold G. Shane, Arti Pendidikan Bagi Masa Depan, Jakarta : Rajawali, 2003

HAR Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Bandung : Rosdakarya, 2003

M.Sirozi, Politik Pendidikan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 2003

Oemar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran, Jakarta : Bumi Aksara,2005

Soedijarto, Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu, Jakarta : Balai Pustaka, 2001

Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta : Rineka Cipta, 200

BAGIAN 9

TANGGUNG JAWAB POLITIK DAN PEMBUDAYAAN PENDIDIKAN ISLAM SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN RI

OLEH : ADI ERMA ROSINAI

A. Pengertian Tanggung Jawab dan Politik

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Dalam pergaulan sehari-hari bertanggung jawab pada umumnya diartikan sebagai "berani menanggung risiko (akibat) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Atau sering pula diartikan

sebagai “berani mengakui suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan”. Pengertian tanggung jawab tersebut belum cukup, karena yang bersangkutan tidak pernah memikirkan apakah perbuatan atau tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai hidup yang luhur, apakah sesuai dengan nilai-nilai susila yang berlaku dalam kehidupan manusia yang sopan beradab, dan beragama.[104]

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Maka, tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usah melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual ataupun teologis.

104 Uyoh Sadulloh, dkk, *Pedagogik,* (Bandung: Alfabeta,2010), hal.175.

2. Pengertian Politik

Menurut KBBI, politik adalah **(1)** pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): bersekolah di akademi, **(2)** segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang ekonomi, dan kebudayaan, partai, organisasi, **(3)** cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan: dagang, bahasa nasional.[105]

Politik (dari bahasa Yunani: *politikos*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

a. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

b. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

c. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

d. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

105 http://kbbi.web.id/politik, 15/7/2017, 0:04

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Ramlan Surbakti (1999 : 1) bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.[106] Menurut Peter Merlk "politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan" Secara umum politik (politics) adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.[107]

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Segala sesuatu usaha untuk meraih keberhasilan suatu kegiatan yang Telah di rencanakan untuk mencapai tujuan individu maupun kelompok itulah politik.

3. Pengertian Pembudayaan

Menurut KBBI, pembudayaan berasal dari kata budaya /bu·da·ya/ *n* **1** pikiran; akal budi: *hasil* --; **2** adat istiadat: *menyelidiki bahasa dan* --; **3** sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): *jiwa yang* --; **4** *cak* sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah; Pembudayaan/pem·bu·da·ya·an/ *n* **1** proses, cara,

106 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 13.
107 Ibid., hal. 15.

perbuatan membudayakan; **2** *Antr* proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap.[108]

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan bila di tinjau dari konteks kebudayaan, maka pendidikan dimaknai sebagai proses pembudayaan peserta didik. Budaya itu sendiri merupakan buah keadaban manusia. Selanjutnya melalui proses pendidikan, peserta didik dituntun menjadi manusia yang makin beradab dan berahlak. Adalah keliru apabila peserta didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka, melalui pendidikan agama dan budaya Islami yang ada di madrasah-madrasah kiranya menjadikan peserta didik berilmu serta beradab dan berakhlak.

Pendidikan Islam bertanngung jawab membudayakan manusia kearah yang lebih baik secara berkesinambungan agar menjiwai diri manusia itu sendiri. Dengan demikian pembudayaan mensyaratkan 'penghayatan' dan 'perbuatan' nyata yang timbul pada individu sebagai hasil pendidikan, baik yang berlangsung dalam keluarga, di masyarakat, ataupun dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Dalam pengertian ini, hasil nyata pendidikan dapat dilihat dari seberapa tinggi penghayatan peserta didik terhadap apa yang diperolehnya melalui pendidikan serta seberapa ia mampu berbuat untuk memperoleh manfaat dari pendidikannya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakatnya.

Peserta didik yang memperoleh berbagai pengetahuan melalui proses pendidikan formal, misalnya, tetapi tidak pernah mengetahui manfaat dari apa yang diketahuinya itu, jelas tidak tersentuh oleh proses pembudayaan secara memadai. Peserta didik yang hanya melihat (disadarinya atau tidak) proses pembelajaran sebagai usaha untuk bisa menjawab soal-soal ujian atau untuk lulus atau memperoleh nilai bagus

108 http://kbbi.web.id/budaya, 15/7/2017, 1:08

dalam evaluasi akhir merupakan contoh lain dari kurang memadainya sentuhan pembudayaan dalam pendidikan yang dialaminya.

Proses pembudayaan melalui pendidikan sangat ditonjolkan dalam empat pilar pendidikan UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar untuk mandiri (*learning to be*). Pendidikan dalam konsep empat pilar ini dengan jelas mengacu kepada kualitas manusia yang bertumpu pada penguasaan IPTEK melalui proses belajar menemukan dan belajar (*learning to learn*) secara terus menerus; penguasaan keterampilan untuk mampu melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah-masalah; kemampuan memahami dan hidup dengan orang lain dalam suasana saling membutuhkan dan saling menghormati; dan kematangan kepribadian untuk mampu berpikir dan berbuat secara mandiri dan bertanggungjawab.

Di Indonesia konsep pendidikan seperti ini telah lama dilontarkan Raka Joni (1983), yang menggarisbawahi manusia sebagai urusan utama pendidikan dan mendewasakan peserta didik sebagai misi utamanya. Menurut Raka Joni, Tujuan pendidikan yang hakiki: peningkatan martabat kemanusiaan. Ini berarti disadarinya asal-muasal keberadaan diri (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa), kesatuan diri dengan sesama (Perikemanusiaan), kebersediaan menggunakan secara bersama lingkungan alamiah maupun buatan (Keadilan Sosial), kebersediaan untuk bekerja bersama atas dasar saling menghormati dan menghargai (Demokrasi), dan semangat keterikatan pada ruang dan waktu di dalam berkarya secara konkret meningkatkan kualitas kehidupan (Kebangsaan) (Raka Joni, 1983:32).[109]

109 http://silmaafiefa.blogspot.co.id/2014/10/pendidikan-dan-proses-pembudayaan_18.html, 6/8/2017, 16;29

4. Pengertian Pendidikan Islam

Zakiah Derajat, mengatakan kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa arabnya adalah “tarbiyah”, dengan kata kerja “rabba”. Kata “pengajaran” dalam bahasa arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerjanya “alama”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arabnya “tarbiyah wa ta’lim” sedangkan “pendidikan Islam” dalam bahasa arabnya adalah “tarbiyah Islamiyah”. Kata kerja rabba (mendidik) sudah di gunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW.[110]

M. Arifin, pendidikan secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan” (opvoeding) kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, juga sering diartikan dengan “menumbuhkan” kemampuan dasar manusia.[111] Jadi, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya, dengan kata lain pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi.

Agama islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal kehidupan yang baik dan terarah.

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah proses kombinasi. Kombinasi karena memadukan beberapa unsur di dalamnya, (tidak bisa berdiri sendiri). Pendidikan Islam adalah sebuah penggabungan dari tata nilai Islam yang dimaksudkan untuk perbaikan generasi. Pendidikan islam merupakan suatu cara untuk melakukan perbaikan generasi.

---

110 Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hal. 25

111 M. Arifin, *ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi aksara, 1991), hal. 32..

Apalagi generasi pemuda sekarang sudah banyak yang tidak peduli lagi dengan ajaran-ajaran agama yang berlaku, jadi pendidikan Islam sangatlah penting.

Secara sederhana pengertian pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktek sejarah umat Islam, jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sisitem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pengertian ini dapat dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem, yang didalamnya terdapat beberapa komponen yang saling terkait. Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. pendidikan Islam lebih menekan pada perubahan tingkah laku, dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang maksimal, dari yang potensial menjadi aktual, dari yang pasif menuju yang aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses perubahan tingkah laku sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan melalui pembiasaan, bimbingan untuk membentuk kepribadian muslim pada diri seseorang guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat.

Intinya pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan (berwawasan islam). Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Bagi umat Islam agama adalah dasar (pondasi) utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan

yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat *ubudiyyah* (mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya), maupun yang bersifat *muamalah* (mengatur hubungan manusia dengan sesamanya) (Zuhairini, 1993:153). Adapun dasar-dasar dari pendidikan Islam adalah:

a. Al-Qur'an

Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang diungkapkan oleh Subhi Shaleh, al-Qur'an berarti bacaan, yang merupakan kata turunan (*masdar*) dari fiil madhi qara'a dengan arti ism al-maful yaitu *maqru'* yang artinya dibaca (Atang Abd. Hakim dkk, 2000:69). "Bacalah dengan (menyebut) Nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. al-Alaq: 1-5).

Ayat tersebut merupakan perintah kepada manusia untuk belajar dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya termasuk didalam mempelajari, menggali, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada al-Qur'an itu sendiri yang mengandung aspek-aspek kehidupan manusia. Dengan demikian al-Qur'an merupakan dasar yang utama dalam pendidikan Islam.

b. As-Sunnah

Setelah al-Qur'an maka dasar dalam pendidikan Islam adalah as-Sunnah, as-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan apapun pengakuan Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an, Sunnah juga berisi tentang akidah,

syari'ah, dan berisi tentang pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia seutuhnya (Daradjat, 2006:20-21).

B. Tanggung jawab Politik Pendidikan Islam dan Pembudayaan Pendidikan Islam

1. Tanggung Jawab Politik Pendidikan Islam

Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang seiring sejalan dalam mencerdaskan bangsa. Kedua-duanya tidak berjalan sendiri-sendiri akan tetapi saling berhubungan atau berkaitan. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengurus politik dan negara. Negara mengalokasikan biaya untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Dalam perspektif Islam keterlibatan negara untuk membangun dan mendukung proses pembelajaran diberbagai lembaga pendidikan mutlak dibutuhkan.

Di dunia Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik terlihat jelas. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya. Dalam hal tanggung jawab politik pendidikan Islam disini yaitu pendidikan Islam berperan serta dalam mengembangkan SDM manusia atau warga negara yang berkepribadian Islami. Oleh karena itu pendidikan dalam Islam bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) saja akan tetapi juga berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan dan kepribadian (transfer of personality), hal ini berkaitan dengan kepribadian guru dan dosen dapat dicontohi oleh para peserta didik. Apabila peserta didik tidak mampu mempunyai kepribadian yang baik berarti proses pendidikan pada hari ini mengalami kegagalan, ini merupakan problem pendidikan yang kita hadapi di Negara Republik Indonesia. Jadi, pendidikan dalam Islam bukan semata-mata melakukan

transfer of knowledge, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak.[112]

Pendidikan dan politik terpisah merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Keduanya adalah unsur penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya saling bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu negara karena saling menunjang dan mengisi. Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Begitu juga sebaliknya, lembaga dan proses politik membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan.

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah suatu usaha untuk mengubah manusia dengan pengetahuan, tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan ideologi dan prinsip Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuan yang dipandu oleh Ideologi Islam, atau menjadi insan yang paripurna seperti yang diharapkan oleh Kementrian pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Tidak dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku (Rasyid, 1994 : 6).

Di antara lembaga pendidikan Islam yang menjadi corong pesan-pesan politik, menurut Rasyid (1994 : 6), adalah madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Madrasah ini terkenal dengan munculnya pemikir besar seperti al-Ghazali yang telah mentransfer ilmu pengetahuan sehingga

112 Jamaluddin, et.al, *Proceedings International Conference : Islamic Education and Leadership*, (Bandung,:Ciptapustaka Media Perintis, 2011), Cet II, hal,192-193.

lahir berbagai kaum intelektual Islam dan melahirkan berbagai Guru besar dalam bidang ilmu pengetahuan.[113]

Kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syariat Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syariat. Umat tidak akan mengerti syariat tanpa pendidikan. Bila politik (kekuasaan) berfungsi mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan pembenahan lewat arus bawah (Rasyid, 1994 : 15).

Kutipan di atas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan di dalam Islam tampak demikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Hal ini dapat dipahami, karena tujuan pemerintahan Islam, menurut Abdul Gaffar Aziz (1993 : 95), adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Tujuan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan melaksanakan syariat. Syariat tidak akan berjalan bila umat tidak memahami ajaran Islam.

Selain karena faktor religius bahwa agama Islam sangat menjunjung aktivitas kependidikan, perhatian besar pada pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peran lembaga-lembaga pendidikan dalam penyampaian misi-misi politik. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik.

Pendidikan Islam tidak hanya berjasa menghasilkan para pejuang yang militan dan memperluas peta politik, tetapi juga para ulama yang berhasil membangun masyarakat yang sadar hukum. Seiring dengan perluasan peta politik dan pertambahan pemeluk Islam, juga

113 *Ibid*, hal. 188.

terjadi perkembangan lembaga (institusi) pendidikan dalam jumlah maupun varietasnya.

2. Tanggung Jawab Pembudayaan Pendidikan Islam

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan bila di tinjau dari konteks kebudayaan, maka pendidikan dimaknai sebagai proses pembudayaan peserta didik. Budaya itu sendiri merupakan buah keadaban manusia. Selanjutnya melalui proses pendidikan, peserta didik dituntun menjadi manusia yang makin beradab dan berahlak. Adalah keliru apabila peserta didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka, melalui pendidikan agama dan budaya Islami yang ada di madrasah-madrasah kiranya menjadikan peserta didik berilmu serta beradab dan berakhlak.

Pendidikan Islam bertanngung jawab membudayakan manusia kearah yang lebih baik secara berkesinambungan agar menjiwai diri manusia itu sendiri. Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-dasarnya, asal usul ibadat dan cara-cara melaksanaknnya dengan betul, dengan membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah-akidah agama dan menjalankan dan menghormati syiar-syiar agama.

Pendidikan bila di tinjau dari konteks kebudayaan, maka pendidikan dimaknai sebagai proses pembudayaan peserta didik. Budaya itu sendiri merupakan buah keadaban manusia. Selanjutnya melalui proses pendidikan, peserta didik dituntun menjadi manusia yang makin beradab dan berahlak. Adalah keliru apabila peserta didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka, melalui pendidikan agama dan budaya Islami yang ada di madrasah-madrasah kiranya menjadikan peserta didik berilmu serta beradab dan berakhlak.

Melalui makalah ini, penulis membahas mengenai pendidikan agama sebagai upaya pembudayaan dan pemberdayaan dilihat dari sudut pandang dari tatanan sistem, kebijakan hingga terhadap penerapannya di lapangan melalui lembaga-lembaga madrasah.

Pada dasarnya kebudayaan seharusnya tumbuh secara natural. Namun sejarah Indonesia mencatat bahwa pembangunan peradaban di Indonesia tidak pernah tuntas. Pembangunan kebudayaan dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan masyarakat dan membuka ruang bagi ekspresi-ekspresi budaya dalam interaksi sosial masyarakat. Untuk membangun ini, maka logika industri pendidikan harus dihilangkan karena hal ini mengasingkan manusia dari kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan menjadi pionir dari pembentukan peradaban yang kemudian menjadi dasar dari moralitas. Oleh karena itu perlu untuk dibangun ruang-ruang sosial untuk pengembangan budaya. Dengan kata lain, pembangunan sudah seharusnya tidak terpaku pada pembangunan ekonomi *an sich* tapi juga mengembangkan pembangunan menggunakan pendekatan budaya. Barangkali pendekatan budaya ini dapat memberikan ruang bagi pembangunan perabadan Indonesia melalui terbukanya ruang interaksi sosial. Mengingat tantangan globalisasi akan budaya sangat nyata, yakni mensubsitusi budaya lokal dengan budaya global sehingga masyarakat menjadi masyarakat global/beridentitas global.

3. Hubungan Tanggung Jawab politik dan Pembudayaan Pendidikan Islam

Pendidikan sesungguhnya produk dari kebudayaan manusia sendiri, ia menjadi bagian dari kebudayaan. Rancangan suatu pendidikan dalam kehidupan masyarakat sepenuhnya ditentukan oleh tingkat perkembangan dan kemajuan dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi

menunjang perannya di masa datang untuk mendukung perkembangan dan kemajuan dari kebudayaan suatu masyarakat. Dengan demikian, proses pendidikan memiliki hubungan "signifikan" dengan rekayasa bangsa di masa mendatang yang ditentukan oleh tingkat perkembangan dan kemajuan kebudayaan suatu bangsa.

Apabila demikian, maka "pendidikan dilihat sebagai suatu proses yang inheren dalam konsep manusia. Artinya manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. "Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, bahkan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan" dan kebudayaan suatu masyarakat. Tentu hal ini merupakan indikasi tentang urgensi pendidikan bagi kehidupan dan kebudayaan manusia, karena pendidikan mempunyai peranan senteral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan demi mencapai kemajuan dan untuk menunjang perannya di masa datang.

Realitasnya, sudah lama banyak orang mempertanyakan konsep pendidikan di Indonesia, mengapa proses pendidikan kita hasilnya tidak memperkuat dan mengembangkan budaya sendiri? Mengapa bangsa kita mudah larut dalam pengaruh dan menirukan budaya yang datang dari luar? Mengapa budaya asli kita tidak mampu menahan arus globalisasi yang datang? Apakah pendidikan kita selama ini menjadi sarana pewarisan budaya atau tidak?

Politik dan pembudayaan pendidikan Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya saling memberi perannya yang begitu penting dalam pendidikan terutama pendidikan Islam. Politik adalah usaha untuk mengembangkan pendidikan kearah yang lebih baik sedangkan pembudayaan adalah usaha untuk membiasakan perubahan yang lebih baik tersebut.

C. Tanggung Jawab politik Dan Pembudayaan Pendidikan Islam

Sebelum Kemerdekaan RI

Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu: Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan (dimaksudkan adalah Islam), Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat India ke Nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatra dan Jawa. Ajaran islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat. Didapati pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajian Al Qur'an dan pengajian kitab yang di selenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren dan lain-lain.

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu demi satu memperluas jajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik dan agama. Tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Belanda cukup banyak mewarnai perjalanan sejarah di Indonesia. Kedatangan Belanda di satu pihak memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi kemajuan tersebut hanyalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya.

Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan di dunia barat, sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pesantren. Padahal diketahui bahwa pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal di Indonesia sebelum adanya kolonial Belanda, justru sangat berbeda dalam sistem pengelolaannya dengan sekolah yang

diperkenalkan oleh Belanda. hal ini dapat di lihat dari terpecahnya dunia pendidikan.[114]

Kebenaran misi ini dapat kita lihat dalam pernyataan yang terdapat pada hak octroi VOC yang berbunyi:"Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang.Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah". Sehubungan dengan octroi ini, Gubernur Van Den Capellen pada tahun 1819 M. Merencanakan beridirnya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda.[115]

Kolonial Belanda memperlakukan umat Islam sejajar dengan kaum pribumi.Sekolah untuk mereka terbatas hanya sekolah desa dan Vervlog. Padahal agama Islam mayoritas penduduk pribumi. Sedangkan penduduk beragama selain Islam khususnya Kristen (Protestan-Katolik) diperlakukan sama dengan bangsa Eropa".[116] Dalam masa penjajahan Belanda juga terjadi perubahan tempat pendidikan di Minangkabau. Jika pada permulaan Islam Pendidikan Islam di Minangkabau hanya mengandalkan surau-surau, maka pada masa penjajahan Belanda mulai dibuat ruang-ruang berbentuk kelas sebagaimana sekolah-sekolah yang didirikan penjajah Belanda. Adapun pendidikan Islam yang menggunakan kelas pertama kali adalah sekolah Adabiyah di Kota Padang.[117]

Dalam hal ini muncul kesadaran dari pendidikan Islam. Ulama-ulama yang waktu itu juga menyadari bahwa sistem pendidikan tradisional pada masa itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dengan pembaruan di bidang sosial dan kebudayaan yang berdasarkan tradisi islam al-Qur'an dan hadist yang dibangkitkan kembali. Dengan memasukkan jiwa penggerak untuk maju ke dalam kurikulum, maka muncullah tokoh-tokoh pembaruan di Indonesia yang mendirikan

---

114 Samsul nizar, S*ejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta :kencana prenada group, 2009), hal. 298.
115 Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Bandung: Angkasa 2003) hal. 15.
116 Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Bandung: Angkasa 2003) hal. 16.
117 Mustafa Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*; (Cet.I Bandung: CV Pustaka Setia,1998), hal. 70.

sekolah Islam dimana-mana. Pada hakikatnya pendidikan agama Islam adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan.[118] Dalam konstek Indonesia tanggung jawab pendidikan Islam adalah berusaha supaya menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air dan tanggung jawab membudayakan nilai-nilai tersebut.

D. Tanggung Jawab Politik dan Pembudayaan Pendidikan Islam Sesudah Kemerdekaan RI.

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya umat islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Dengan pengertian dakwah diatas, otomatis dakwah sudah ada sejak islam masuk negara kita.

Masa orde lama (1959-1965) tercatat sebagai masa paling gelap dalam sejarah kehidupan kebangsaan indonesia. persiden sukarno mencanangkan konsepsi presiden yang secara operarional terwujud dalam bentuk demokrasi terpimpin. demokrasi terpimpin memusatkan seluruh kekuasaan ditangan presiden. Para pemimpin nasionalseperti; Mochtar lubus, KH. Isa Anshari, Mr. Assaat, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap, S.H, M. Yunan Nasution, Buya Hamka, Mr, Kasman Singodimedjo dan K.H E.Z. Muttaqin yang bersikap

---

118 http://hanifahmufidah503.blogspot.co.id/2015/05/makalah-sejarah-pendidikan-islam-di.html, 15/7/2017, 3:04

kritis terhadap politik demokrasi terpimpin, ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Puncak dari masa penuh kegelapan itu ialah pecahnya pemberontakan berdarah G.30.S/PKI.

Seluruh kekuatan bangsa yang anti komunis bangkit menghancurkan pemberontakan tersebut, datanglah zaman baru yang membawa banyak harapan, yaitu Era Orde Baru yang bertekad melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. pada masa inilah, para pemimpin bangsa yang di penjarakan oleh rezim orde lama, dibebaskan.

Para pemimpin nasionali Islami yang pada dasarnya tidak dapat duduk berpangku tangan, seperti Muhammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito mulai merancang gagasan untuk berpartisipasi penuh mendukung pemerintahan orde baru. Pada mulanya mereka mengharapkan pemerintah bersedia merehabilitasi partai politik Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno. Musyawarah nasional III Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) menyatakan: "bahwa pembubaran Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan kesatuan aksi mahasiswa indonesia (KAMI), yuridis formal tidak syah, dan yuridis material tidak beralasan". Namun, pembubaran masyumi, ternyata bukanlah masalah hukum semata-mata. Pembubaran tersebut adalah masalah politik.

oleh berbagai pertimbangan tidak dapat dipenuhi pemerintah, tokoh-tokoh nasionalis Islami itu tidak ngotot, juga tidak berputus harapan. Bagi mereka, aktivitas hidup ini semata-mata dalam rangka beribadah dan berdakwah untuk meraih keridhaan Ilahi, berkecimpung di lapangan politik, bagi mereka merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Maka ketika mereka tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Dalam kata-kata pak natsir, dulu berdakwah lewat jalur politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah.

Demikianlah maka pada 26 Februari 1967, atas undangan pengurus Masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta

Pusat, para alim ulama dan zu'ama berkumpul untuk bermusyawarah, membahas, meneliti, dan menilai beberapa masalah, terutama yang rapat hubungannya dengan usaha pembangunan umat, juga tentang usaha mempertahankan aqidah didalam kesimpangsiuran kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman Orde Lama. Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi ummat Islam, di mana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat ummat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan.

Bagi Indonesia, sebagian tanggung jawab menurut asumsi diatas terletak di pundak lembaga pendidikan Islam yang sekaligus sebagai bagian dari sistem pandidikan nasional. Secara ideal, pendidikan Islam menghantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi secara menyeluruh, hal ini dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan ataupun panca indera.

Salah satu bukti bahwa pendidikan Islam sudah mendapat perhatian pemerintah, dapat dilihat dari pengaruh ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah. Buku-buku pelajaran agama mulai disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah, sebagai halnya buku-buku pengetahuan umum yang belaku di sekolah-sekolah umum. Bahkan kemudian timbulah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dalam bentuk sekolah-sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah untuk tingkat menengah pertama, dan ada pula Kuliah Muallimin (pendidikan guru) yang disebut normal Islam (Mahmud Yunus, 1996: 102).

Abuddin Nata mengemukakan bahwa teori ini merupakan bukti bahwa politik pendidikan Pemerintah Orde Baru tidak jauh berbeda dengan kebijakan politiknya. Apabila kebijakan di bidang politik ini

sangat melemahkan umat Islam, maka politik pendidikan yang ditempuh juga sama. Dengan demikian, terlihat bahwa kebijakan politik suatu negara akan sangat memengaruhipolitik pendidikannya.[119]

Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia baik itu menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik, hal ini didukung dengan adanya keputusan sidang MPRS yang dalam keputusannya dalam bidang pendidikan agama mengatakan, Pendidikan Agama menjadi hak yang wajib mulai dari sekolah dasar sampai pergutruan tinggi. Dengan adanya keputusan tersebut keberadaan Pendidikan Agama semakin mendapatkan tempat dan akses yang luas untuk dijangkau setiap masyarakat.

E. Tujuan Pendidikan Islam Pada Masa Kemerdekaan

1. Tujuan yang bersifat individu, mencakup perubahan, yaitu perubahan pengetahuan.
2. Tujuan yang mencakup masyarakat, yaitu perubahan kehidupan masyarakat serta memperkaya pengalaman masyarakat.
3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni profesi dan kesertaan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam pada masa merdeka diarahkan sebagai upaya integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Setelah Indonesia merdeka pendidikan Islam dilaksanakan dilembaga pendidikan Islam diserahkan pengelolaannya kepada Departemen Agama. Secara bertahap Departemen Agama memberdayakan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan pesantren dan madrasah, di bawah asuhan Dirijen pendidikan Islam hingga saat sekarang ada tiga badan yang berada di bawah koordinasi Dirijen tersebut, yaitu:

---

119 Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 20-21.

a. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam

b. Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum

c. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.

Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam adalah bertugas untuk membina perguruan-perguruan Islam yang mencakup pesantren dan madrasah, baik negeri maupun swasta, pembinaan ketenagaan, kurikulum, sarana dan lain-lain. Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, membina pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah-seloah umum, pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pembinaan ketenagaan, kurikulum, sarana dan lain-lain. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, membina pendidikan Islam pada jenjang perguruan tinggi negeri dan suasta, IAIN, STAIN, UIN dan Perguruan Tinggi Islam Swasta. Pembinaan ketenagaan, kurikulum, sarana, mahasiswa, perpustakaan dan lain-lain.

F. Kesimpulan

Tangung jawab politik dan pembudayaan pendidikan Islam sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Karena pendidikan Islam menginginkan nilai-nilai ajaran berdasarkan al-Qur'an dan hadits tetap harus di jalankan dan berkesinambungan. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu: Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan.

Sementara itu bila membicarakan organisasi Islam dan kegiatan pendidikan, sudah tentu tidak bisa terlepas dari membicarakan bentuk, sistem dan cita-cita bangsa Indonesia yang sekian lama. Dasar Negara yang telah disepakati bersama saat mandirikan Negara adalah Pancasila, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang disajikan pangkal tolak pengelolaan Negara dalam membangun Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1996

Uyoh Sadulloh, dkk, *Pedagogik*, Bandung: Alfabeta,2010

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000

M.Arifin, *ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi aksara, 1991

Jamaluddin, et.al, *Proceedings International Conference :Islamic Education and Leadership*, Bandung,:Ciptapustaka Media Perintis ,2011

Samsul nizar "*sejarah pendidikan islam* " Jakarta :kencana prenada group, 2009

Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa 2003

Mustafa Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*; Cet.I Bandung: CV Pustaka Setia,1998.

http://nyong-latutuaparaya.blogspot.co.id/2014/12/makalah-pendidikan-islam-setelah.html,

http://kbbi.web.id/politik

http://hanifahmufidah503.blogspot.co.id/2015/05/makalah-sejarah pendidikan-islam-di.html

Pendidikan Islam perkembangan sosial, politik dan kebudayaan pada dasarnya dapat difahami dengan pengertian yaitu pendidikan Islam dan politik dimaksudkan suatu proses transformasi nilai-nilai sosial politik melalui institusi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dan politik dimaksudkan mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam berdasarkan sejarah perpolitikan di Indonesia pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Melihat terjadinya proses transformasi nilai-nilai politik, sosial dan kebudayaan melalui institusi pendidikan Islam. Kajian aspek historis, dengan mencoba menampilkan beberapa persoalan yaitu korelasi antara pendidikan Islam dan politik, implikasi sosialisasi politik dalam sistem pendidikan dan bagaimana pasrtisipasi mahasiswa dalam aktifitas politik. Lebih lanjut dan lebih menarik akan disampaikan dalam buku ini.